

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Faktualitas merupakan suatu syarat utama bagi sebuah karya jurnalistik. Ada atau tidaknya fakta-fakta yang faktual inilah yang membedakan karya jurnalistik dengan karya tulis lainnya. Dengan menjaga faktualitas suatu berita, sebuah media mampu menjamin kebenaran informasi yang merupakan hak dasar bagi setiap orang. Tidak terkecuali dengan majalah TEMPO yang mengusung gaya jurnalistik investigasi dalam rubrik Laporan Utama yang disajikannya setiap minggu. Dengan menggunakan skema obyektivitas yang pernah diperkenalkan oleh Westerstahl, peneliti telah melihat bagaimana faktualitas berita dalam rubrik Laporan Utama di majalah TEMPO.

Mengambil aspek kognitif yang menunjukkan cara untuk mengukur faktualitas sebuah berita, peneliti membagi unit analisis menjadi tujuh. Ketujuh unit analisis itu meliputi, nilai informasi, *Readability* (kemudahan untuk dibaca), *checkability* (penyebutan identitas sumber berita), akurasi, kelengkapan unsur berita, serta relevansi sumber berita. Setelah melakukan pengidentifikasian terhadap berita di Laporan Utama dalam majalah TEMPO pada periode 1 Mei hingga 31 Juli 2010, peneliti dapat menguraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai Informasi

Untuk unit analisis nilai informasi ini, dalam 52 berita pada periode 1 Mei hingga 31 Juli dalam rubrik Laporan Utama di majalah TEMPO semuanya atau dapat dikatakan 100% beritanya telah memuat nilai informasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan semua berita yang diterbitkan mampu menampilkan kedalaman informasi dengan memuat kejadian-kejadian lainnya yang berhubungan dengan topik yang dibicarakan sebagai latar berita agar diperoleh sebuah pemahaman yang utuh dari pembaca. Hal tersebut tidak terlepas dari lebih panjangnya waktu produksi berita yang dimiliki oleh majalah TEMPO. Selain itu dengan mengungkap gaya laporan investigasi sebagai gaya penulisan membuat majalah TEMPO dapat memenuhi faktualitas berita jika dilihat dari unit analisis nilai berita.

2. *Readability*

Unit analisis *readability* melihat mudah tidaknya sebuah berita untuk dibaca dan dipahami. Hal tersebut berkaitan dengan penggunaan istilah khusus yang berhubungan dengan suatu bidang atau ilmu tertentu yang menjadi topik atau tema pemberitaan. Dari analisis yang telah dilakukan diperoleh sebanyak 28 atau 54% berita yang tidak menggunakan istilah khusus dari suatu bidang atau ilmu yang digunakan. Sementara itu untuk berita yang menggunakan istilah khusus dalam suatu bidang atau ilmu ditemukan sebanyak 24 berita atau 46 %.

Dengan komposisi pemilihan kalimat yang lebih mudah dipahami ini menunjukkan bahwa majalah TEMPO masih berusaha menjaga agar pembacanya

lebih mudah membaca berita-berita dalam rubrik Laporan Utama. Dengan kemudahan yang didapat oleh pembaca itu maka akan didapat sebuah informasi yang bernilai bagi pembaca. Selain itu tujuan pembuatan berita akan dapat dicapai karena tidak ada kesalahan dalam pemaknaan.

3. *Checkability*

Unit analisis ini melihat lengkap atau tidaknya identitas sumber berita yang ada dalam sebuah berita. Terkadang untuk alasan tertentu sebuah media massa harus menyembunyikan identitas lengkap sumber berita berkaitan dengan berita yang dimuat. Hal tersebut bisa atas permintaan sumber berita itu sendiri yang merasa terancam jika identitasnya dicantumkan atau pun kebijakan dari media itu sendiri terkait dengan sebuah berita.

Dari analisis yang telah dilakukan, dalam majalah TEMPO selama periode 1 Mei hingga 31 Juli 2010 ditemukan sebanyak 30 buah atau 58% berita yang mencantumkan identitas sumber berita secara lengkap. Sisanya, untuk berita yang tidak mencantumkan identitas berita secara lengkap (anonym) terdapat 22 buah atau 42% berita. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun mengusung jurnalisme investigasi sebagai penulisan dalam rubrik Laporan Utama, majalah TEMPO masih menjaga faktualitas beritanya berkaitan dengan kejelasan sumber beritanya dalam setiap berita. Hal tersebut ditunjukkan dengan lebih banyak berita yang memuat identitas sumber berita secara lengkap dalam periode 1 Mei hingga 31 Juli 2010.

4. Akurasi

Akurasi menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga faktualitas berita. Kesalahan sekecil apapun dalam penulisan sebuah berita akan berpengaruh pada pemahaman pembaca. Oleh karena itu, perlu sebuah ketelitian dari setiap wartawan dalam menulis sebuah berita. Dalam Laporan Utama di majalah TEMPO periode 1 Mei hingga 31 Juli, dari keseluruhan 52 berita hanya ditemukan satu berita saja yang terdapat kesalahan penulisan. Dengan ada fakta semacam ini maka dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari unit analisis ini majalah TEMPO mampu menjaga faktualitas beritanya.

5. Kelengkapan Unsur Berita

Lengkap atau tidaknya unsur sebuah berita sangat penting dalam sebuah pemberitaan. Kelengkapan unsur berita ini erat hubungannya dengan nilai informasi dan juga pembuktian fakta ada atau biasa yang disebut dengan fakta yang bisa dirasakan dengan panca indera manusia.

Hasil dari unit analisis kelengkapan unsur berita ini ditemukan sebanyak 47 buah atau 90% berita yang memuat unsur-unsur berita secara lengkap dan ditemukan sebanyak 5 buah atau 10% berita yang tidak memuat unsur-unsur berita secara lengkap. Berdasar fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam Laporan Utama di majalah TEMPO telah mampu memenuhi faktualitas berita jika dilihat dari

unit analisis ini. Alasannya, dengan komposisi 90% berbanding 10% menjadi bukti kesimpulan tersebut.

6. Relevansi Sumber Berita

Unit analisis ini berkaitan dengan salah satu jenis fakta yakni fakta yang dikonstruksikan oleh seseorang. Oleh karena itu, dalam sebuah berita diperlukan sebuah kehati-hatian dalam memilih sumber berita agar diperoleh seorang sumber yang relevan. Semakin relevan sumber berita dengan topik yang dibicarakan maka semakin akurat juga fakta yang diungkapkan.

Dari analisis isi yang sudah dilakukan pada berita di Laporan Utama majalah TEMPO periode 1 Mei hingga 31 Juli 2010 tidak ditemukan sumber berita yang tidak relevan. Dari 52 berita yang dianalisis semua sumber beritanya memiliki kompetensi atas sebuah topik atau tema yang dibicarakan. Oleh karena itu, dalam unit analisis ini majalah TEMPO telah mampu menjaga faktualitas beritanya dengan menjaga relevansi sumber berita dalam setiap Laporan utama yang dimuat.

Dari semua unit analisis yang digunakan untuk membedah isi Laporan Utama dalam majalah TEMPO, dapat disimpulkan bahwa majalah TEMPO telah mampu menjaga faktualitas beritanya dalam rubrik Laporan Utama pada setiap edisinya. Satu hal yang membuat majalah TEMPO sering mendapatkan pengaduan terkait dengan pemberitaannya berkaitan dengan identitas sumber berita yang tidak disebutkan (anonym) dalam sebuah berita. Hal tersebut sempat diungkapkan oleh Aburizal

Bakrie yang pernah mengadukan majalah TEMPO berkaitan dengan kejelasan sumber berita ini. Namun jika melihat gaya penulisan investigasi yang dipilih majalah TEMPO untuk menuliskan Laporan Utama, pilihan majalah TEMPO untuk menyembunyikan identitas sumber berita adalah sebuah kebijakan redaksional untuk melindungi sumber berita dan ada kaitanya dengan penerapan kode etik jurnalistik berlaku di Indonesia. Jadi dengan begitu dapat disimpulkan majalah TEMPO telah mampu menjaga faktualitas beritanya dalam rubrik Laporan Utama.

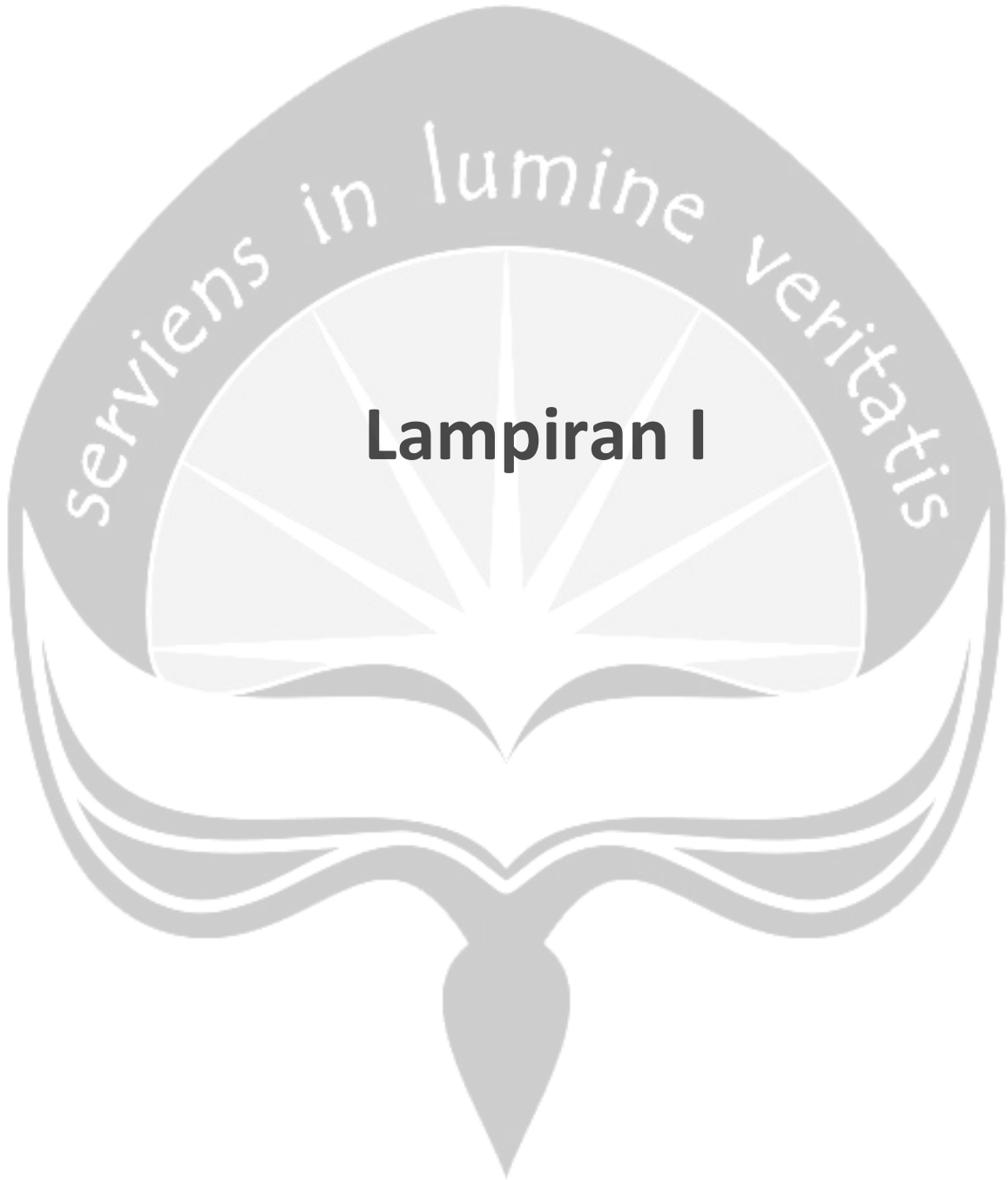
B. Saran

Sesuai dengan ruang lingkup dari analisis isi kuantitatif, maka penelitian ini hanya melakukan penelitian pada tingkat teks saja. Penelitian hanya mencakup semua bagian dari berita yang tampak dalam teks berita. Untuk beberapa alasan seperti alasan pencantuman identitas sumber berita dengan lengkap atau tidak tidak dapat diketahui dengan sebuah analisis isi kuantitatif.

Oleh karena itu peneliti menyarankan, agar pada penelitian selanjutnya dilakukan sebuah wawancara untuk menggali dan menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak mampu dijawab melalui analisis isi kuantitatif. Hal tersebut dikarenakan gaya penulisan yang sedikit berbeda dengan gaya penulisan berita yang lain. Di mana dalam berita investigatif terkadang seorang wartawan memang harus menyembunyikan identitas sumber berita. Dengan melakukan

wawancara itu, maka akan didapat sebuah hasil penelitian yang lengkap dan menyeluruh.





Lampiran I

**Coding Sheet Analisis Isi Faktualitas Berita Dalam Laporan Utama di
Malajah Berita Mingguan TEMPO**

Judul Laporan Utama : Suap Cek Pelawat BI

Judul Berita : Lupa Ceknya, Ingat Sakitnya

Tanggal : 26 April-2 Mei 2010

Nama Pengkoding :

1. Factualness

Nilai Informasi : a. Ada b. Tidak Ada

Readability (Penggunaan Khusus) : a. Ada Istilah Khusus
b. Tidak Ada Istilah Khusus

Checkability (Sumber Berita) : a. Jelas b. Tidak Jelas

2. Akurasi

Kesalahan Penulisan : a. Ada Kesalahan
b. Tidak Ada Kesalahan

3. Kelengkapan unsure berita

Apa : a. ada b. Tidak ada

Kapan : a. ada b. Tidak ada

Mengapa : a. ada b. Tidak ada

Dimana : a. ada b. Tidak ada

Siapa : a. ada b. Tidak ada

bagaimana : a. ada b. Tidak ada

4. Nilai Berita

Pentingnya berita bagi pembaca : a. mengarah ke *significance*
b. Mengarah ke *human interest*

5. Relevansi Sumber Berita

Relevansi sumber berita terhadap topik : a. Relevan
b. Tidak Relevan

1. Unit Analisis Nilai Informasi

| Berita | Nilai Informasi | |
|--------|-----------------|-----------|
| | Ada | Tidak Ada |
| 1 | v | |
| 2 | v | |
| 3 | v | |
| 4 | v | |
| 5 | v | |
| 6 | v | |
| 7 | v | |
| 8 | v | |
| 9 | v | |
| 10 | v | |
| 11 | v | |
| 12 | v | |
| 13 | v | |
| 14 | v | |
| 15 | v | |
| 16 | v | |
| 17 | v | |
| 18 | v | |
| 19 | v | |
| 20 | v | |
| 21 | v | |
| 22 | v | |
| 23 | v | |
| 24 | v | |
| 25 | v | |
| 26 | v | |
| 27 | v | |
| 28 | v | |
| 29 | v | |
| 30 | v | |
| 31 | v | |
| 32 | v | |
| 33 | v | |
| 34 | v | |
| 35 | v | |
| 36 | v | |
| 37 | v | |
| 38 | v | |

| Berita | Nilai Informasi | |
|--------|-----------------|-----------|
| | Ada | Tidak Ada |
| 39 | v | |
| 40 | v | |
| 41 | v | |
| 42 | v | |
| 43 | v | |
| 44 | v | |
| 45 | v | |
| 46 | v | |
| 47 | v | |
| 48 | v | |
| 49 | v | |
| 50 | v | |
| 51 | v | |
| 52 | v | |

- Ada nilai informasi:

$$\frac{52}{52} \times 100\% = 100\%$$

- Tidak ada nilai informasi:

$$\frac{0}{52} \times 100\% = 0\%$$

2. Unit Analisis *Readability*

| Berita | Penggunaan Istilah Khusus | |
|--------|---------------------------|-----------|
| | Ada | Tidak Ada |
| 1 | v | |
| 2 | | v |
| 3 | | v |
| 4 | v | |
| 5 | | v |
| 6 | v | |
| 7 | v | |
| 8 | | v |
| 9 | | v |
| 10 | | v |
| 11 | v | |
| 12 | v | |
| 13 | | v |
| 14 | | v |
| 15 | v | |
| 16 | | v |
| 17 | | v |
| 18 | | v |
| 19 | | v |
| 20 | | v |
| 21 | | v |
| 22 | | v |
| 23 | v | |
| 24 | v | |
| 25 | v | |
| 26 | | v |
| 27 | | v |
| 28 | v | |
| 29 | v | |
| 30 | | v |
| 31 | v | |
| 32 | | v |
| 33 | | v |
| 34 | v | |
| 35 | v | |
| 36 | | v |
| 37 | v | |
| 38 | v | |

| Berita | Penggunaan Istilah Khusus | |
|--------|---------------------------|-----------|
| | Ada | Tidak Ada |
| 39 | v | |
| 40 | | v |
| 41 | v | |
| 42 | v | |
| 43 | | v |
| 44 | | v |
| 45 | v | |
| 46 | v | |
| 47 | | v |
| 48 | v | |
| 49 | | v |
| 50 | v | |
| 51 | | v |
| 52 | | v |

- Ada Istilah Khusus:

$$\frac{24}{52} \times 100\% = 46\%$$

- Tidak ada Istilah Khusus:

$$\frac{28}{52} \times 100\% = 54\%$$

3. Unit Analisis *Checkability*

| Berita | Kejelasan Identitas Sumber Berita | |
|--------|-----------------------------------|-----------|
| | Ada | Tidak Ada |
| 1 | | v |
| 2 | | v |
| 3 | | v |
| 4 | v | |
| 5 | v | |
| 6 | | v |
| 7 | | v |
| 8 | | v |
| 9 | v | |
| 10 | v | |
| 11 | | v |
| 12 | v | |
| 13 | v | |
| 14 | | v |
| 15 | | v |
| 16 | v | |
| 17 | | v |
| 18 | v | |
| 19 | v | |
| 20 | | v |
| 21 | | v |
| 22 | | v |
| 23 | | v |
| 24 | | v |
| 25 | | v |
| 26 | v | |
| 27 | v | |
| 28 | v | |
| 29 | v | |
| 30 | v | |
| 31 | v | |
| 32 | v | |
| 33 | v | |
| 34 | | v |
| 35 | v | |
| 36 | | v |
| 37 | v | |
| 38 | v | |

| Berita | Kejelasan Identitas Sumber Berita | |
|--------|-----------------------------------|-----------|
| | Ada | Tidak Ada |
| 39 | v | |
| 40 | v | |
| 41 | v | |
| 42 | v | |
| 43 | v | |
| 44 | v | |
| 45 | v | |
| 46 | | v |
| 47 | | v |
| 48 | v | |
| 49 | | v |
| 50 | | v |
| 51 | v | |
| 52 | v | |

- Ada kejelasan identitas sumber berita:

$$\frac{30}{52} \times 100\% = 58\%$$

- Tidak ada kejelasan identitas sumber berita:

$$\frac{22}{52} \times 100\% = 42\%$$

4. Unit Analisis Akurasi

| Berita | KesalahanPenulisan | |
|--------|--------------------|-----------|
| | Ada | Tidak Ada |
| 1 | | v |
| 2 | | v |
| 3 | | v |
| 4 | | v |
| 5 | | v |
| 6 | | v |
| 7 | | v |
| 8 | | v |
| 9 | | v |
| 10 | | v |
| 11 | | v |
| 12 | | v |
| 13 | | v |
| 14 | | v |
| 15 | | v |
| 16 | | v |
| 17 | | v |
| 18 | | v |
| 19 | | v |
| 20 | | v |
| 21 | | v |
| 22 | | v |
| 23 | | v |
| 24 | | v |
| 25 | | v |
| 26 | | v |
| 27 | | v |
| 28 | | v |
| 29 | | v |
| 30 | | v |
| 31 | | v |
| 32 | | v |
| 33 | | v |
| 34 | | v |
| 35 | | v |
| 36 | | v |
| 37 | | v |
| 38 | | v |

| Berita | KesalahanPenulisan | |
|--------|--------------------|-----------|
| | Ada | Tidak Ada |
| 39 | v | |
| 40 | | v |
| 41 | | v |
| 42 | | v |
| 43 | | v |
| 44 | | v |
| 45 | | v |
| 46 | | v |
| 47 | | v |
| 48 | | v |
| 49 | | v |
| 50 | | v |
| 51 | | v |
| 52 | | v |

- Ada kesalahan penulisan:

$$\frac{1}{52} \times 100\% = 2\%$$

- Tidak ada kesalahan penulisan:

$$\frac{51}{52} \times 100\% = 98\%$$

5. Unit Analisis Kelengkapan Unsur Berita

| Berita | Kelengkapan Unsur Berita | |
|--------|--------------------------|-----------|
| | Ada | Tidak Ada |
| 1 | v | |
| 2 | v | |
| 3 | v | |
| 4 | | v |
| 5 | v | |
| 6 | v | |
| 7 | v | |
| 8 | v | |
| 9 | v | |
| 10 | v | |
| 11 | | v |
| 12 | v | |
| 13 | v | |
| 14 | v | |
| 15 | v | |
| 16 | v | |
| 17 | | v |
| 18 | v | |
| 19 | v | |
| 20 | v | |
| 21 | v | |
| 22 | v | |
| 23 | v | |
| 24 | v | |
| 25 | v | |
| 26 | v | |
| 27 | | v |
| 28 | v | |
| 29 | v | |
| 30 | v | |
| 31 | v | |
| 32 | v | |
| 33 | v | |
| 34 | v | |
| 35 | v | |
| 36 | v | |
| 37 | v | |
| 38 | v | |

| Berita | Kelengkapan Unsur Berita | |
|--------|--------------------------|-----------|
| | Ada | Tidak Ada |
| 39 | v | |
| 40 | v | |
| 41 | v | |
| 42 | v | |
| 43 | v | |
| 44 | v | |
| 45 | v | |
| 46 | v | |
| 47 | v | |
| 48 | v | |
| 49 | v | |
| 50 | v | |
| 51 | v | |
| 52 | v | |

- Ada kelengkapan unsur berita:

$$\frac{47}{52} \times 100\% = 90\%$$

- Tidak ada kelengkapan unsur berita:

$$\frac{5}{52} \times 100\% = 10\%$$

6. Unit Analisis Relevansi Sumber Berita

| Berita | Relevansi Sumber Berita | |
|--------|-------------------------|-----------|
| | Ada | Tidak Ada |
| 1 | v | |
| 2 | v | |
| 3 | v | |
| 4 | v | |
| 5 | v | |
| 6 | v | |
| 7 | v | |
| 8 | v | |
| 9 | v | |
| 10 | v | |
| 11 | v | |
| 12 | v | |
| 13 | v | |
| 14 | v | |
| 15 | v | |
| 16 | v | |
| 17 | v | |
| 18 | v | |
| 19 | v | |
| 20 | v | |
| 21 | v | |
| 22 | v | |
| 23 | v | |
| 24 | v | |
| 25 | v | |
| 26 | v | |
| 27 | v | |
| 28 | v | |
| 29 | v | |
| 30 | v | |
| 31 | v | |
| 32 | v | |
| 33 | v | |
| 34 | v | |
| 35 | v | |
| 36 | v | |
| 37 | v | |
| 38 | v | |

| Berita | Relevansi Sumber Berita | |
|--------|-------------------------|-----------|
| | Ada | Tidak Ada |
| 39 | v | |
| 40 | v | |
| 41 | v | |
| 42 | v | |
| 43 | v | |
| 44 | v | |
| 45 | v | |
| 46 | v | |
| 47 | v | |
| 48 | v | |
| 49 | v | |
| 50 | v | |
| 51 | v | |
| 52 | v | |

- Ada relevansi sumber berita:

$$\frac{52}{52} \times 100\% = 100\%$$

- Tidak ada relevansi sumber berita:

$$\frac{0}{52} \times 100\% = 0\%$$



Lampiran II

Perhitungan Coefcient Realibility

Nilai Informasi

| Pengkoder | Ada | Tidak Ada | Jumlah Berita |
|-------------|-----|-----------|---------------|
| Peneliti | 52 | 0 | 52 |
| Pengkoder 1 | 52 | 0 | 52 |
| Pengkoder 2 | 52 | 0 | 52 |

Pengkoder 1

$$M_1 = 52 + 0$$

$$= 52$$

$$CR = \frac{(2.M)}{(N_1+N_2)}$$

$$= \frac{(2.52)}{(52+52)}$$

$$= \frac{104}{104}$$

$$= 1$$

Pengkoder 2

$$M_2 = 52 + 0$$

$$= 52$$

$$CR = \frac{(2.M)}{(N_1+N_2)}$$

$$= \frac{(2.52)}{(52+52)}$$

$$= \frac{104}{104}$$

$$= 1$$

Readability

| Pengkode | Ada | Tidak Ada | Jumlah |
|------------|-----|-----------|--------|
| Peneliti | 24 | 28 | 52 |
| Pengkode 1 | 28 | 24 | 52 |
| Pengkode 2 | 25 | 27 | 52 |

Pengkode 1

$$M_1 = 24 + 24$$
$$= 48$$

$$CR = \frac{(2.M)}{(N_1+N_2)}$$

$$= \frac{(2.48)}{(52+52)}$$

$$= \frac{96}{104}$$

$$= 0,92$$

Pengkode 2

$$M_2 = 24 + 27$$

$$= 51$$

$$CR = \frac{(2.M)}{(N_1+N_2)}$$

$$= \frac{(2.51)}{(52+52)}$$

$$= \frac{102}{104}$$

$$= 0,98$$

Checkability

| Pengkoder | Jelas | Tidak Jelas | Jumlah Berita |
|-------------|-------|-------------|---------------|
| Peneliti | 30 | 22 | 52 |
| Pengkoder 1 | 27 | 25 | 52 |
| Pengkoder 2 | 25 | 27 | 52 |

Pengkoder 1

$$\begin{aligned}M_1 &= 27 + 22 \\ &= 49\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}CR &= \frac{(2.M)}{(N_1+N_2)} \\ &= \frac{(2.49)}{(52+52)} \\ &= \frac{98}{104} \\ &= 0,94\end{aligned}$$

Pengkoder 2

$$\begin{aligned}M_2 &= 25 + 22 \\ &= 47\end{aligned}$$

$$CR = \frac{(2.M)}{(N1+N2)}$$

$$= \frac{(2.47)}{(52+52)}$$

$$= \frac{94}{104}$$

$$= 0,9$$

Akurasi

| Pengkoder | Ada Kesalahan | Tidak Ada | Jumlah Berita |
|-------------|---------------|-----------|---------------|
| Peneliti | 1 | 51 | 52 |
| Pengkoder 1 | 3 | 49 | 52 |
| Pengkoder 2 | 2 | 50 | 52 |

Pengkoder 1

$$M_1 = 1 + 49$$

$$= 50$$

$$CR = \frac{(2.M)}{(N1+N2)}$$

$$= \frac{(2.50)}{(52+52)}$$

$$= \frac{100}{104}$$

$$= 0,96$$

Pengkoder 2

$$M_2 = 1 + 50$$

$$= 51$$

$$CR = \frac{(2.M)}{(N1+N2)}$$

$$= \frac{(2.51)}{(52+52)}$$

$$= \frac{102}{104}$$

$$= 0,98$$

Kelengkapan Unsur Berita

| Pengkoder | Lengkap | Tidak Lengkap | Jumlah Berita |
|-------------|---------|---------------|---------------|
| Peneliti | 48 | 4 | 52 |
| Pengkoder 1 | 51 | 1 | 52 |
| Pengkoder 2 | 48 | 4 | 52 |

Pengkoder 1

$$M_1 = 48 + 1$$

$$= 49$$

$$CR = \frac{(2.M)}{(N1+N2)}$$

$$= \frac{(2.49)}{(52+52)}$$

$$= \frac{98}{104}$$

$$= 0,94$$

Pengkoder 2

$$M_2 = 48 + 4$$

$$= 52$$

$$CR = \frac{(2.M)}{(N1+N2)}$$

$$= \frac{(2.52)}{(52+52)}$$

$$= \frac{104}{104}$$

$$= 1$$

Relevansi Sumber

| Pengkoder | Relevan | Tidak Relevan | Jumlah Berita |
|-------------|---------|---------------|---------------|
| Peneliti | 52 | 0 | 52 |
| Pengkoder 1 | 52 | 0 | 52 |
| Pengkoder 2 | 52 | 0 | 52 |

Pengkode 1

$$M_1 = 52 + 0$$

$$= 52$$

$$CR = \frac{(2.M)}{(N1+N2)}$$

$$= \frac{(2.52)}{(52+52)}$$

$$= \frac{104}{104}$$

$$= 1$$

Pengkode 2

$$M_2 = 52 + 0$$

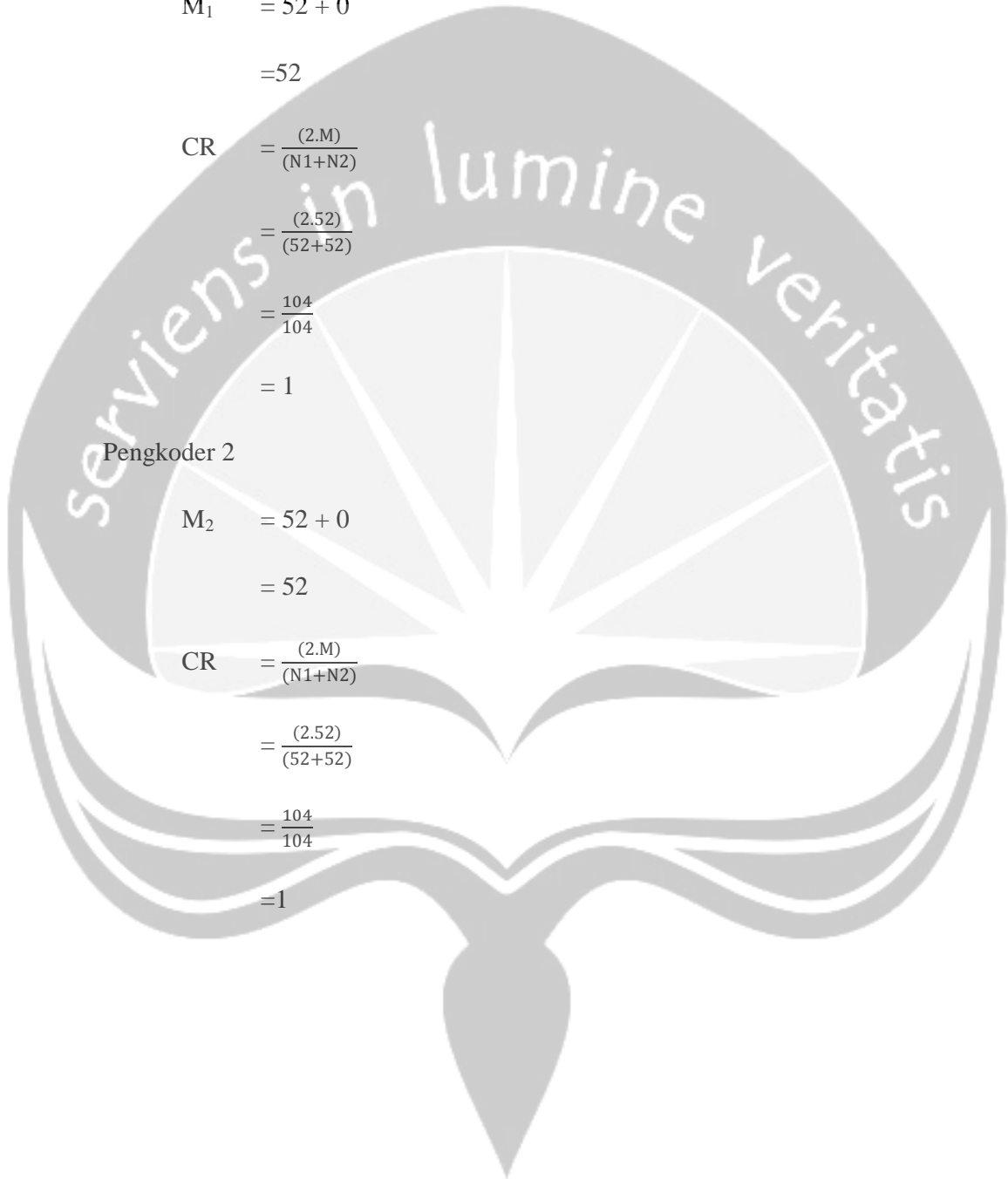
$$= 52$$

$$CR = \frac{(2.M)}{(N1+N2)}$$

$$= \frac{(2.52)}{(52+52)}$$

$$= \frac{104}{104}$$

$$= 1$$





migrain dan vertigo yang dideritanya selama tiga tahun. "Kalau migrainnya kambuh bisa mual dan muntah-muntah," kata Andreas. Pada saat diperiksa, Nunun sempat lancar ketika menceritakan awal pertemuannya dengan Arie Malangjudo. Hanya, tatkala pertanyaan menginjak soal adanya cek yang disebut Arie, tiba-tiba memorinya raib. Kepada penyidik ia hanya memberi jawaban "tidak tahu" atau "lupa".

Andreas sempat menyodorkan bukti lain—sesuatu yang sebenarnya tak kuat amat. Bukti itu adalah hasil pemeriksaan kesehatan Nunun oleh Nei I-Ping, dokter saraf dari Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura, dan psikolog Geraldine Tan, juga dari Singapura, pada 26 Februari 2010. Di situ Ping menyatakan Nunun menderita alzheimer ringan. Ia menyarankan Nunun minum obat Aricept lima miligram, Neurobion, ginkgo plus omega 3, dan terapi sebulan sekali. Geraldine juga menyimpulkan hal sama: Nunun menderita penurunan memori.

Kamis pekan lalu *Tempo* mendatangi Nei I-Ping di RS Mount Elizabeth. Ruang prakteknya cukup luas, sekitar 40 meter persegi, di ruang 04 lantai 11 rumah sakit itu. Setelah melayani dua pasien, ia menerima *Tempo*. "Saya tahu majalah Anda, saya membacanya di Internet," kata dokter yang memasang tarif 500 dolar Singapura (sekitar Rp 3 juta) per kunjungan ini.

+Betul Anda punya pasien bernama Nunun Nurbaetie?

-Saya tidak hafal satu per satu. Tiap hari pasien saya belasan.

+Maksud saya, seseorang dalam foto ini (*Tempo* menyodorkan gambar Nunun).

-Ya, dia pasien saya.

+Sejak kapan dia berobat di sini?

-No comment. Jika saya jawab pertanyaan Anda, izin praktek saya bisa dicabut."

Keterangan yang lebih jelas datang dari Dr Samino, ahli saraf Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Menurut dia, kebanyakan penderita migrain atau vertigo tak kehilangan fungsi memori intelektual. Sebab, ujar Samino, migrain biasanya menyerang otak besar dan "rumah siput" dalam telinga tempat "saraf delapan" berada. Jika ini terjadi, orang akan menjadi mual dan muntah. "Adapun jika diikuti stroke, yang terganggu adalah memori keseimbangan," katanya. "Bukan memori intelektual yang ada di otak besar."

Bagja Hidayat, Erwin Daryanto (Jakarta),
Ramidi (Singapura)



TEMPO/NOVI KARBILA

Ratu Hermes Rajin Mengaji

Nunun dikenal sebagai sosialita papan atas. Mengoleksi kain dan kebaya kuno, perhiasan, hingga puluhan tas Hermes.

JUMAT petang itu, lima puluhan perempuan dengan dandan-an modis antre memasuki rumah Nunun Nurbaetie Daradjatun di Jalan Cipete Raya, Jakarta Selatan. Melewati empat lapis pemeriksaan pengamanan, mereka masuk ke ruang tamu dengan sofa dan kursi tamu jati bergaya Italia.

Teh, kopi, dan aneka suguhan terhampar di meja saji. Sore itu, sahibul-bait mengundang para kolega menyaksikan peragaan busana dan kerajinan Nusantara. Tiga puluh menit bercengkerama di ruang tamu, pemandu acara mengajak tetamu memasuki ruang tengah. Ruang keluarga itu ternyata telah disulap menjadi area *standing party*.

Di ruang ini, tamu disuguhi koleksi berbagai lukisan, benda kristal, dan hiasan dinding dari porselen. Acara sore itu semakin lengkap dengan lenggok-lenggok peragawati yang mempeperagakan koleksi kebaya dan aneka kain kuno, seperti kain tapis Lampung. Berbagai jenis perhiasan menempel di tubuh sang model. "Semua barang yang mereka kenakan koleksi pribadi Ibu Nunun," tutur seorang tamu yang hadir pada acara akhir Juli 2007 itu kepada *Tempo*, Rabu pekan lalu.

Sumber *Tempo* di kalangan sosialita menyatakan istri mantan Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal (Purnawirawan) Adang Daradjatun memang kolektor barang mewah. Selain mengoleksi kebaya dan kain kuno, perempuan 59 tahun itu paling suka mengoleksi berlian dan tas Hermes. "Bahkan ada satu lemari besar khusus untuk menyimpan tas Hermes." Disarankan, tas itu ada yang Rp 1 miliar.

Kegemaran Nunun mengoleksi tas Hermes dibenarkan sahabatnya Tience Sumartini. "Tapi saya tak tahu berapa jumlahnya," kata Tience. Teman lain menceritakan, Nunun sering mengadakan acara bersama teman-temannya di Hotel Dharmasraya, Cilandak Town Square, dan Sheraton. Tience tidak membantah atau menyanggah. Menurut dia, di rumah Nunun juga sering digelar acara pengajian salat tarawih berjemaah di bulan Ramadhan. "Saya sering ikut pengajiannya," kata Tience.

Menurut satu sumber, dalam bergaul Nunun sangat selektif. "Dia hanya bergaul dengan istri pejabat dan duta besar." Namun Rosa Rai Djalil mengatakan Nunun perempuan yang ramah, mudah bergaul, dan ulet ber-



TEMPO/NOVI KASITRA

tidak memilih-milih teman," kata Dino Patti Djalal, juru bicara pemerintah, itu.

Nunun, bersama Anita Rusli, Dede Yusuf, dan Siti Garsiah, adalah Perhimpunan Kebayaku. Rosa juga tergabung dalam Mutu Manikam Nusantara, anggotanya kebanyakan istri anggota kabinet Indonesia Bersatu.

...
Lahirkan di Sukabumi, Jawa Barat pada 28 September 1951, Nunun adalah darah pengusaha dari keluarga tuanya, Engkip Dulkiflie (almarhum) dan Mimin Suparmi, pengusaha perkebunan cengkeh. Ibu tiga anak, satu putri ini—Adri Ahmad, Tuza Junius (35), Ratna Farihan, dan Mochamad Azara (15)—murni dalam dunia bisnis setamat dari Sekretaris dan Manajemen Indonesia, Jakarta, pada 1980-an.

... pertamanya adalah memba...
... regional II. Sukses di bidang te...
... perempuan yang meni...
... 27 Februari 1972 ini melirik...
... agrobisnis, agroindustri, dan...
... media. Pada 1988, dengan

modal sekitar Rp 80 miliar, Nunun mendirikan PT Wahana Esa Sambadha, yang kini menjadi PT Wesco, *holding company* Grup Wahana.

Salah satu anak perusahaan PT Wesco bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Di sinilah awal pertemuan Nunun dengan Ahmad Hakim Safari Malangjudo alias Arie Malangjudo, pengantar cek pelawat ke sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004. Sebagian cek diterima anggota Dewan di kantor PT Wahana di Jalan Riau, Menteng, Jakarta Pusat.

Cek itu, menurut pengakuan Arie, didistribusikan atas perintah Nunun sebagai uang terima kasih kepada anggota Dewan. Tak jelas uang terima kasih seperti apa. Tapi, pada saat cek dibagikan, anggota Komisi Keuangan Dewan baru saja selesai memilih Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia—yang

dimenangi Miranda Swaray Goeltom.

Bagi Miranda, Nunun bukan orang asing. "Kami sering berkumpul dan mengadakan acara bersama," kata Miranda. Keduanya berkenalan di San Francisco, Amerika Serikat. "Putri Bu Nunun bersekolah dengan anak saya di San Francisco," kata Miranda ketika bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, awal April lalu.

Empat kali sudah pengadilan memanggil Nunun, tak satu pun dihadapinya. Melalui kuasa hukumnya, Nunun mengaku tidak bisa menghadiri persidangan karena sakit. Jenis penyakitnya termasuk ajaib: lupa berat, tidak bisa mengingat peristiwa lalu. "Kalau dipaksakan, bisa menjurus pada demensia," kata Andreas Harry, dokter pribadi Nunun. Kini, kabarnya, Nunun menjalani rawat inap di Singapura. Pada Desember tahun lalu, ia masih terekam oleh sebuah majalah gaya hidup luar negeri. Di sana ia berpose bersama suaminya dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. Di situ, mengenakan kebaya hijau, Nunun terlihat segar. Senyumnya lebar mengembang. "Fisiknya kelihatan sehat, tapi sebenarnya sakit," kata Andreas.

Erwin Darlyanto

Nunun paling suka mengoleksi berlian dan tas Hermes. Di pasaran, harga tas itu ada yang mencapai Rp 1 miliar.

Ferry Mati Meninggalkan Misteri

Namanya muncul belakangan—sebagai pemesan cek pelawat yang kini jadi omongan. Tak dikenal kalangan pengusaha kelapa sawit.

SEJAK suaminya disebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dua pekan terakhir, telepon seluler Linda Surya—di hampir tak pernah berhenti berdering. Koleganya silih berganti menelepon. Semua bertanya hal yang sama: benarkah suaminya tersangkut kasus cek yang kini membuat sejumlah anggota DPR menjadi terdakwa?

Kepada *Tempo*, Linda mengaku sebelumnya dia sama sekali tak tahu suaminya terlibat perkara ini. "Saya jarang menonton televisi atau membaca koran," kata ibu tiga anak ini. "Saya baru tahu soal ini setelah ada telepon-telepon itu."

Nama Suhardi alias Ferry Yen muncul dalam pengakuan Direktur Keuangan PT First Mujur Plantation & Industry Budi Santoso, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dua pekan lalu. Budi menyebut pembelian 480 lembar cek pelawat di Bank Artha Graha atas pesanan Ferry. Cek perjalanan itu merupakan pembayaran uang muka pembelian lahan kelapa sawit 5.000 hektare di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Menurut Budi, awalnya Ferry meminta membayar tanah itu dalam bentuk cek. Namun, ketika akan dilakukan pembayaran dengan tujuh lembar cek, Ferry tiba-tiba meminta pembayaran dilakukan dengan cek pelawat. Maka PT First Mujur meminta Bank Artha Graha menukar cek-cek itu dengan cek pelawat pecahan Rp 50 juta. Belakangan cek-cek itu mengalir ke tangan para anggota Dewan.

Sebagai orang yang disebut pernah memiliki cek, keterangan Ferry jelas penting. Sebab, sejumlah keganjilan muncul di sini. Misalnya, bagaimana mungkin cek itu bisa sampai ke tangan DPR. Atau, mengacu pada keterangan Direktur PT Wahana Esa Sejati, Arie Jalangjudo, yang mengaku diminta untuk mengantarkan cek-cek itu, bagaimana mungkin cek Ferry sampai ke Nunun. Tapi Ferry sudah meninggal. Menurut Linda, suaminya wafat tiga tahun lam. Komisi Pemberantasan Korupsi malah memastikan kematian itu me-



Ferry Yen dan Bank Artha Graha. Asal cek pelawat pecahan Rp 50 juta yang dipesan melalui Bank Artha Graha.

lalui akta kematian Ferry yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat pada 15 Januari 2007. Menurut Kepala Suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil Jakarta Barat Ahmad Fauzi, seluruh data kependudukan Suhardi Suparman sudah dibawa Komisi.

Berita kematian pria kelahiran 14 Juli 1957 itu juga muncul dalam iklan duka di media massa. Di situ disebutkan jenazahnya disemayamkan di rumah duka Rumah Sakit Dharmais dan dikremasi di krematorium Marunda pada 11 Januari 2007.

Mansyur, petugas Rumah Duka Rumah Sakit Dharmais, kepada *Tempo* membenarkan bahwa pada 7 Januari 2007 pernah disemayamkan jenazah dengan nama Suhardi Suparman alias Ferry Yen. Menurut dia, jenazah itu empat hari berada di Dharmais, lalu dibawa ke Krematorium Nirwana, Bekasi, untuk diperabukan. "KPK juga pernah datang memeriksa nama itu," kata Mansyur.

Istri Ferry mengaku belum pernah ditanya Komisi perihal suaminya. "Saya tak pernah diperiksa," ujar perempuan yang bekerja di sebuah kafe di gedung BRI di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, itu. Di persidangan, jaksa dan hakim pun tak ada yang mengorek perihal Ferry Yen.

Meski disebut-sebut sebagai pengusaha kelapa sawit, sejumlah pebisnis



bahan baku minyak goreng itu di dan atau Tapanuli umumnya tak mengenal Ferry Yen. "Saya tak pernah mendengar nama itu," ujar mantan ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Derom Bangun waban serupa disampaikan Sekretaris Gapki, Joko Supriyono. Asmar Ardi salah seorang pemilik kebun sawit Sumatera Utara, juga menggeledah kepala ketika ditanya perihal Ferry.

Tinggal di Jalan Alam Asri IV Blok dok Indah, Jakarta Selatan, Ferry rapa tetangga hanya mengenal Ferry sebagai karyawan bank. Mereka menempati rumah itu mulai akhir 2007. "Baru beberapa bulan tinggal di rumah ia meninggal," ujar seorang warga pada *Tempo*.

Tapi Linda membantah suaminya sebagai karyawan bank. Ia mengaku suaminya pedagang. Namun Linda tak tahu suaminya berdagang apa. "Saya tidak aktifnya di luar." Menurut Linda selama menikah dengan lelaki yang lah memberinya tiga anak itu, ia tak pernah berkumpul dengan keluarga besar suaminya. "Saya tidak tahu siapa saja kakak atau adiknya."

Linda mengaku terpekuk ketika mendengar suaminya dihubungkan dengan skandal cek pelawat yang sekarang ia bersikap masa bodoh. Katanya, "Saya tak peduli nama Ferry jelek atau bagus."

Cara Tuhan Menghadapi Paskah

Bekas Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional dituding menerima cek pelawat Rp 600 juta. Ia mati-matian menyangkal.

BERONDONGAN pertanyaan hakim tidak membuat Paskah Suzetta kendur dalam mempertahankan jawabannya. Berkali-kali diminta hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bicara jujur, jawaban bekas Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional ini tetap sama. Ia menyangkal ikut menikmati cek pelawat yang dibagikan koleganya semasa di DPR setelah Miranda Swaray Goeltom terpilih sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia. "Saya tidak pernah menerima cek itu," ujarnya.

Selasa dua pekan lalu, hakim Herdi Agusten tampak sudah habis kesabaran menghadapi kegigihan bekas anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu menyatakan tak pernah menerima cek. Sebelumnya, dalam sidang yang sama, dua saksi lain, Baharudin Aritonang dan Hengky Baramuli, juga memakai jurus yang sama: membantah mendapat cek perjalanan itu. "Kalau menerima tapi tidak mengaku, kita pakai cara Tuhan saja untuk mengambil harta kalian," kata ketua majelis hakim Herdi Agusten.

Wajar adanya jika hakim kesal. Soalnya, dalam sidang sebelumnya, Minhui—karyawan *showroom* mobil PT Inti Karya Megah—bersaksi bahwa Paskah memiliki cek pelawat yang dikeluarkan Bank Internasional Indonesia. Kata Minhui, pada 2004 Paskah membeli mobil Honda CR-V dengan cek pelawat di tokonya. Semula, ujarnya, mobil CR-V coklat itu dipatok Rp 265 juta. Entah mengapa Paskah mendapat diskon. "Waktu itu Pak Paskah datang ke perusahaan," kata Minhui. Paskah menyodorkan lima lembar cek BII masing-masing bernilai Rp 50 juta untuk membayar mobil barunya. "Kekurangannya dibayar tunai," tutur Minhui.

Paskah tak membantah membeli mo-



Paskah Suzetta, Hamka Yandhu, dan Panda Nababan (kanan).

Hamka Yandhu mengaku menyerahkan langsung cek pelawat ke tangan Paskah.

bil itu. Tapi, ujarnya, mobil senilai Rp 261,4 juta itu dibayar tunai dari hasil menjual mobil Escudo ditambah tabungan anaknya.

Soal Paskah mendapat cek juga diperkuat pengakuan Sumaryanti, anggota staf keuangan PT Sukuk Mulia Sejahtera. Di perusahaan ini Paskah duduk sebagai komisaris. Kepada hakim, Senin dua pekan lalu, Sumaryanti mengaku pernah mencairkan lima sampai sepuluh lembar cek atas perintah Tri Iriastuti, Direktur PT Sukuk. Ia mengaku tidak tahu asal-usul cek itu. Yang pasti, dari penelusuran Komisi Pemberantasan Korupsi, cek yang dicairkan Sumaryanti nomor serinya berurutan dengan cek yang dipakai membayar mobil Honda CR-V. Cek-cek tersebut sudah dikantongi jaksa. Saat jaksa memperlihatkan barang bukti itu, lagi-

lagi Paskah menggelengkan kepala.

KISAH cek pelawat dari kantong Nunun Nurbaetie yang "hinggap" kantong Paskah Suzetta terang-benderang dibebankan oleh Hamka Yandhu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Bekas anggota Komisi Keuangan dan Perbankan yang kini berhadapan dengan dakwa itu mengaku menyerahkan langsung cek pelawat ke tangan Paskah. Selain Paskah dan dirinya, sebelas rekannya dari Fraksi Golkar di Komisi Keuangan dan Perbankan menikmati hasil haram itu.

Namun Hamka membantah dituding mengambil cek itu ke kantor Nunun. Menurut dia, pada 8 Juni 2004, saat acara pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia yang dimenangkan



TEKUNTORO ALYUSYHO



...ada, ia diajak Azhar Muchlis, anggota Komisi IX lainnya, bertemu di suatu tempat. "Saya bertatap muka saja," ujar Hamka.

Azhar lalu mengajak Hamka ke sebuah kantor di Jalan Riau, Menteng, Jakarta Pusat. Di kantor milik Nunun Muchlis ini mereka bertemu Arie Budidjaja, Direktur PT Wahana Esabada. Di sanalah, ujar Hamka, Arie Budidjaja menyerahkan amplop cokelat berisi cek pelawat bernilai Rp 7,35 miliar kepada Azhar.

Amplop cokelat lalu dibawa ke sekretariat Komisi IX di lantai dasar Gedung Nusantara I. Di sana telah berkumpul beberapa anggota Komisi Keuangan Fraksi Golkar. Amplop itu dibuka dan dituangkan di atas meja. Di dalam amplop itu ada sejumlah amplop kecil yang berisi cek pelawat. Masing-masing mengislah amplop sesuai dengan namanya.

Dari penyidikan terungkap kemudian, anggota Golkar, Nurlif, menerima cek senilai Rp 550 juta, Baharudin Ariyanto Rp 350 juta, Antony Zeindra Abidin Rp 600 juta, Achmad Hafiz Nawawi Rp 400 juta, Bobby Suhardiman Rp 500 juta, Reza Kamarullah Rp 500 juta, Benny Baramuli Rp 500 juta, Asep Muchlis Rp 150 juta, Azhar Muchlis Rp 500 juta, dan Marthin Bria Rp 250 juta.

Menurut Hamka, sesuai acara bagipamplop itu, bersama Azhar, mereka ke Hotel Mulia. Di sana mereka jawab soal amplop itu kepada Paskah, saat itu sebagai ketua kelompok Fraksi Partai Golkar di Komisi IX. "Ia memang manggut-manggut," ujar Hamka. Setelah makan malam di hotel, Hamka mengantarkan Paskah pulang. Sampai

di rumah Paskah, Hamka menyodorkan amplop bertulisan "Paskah Suzetta". "Ini jatahnya, Kang," ujar Hamka. Paskah, ujar Hamka, tidak menghitung tapi langsung memasukkan amplop itu ke sakunya. Menurut jaksa, Paskah telah menerima cek senilai Rp 600 juta.

Benarkah Hamka diajak Azhar? Ini yang masih diragukan. Berdasarkan pengakuan Arie, pada 7 Juni 2004 dirinya pernah bertemu dengan Hamka di ruang kerja Nunun. Hamka saat itu datang sendiri. Penyidik KPK tidak bisa meminta keterangan Azhar karena sudah meninggal.

Di depan sidang, Arie menyatakan pernah mengantar amplop berisi cek ke Dudhie Makmun Murod (PDIP) di Restoran Bebek Bali dan Endin Akhmad Jalaluddin Soefhara (PPP) di Hotel Atlet, kawasan Senayan. Dari Dudhie cek menyebar ke anggota Fraksi PDI Perjuangan, dan dari Endin mengalir ke anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Adapun Udju Djuhaeri, bersama tiga rekannya yang lain dari Fraksi TNI/Polri, malah "menjemput bola": mengambil jatah langsung ke kantor PT Wahana. Dari semua yang diduga menerima cek itu, empat di antaranya kini menjalani persidangan: Dudhie, Hamka Yandhu, Endin, dan Udju.

Jaksa menuding Paskah punya peran penting dalam memenangkan Miranda. Menurut jaksa, dialah yang memimpin rapat rutin kelompok Fraksi Golkar di lantai 14 Gedung Dewan. Dalam rapat itu ia menyampaikan hasil konsultasi dewan pimpinan fraksi yang menginginkan Golkar mendukung Miranda sebagai deputy gubernur senior. Dalam pertemuan itu, menurut jaksa, ada pembicaraan informal tentang dana

yang akan dikucurkan melalui fraksi.

Hamka juga mengaku perkenalannya dengan Nunun difasilitasi Paskah. Kata Hamka, sebulan sebelum proses *fit and proper test* calon Deputy Senior Bank Indonesia, ia diajak Paskah menghadiri undangan acara Paguyuban Pasundan yang diselenggarakan Nunun di Hotel Mulia, Jakarta. Di sana Hamka diperkenalkan dengan Nunun. Tiga hari kemudian, bersama antara lain Paskah dan Nurlif, Hamka hadir dalam acara syukuran Nunun di kediaman di Cipete, Jakarta Selatan.

Sejak bersaksi di pengadilan dua pekan lalu, Paskah kini alergi menerima wartawan. Telepon selulernya tak diangkat dan pesan pendek yang dikirim kepadanya tak dijawab. Disambangi di rumahnya di Jalan Mendawai, Jakarta Selatan, ia pun tak ada. "Bapak jarang ke sini," kata Nano, penjaga rumah.

Sebelumnya, kepada *Tempo*, awal bulan lalu, Paskah membantah jika disebut mengarahkan pemilihan Deputy Gubernur Senior BI. "Saya bukan pimpinan fraksi, jadi tak punya kewenangan itu," katanya. Dia juga membantah menghadiri pertemuan rutin membahas strategi memenangkan Miranda. "Hanya ada pertemuan rutin kelompok fraksi pada Jumat," katanya. Di sana anggota Golkar dipersilakan menentukan sikap masing-masing dalam memilih deputy gubernur senior.

Paskah mengaku mengenal Nunun karena mereka aktif dalam Paguyuban Pasundan. Tapi ia menegaskan tak menjalin komunikasi apa pun dengan Nunun atau dengan Miranda perihal pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia.

Sutarto, Ramidi, Gustidha Budiartie



Brigadir Jenderal Edmon Ilyas.

Susno saat pulang kampung ke Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan.

miliar. Dari sini, dana berpindah lagi ke rekening Erlin Kosasih senilai Rp 1,2 miliar dan rekening Yeni Martauli Rp 825 juta. Lalu lintas duit ini terjadi pada awal tahun ini.

Satu jam menerima *Tempo*, Andi mengungkapkan versinya tentang kasus ini. Sesekali nada bicaranyameninggi. "Saya dijebak," katanya. Kadang suaranya melemah, bergetar menahan emosi. Tiga kali dia mengelap matanya yang berkaca-kaca.

29 Agustus 2009

Pukul 19.00, Andi Kosasih bersantap malam bersama istri dan tiga anaknya di Restoran Long Beach, Senayan City, Jakarta Selatan. Tiba-tiba telepon selulernya berdering. Di seberang, Haposan Hutagalung, pengacara yang sejak 2007 dikenalnya, menanyakan posisi Andi. Sang penelepon lalu meminta Andi datang ke Hotel Sultan, Jakarta.

Dengan taksi, Andi meluncur ke hotel itu. Istri dan anak-anaknya menunggu di Senayan City. Haposan turun dari salah satu kamar menjemput Andi. Mereka mengambil tempat di Restoran Peacock, lantai satu hotel yang dulu bernama Hilton ini. "Haposan minta tolong kepada saya agar membantu kawannya yang uangnya diblokir penyidik Bareskrim Polri," kata Andi.

Kepada penyidik, Andi mengatakan lalu naik ke kamar Haposan. Di sana sudah menunggu tiga orang, yakni pengacara Lambertus, dan dua orang yang

tidak dikenal Andi. Belakangan, satu di antaranya dikenalkan sebagai Gayus Tambunan. "Haposan mengenalkan dialah pemilik uang yang diblokir," katanya.

Haposan meminta Andi mengaku sebagai pemilik duit di rekening Gayus yang diblokir. Andi dijanjikan Rp 500 juta sebagai imbalan, jika berhasil membuka blokir. Sepuluh hari setelah pertemuan pertama, Andi diminta datang ke kantor pengacara Haposan di gedung Patra Jasa, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Ternyata telah disiapkan surat perjanjian pengadaan tanah antara Gayus dan Andi. "Saya tinggal tanda tangan saja," tutur Andi.

Berebek kontrak inilah, kepada penyidik Direktorat II Ekonomi Khusus, Andi mengaku sebagai pemilik duit di rekening Gayus. Ia dipanggil dua kali, yang pertama pada September 2009. Ia "dimintai keterangan" oleh Ajun Komisaris Sri Sumartini, Komisaris Arafat, dan Madiyani di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Alih-alih mencari kesalahan, penyidik justru memberikan solusi kepada Andi agar menyiapkan enam kuitansi, sebagai bukti kerja sama pengadaan tanah. Kuitansi ini belakangan dilampirkan sebagai bukti dalam berkas perkara Gayus.

Tim independen kemudian meminta keterangan Andi: siapa saja penyidik yang pernah berhubungan dengannya? Di sinilah muncul pengakuan penting. Andi mengatakan bertemu dengan Edmond Elyas dan Susno Duadji.

Kepada penyidik tim independen,

Andi menuturkan, pada suatu hari mendapat telepon dari Haposan agar menghubungi Edmon Ilyas. Setelah berbicara lewat telepon, Andi datang menemui Edmon di kantor Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Saat itu ia bertanya, "Apakah blokir sudah dibuka?"

Edmon, seperti yang tertulis dalam dokumen pemeriksaan itu, menjawab, "Lebih baik bertemu Bapak Kaba (Susno, Kepala Badan Reserse)." Kemudian mereka berdua berjalan menuju ruangan Susno.

Bekas Direktur Ekonomi Khusus Bareskrim ini masuk ke ruangan bosnya itu terlebih dulu. Sepuluh menit berselang, Edmon keluar, lalu meminta Andi masuk. Di dalam ruangan, Andi mengingat dialog dengan Susno Duadji.

Andi: Apakah bisa dibantu untuk membuka blokir rekening Gayus?

Susno: Apakah benar uang tersebut milik Anda? Tukar di *money changer* mana?

Andi: Dulu waktu terjadi kerusuhan Mei 1998, saya menyimpan banyak dolar AS.

Susno: Siapa yang meng-handle masalah uang Gayus ini.

Andi: Haposan Hutagalung. Selesai berbicara, Andi pamit. Belum sempat keluar dari pintu, Susno memanggilnya. Sang jenderal meminta Andi tak datang sendiri. "Nanti sama Haposan saja."

Dimintai konfirmasi soal dialog yang tertera dalam dokumen penyidikan itu, Andi tidak membantah maupun men-

menanyakan. "Saya tidak mau bicara itu," katanya. "Seluruh keterangan sudah saya sampaikan ke penyidik."

Ditanya apakah ada pembicaraan tentang uang untuk pencairan dana tersebut, Andi tak mau menerangkan. "Tanya saja itu ke Susno dan Haposan," dia. Adapun Susno tak bersedia memberikan konfirmasi. "Dari mana Anda tahu?" Dia menegaskan tim penyidik tidak pernah menyatakan hal itu.

Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, Haposan belum bisa dimintai konfirmasi. Namun, di hadapan penyidik pada awal April lalu, dia memberikan keterangan yang bertolak belakang dengan pernyataan Andi. Haposan mengaku pertemuan di Restoran Peacock Hotel Sultan sepenuhnya inisiatif Andi Kosasih.

Demikian juga dengan upaya permintaan pencabutan pemblokiran rekening Gayus. Menurut dia, itu sepenuhnya inisiatif Andi. "Dia dua kali bertemu Susno tanpa saya tahu apa yang mereka bicarakan," kata Haposan, seperti yang tertulis dalam dokumen pemeriksaan.

Ini peluru pertama yang diarahkan ke Susno.



Desember 2008

Sjahril Djohan mendapat amanat penting dari Haposan. Dia diminta menyampaikan titipan untuk Susno. Ini bukan sembarang titipan, melainkan uang tunai Rp 500 juta. Dalam dokumen pemeriksaan tim independen, Sjahril mengaku fulus itu sebagai setoran atas bantuan sang jenderal dalam kasus hukum sengketa antarpemegang saham PT Salmah Arowana Lestari.

Dalam dokumen pemeriksaan itu, Sjahril mengaku menyerahkan uang pada 12 Desember 2008 sekitar pukul 19.00-20.00 di salah satu rumah Susno di Jalan Patimawati, Jakarta Selatan. "Uang yang diterima dari Haposan itu terbungkus kertas coklat tua," katanya.

Keterlibatan pengacara kelahiran Turutung, Sumatera Utara, 17 Januari 1959 ini pun kembali terkuak. Dalam kasus Salmah Arowana, Haposan bertindak sebagai pengacara Hoo Kian Huat, pengusaha asal Singapura, pemilik 80 persen saham Salmah Arowana. Dia berseteru dengan Anwar Salmah, pengusaha Riau, pemilik 20 persen saham.

Dalam keterangannya kepada penyidik, Sjahril mengaku sebelum datang menyerahkan uang, telah menghadap beberapa kali ke Susno. Ketika itu Susno baru dua-tiga bulan menjabat Kepala Badan Reserse. Kedekatan Sjahril dengan bekas Kepala Polda Jawa Barat yang mendorong Haposan meminta

bantuan.

Satu hari, menurut Sjahril, Susno pernah bertanya. "Ini kasus besar, Bang Masak kosong-kosong, Bang?" kata Sjahril, menirukan Susno.

Saat diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian pada 5 April lalu, Haposan membenarkan telah menitipkan uang tunai Rp 500 juta kepada Sjahril untuk Susno. Namun keperluannya bukan dalam kasus Salmah Arowana. "Dana itu sebagai kompensasi Gayus tidak ditahan, rumah miliknya di Kelapa Gading tidak disita, dan uang tunai milik Rp 500 juta di Bank Mandiri tidak disita," ujar dia.

Haposan, yang sekarang mendekam di sel Polres Jakarta Selatan, belum dapat dimintai konfirmasi. Jumat pekan lalu, dia kembali diperiksa oleh tim independen. Namun hingga larut malam tidak ada kabar tentang pemeriksaan



Gayus Tambunan

tersebut. Agus Suswono, kuasa hukum Haposan, menegaskan bahwa kliennya tetap berkukuh tidak pernah memberikan suap kepada polisi, jaksa, ataupun hakim. "Dia akan tetap berpendapat seperti itu," katanya kepada Oktamanjaya Wiguna dari *Tempo*, Jumat pekan lalu.

Kuasa hukum Sjahril, Hotma Sitompul, untuk kesekian kalinya menolak menanggapi materi pemeriksaan kliennya. Menurut dia, proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik tidak boleh diungkap ke publik.

Inilah peluru kedua yang diarahkan ke Susno.



22 April 2010

DIDAMPINGI tim kuasa hukumnya, Kamis malam itu Susno Duadji keluar dari gedung Bareskrim Polri. Ini adalah hari ketiga polisi memeriksa pria kelahiran Pagar Alam, Palembang, 56 tahun

lalu itu. Sekitar 136 pertanyaan diajukan penyidik tim independen di bawah pimpinan Inspektur Jenderal Mathius Salempang.

Berbeda dari biasanya, tak banyak pernyataan yang keluar dari Susno malam itu. Dia mengaku telah menjawab seluruh pertanyaan dengan kooperatif. "Tim penyidik telah bekerja dengan profesional. Saya bersedia dipanggil lagi," katanya.

Sumber *Tempo* yang dekat dengan tertinggi kepolisian mengatakan Susno dalam waktu dekat ini memang akan dipanggil lagi. "Tapi bukan menjadi saksi, melainkan sebagai tersangka," katanya.

Dia menjelaskan pengakuan tujuh orang tersangka kasus Gayus di hadapan penyidik menyudutkan Susno. Kesaksian mereka saling mengait. "Semua bermuara ke Susno," kata sumber itu. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Ito Sumardi mengatakan tim independen masih terus memeriksa dan mengumpulkan bukti. "Mereka masih bekerja. Tak bisa dihitung secara matematis," katanya kepada Sutji Decilya dari *Tempo*.

Henry Yosodiningrat, pengacara Susno, tidak menampik kemungkinan naik status kliennya menjadi tersangka. Namun dia sangat menyayangkan jika keterangan para saksi dijadikan dalil untuk menjerat Susno. "Terlalu berlebihan dan sangat terkesan hanya mencari kesalahan," ujarnya.

Henry mencontohkan pengakuan Sjahril yang menyebutkan telah mengantarkan uang Rp 500 juta ke kediaman Susno. Sjahril, seperti dituturkan Henry, saat itu bertemu dengan seorang perwira menengah polisi yang sedang berada di rumah Susno. Kepada perwira itu, Sjahril menunjukkan uang yang akan diberikan. "Ini tidak masuk akal. Masak, mau menyuap, uangnya ditunjukkan ke orang lain."

Pengakuan Sjahril yang lain, tentang adanya pesan dari Haposan untuk Susno. Ini juga, kata dia, harus dibuktikan tiga hal: apakah pesan itu sampai, tanggapan Susno saat itu, dan reaksi lanjutan setelah menerima pesan itu. "Ini harus dibuktikan."

Susno, menurut Henry, sudah mulai terganggu pemberitaan terakhir. Henry, yang mengaku melakukan komunikasi lewat telepon pada Kamis malam pekan lalu dengan Susno, yang tengah berada di Palembang, dititipi pesan penting yang harus disampaikan ke Mathius Salempang.

"Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atas dirinya, Susno akan buru-buru segera kembali pulang ke Jakarta," kata Henry. "Susno siap perang."

Setri Yasra

Kandas Skenario Negeri Singa

Di Singapura, disebut-sebut Susno berencana bertemu anggota Dewan dan Sjahril Djohan. Dikuntit intel kepolisian.

RENCANA kepergian Komisaris Jenderal Susno Duadji ke Singapura yang gagal masih menyisakan teka-teki. Peristiwa tiga pekan lalu itu kembali menjadi pembicaraan, setelah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Syarifuddin Sudding, mengatakan Susno hendak menemui pimpinan Komisi Hukum Dewan.

Syarifuddin, anggota dari Partai Hati Nurani Rakyat, mengaku memperoleh laporan intelijen. Ia melempar gosip panas ini dalam rapat kerja dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Bambang Hendarso Danuri, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senin pekan lalu.

Menurut dia, Susno ditunggu anggota Komisi Hukum di Singapura pada Senin tiga pekan lalu. Sesaat sebelum *boarding*, petugas dari Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian menangkapnya di depan toilet Pintu D-1, Terminal II, Bandar Udara Soekarno-Hatta. "Saya hanya meminta klarifikasi laporan intelijen, apakah sudah sampai ke telinga Bapak?" Syarifuddin bertanya.

Dalam rapat itu, Bambang Hendarso tak menjawab pertanyaan Syarifuddin dengan jelas. Ia mengatakan tak perlu menyampaikan informasi rencana kepergian Susno di Singapura itu. Ia hanya memastikan bahwa Susno dan Sjahril Djohan, tokoh yang dituding makelar kasus kelas kakap, berada dalam pengawasan tim independen Markas Besar Kepolisian. Susno dicegah ke Singapura untuk kepentingan penyidikan. "Kalau tidak, prosesnya akan berbeda," kata Bambang.

Seusai rapat, Syarifuddin menolak menyebutkan nama kolega yang dia maksud. Dia mengungkapkan anggota Komisi Hukum itu sudah berada di Singapura sehari sebelum Susno berencana berangkat. Sumber *Tempo* mengatakan tuduhan Syarifuddin mengarah ke Fachri Hamzah, wakil ketua komisi itu



Susno Duadji di Mabes Polri, Jakarta.

dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Pada Senin sore, 12 April lalu, setelah bertemu dengan Satuan Tugas Anti-Mafia Hukum di kompleks Istana Kepresidenan, Susno meluncur ke Hotel Sultan, kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Ia berganti mobil. Sekitar pukul empat, ia telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Masuk Terminal II Pintu D-1, ia menuju ruang tunggu.

Susno sedang menuju toilet di ruang tunggu ketika sejumlah polisi bertopi biru menghadangnya. Mereka petugas dari Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Kepolisian. Susno berucap kepada para petugas. "Kok, kamu di sini?" Pemimpin petugas itu menjawab, "Kok, Bapak juga di sini!"

Susno menimpali, "Saya sedang lihat-lihat bandara!" Polisi berseragam bertanya lagi, "Lihat-lihat bandara kok bawa *boarding pass*?" Mendapat jawaban itu, Susno menghardik polisi berseragam Propam tadi. "Eh, hati-

"Lihat-lihat bandara kok bawa *boarding pass*?" Mendapat jawaban itu, Susno menghardik polisi berseragam Propam tadi. "Eh, hati-hati ya! Saya bisa menghambat kenaikan pangkatmu!"

hati ya! Saya bisa menghambat kenaikan pangkatmu!"

Polisi tersebut menjelaskan mendapat tugas untuk menghadirkan Susno ke Markas Besar Kepolisian. Susno berusaha berkelit dan naik ke ruang tunggu. Semua toilet di ruang tunggu keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta berada satu lantai di bawah. Belum sempat Susno melangkah, tiga polisi menghadangnya.

Di Singapura, menurut sumber itu, Susno rencananya akan bertemu Fachri Hamzah dan Sjahril Djohan di sebuah hotel. Di situlah Sjahril menginap. Menurut informasi yang dilaporkan ke para petinggi kepolisian, Susno, Sjahril Djohan, dan Fachri akan menyatukan suara. Di antaranya, membuka "dosadosa" Bambang Hendarso.

Jika rencana mulus, menurut sumber itu, Susno akan membawa balik Sjahril Djohan. Pamor Susno pun semakin meningkat. Kepada Sjahril, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal itu berjanji akan berusaha menjadikannya "saksi mahkota". Sebagai peniup peluit yang membongkar kasus korupsi, tuduhan kepada Sjahril Djohan sebagai makelar kasus akan segera dihapus.

Kehadiran Fachri untuk memberikan dukungan secara politik. Jika berjalan, popularitas ketiganya bisa meningkat. "Ini bukan sekadar soal Gayus dan Hapusan," kata seorang sumber

Kartu As di Tangan Lung

Haposan Hutagalung menyimpan senjata buat menyerang Susno Duadji. Akan dibuka di pengadilan.

PIAGAM ucapan terima kasih dari Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dipajang di dinding ruang rapat. Tertera di sana tulisan "Terima kasih kepada Haposan Hutagalung, S.H., yang sudah mendukung Tim SBY-JK." Di bawahnya Yudhoyono dan Kalla membubuhkan tanda tangan dengan tinta hitam.

"Bang Haposan memang menyumbangkan pikiran dan materi buat kampanye SBY-JK," kata Agus Siswoyo, pengacara yang bekerja di firma hukum Haposan Hutagalung & Partners, gedung Patra Jasa, Jakarta Selatan, Jumat pekan lalu. Yudhoyono dan Kalla berpasangan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2004.

Dinding ruang rapat itu memang memamerkan luasnya pergaulan sang pengacara. Selain piagam dan foto, dipacak kliping berita yang dipigura. Ada satu yang istimewa, yakni tulisan profil Haposan di majalah *Polisi Metropolitan Jakarta* terbitan Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya, Oktober 2006.

Jumat pekan lalu, Agus memimpin rapat staf di ruang itu tanpa kehadiran Haposan. Pemilik firma itu ditahan di Kepolisian Resor Jakarta Selatan sejak bulan lalu. Pria kelahiran Tarutung, Sumatera Utara, ini ditetapkan menjadi tersangka rekayasa kasus dan pencucian uang yang melibatkan Gayus Halo-moan Tambunan, pegawai golongan IIIa Direktorat Pajak.

Haposan adalah penasihat hukum Gayus, yang tahun lalu ditetapkan menjadi tersangka kasus pencucian uang. Dengan dakwaan yang lemah, pemilik rekening berisi Rp 28 miliar itu bebas di pengadilan. Belakangan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI Komisaris Jenderal Susno Duadji membongkar praktek ilegal yang membebaskan Gayus. Haposan dituduh mengatur uang suap ke para penyidik, jaksa, hingga hakim.

Agus, juga anggota tim penasihat hukum Haposan, menuturkan pemeriksaan bos—sekaligus kliennya—sudah masuk tahap konfrontasi dengan tersangka lainnya. Dalam pemeriksaan, menurut dia, Haposan berkukuh tak mengutar suap kepada para penegak hukum. "Dia tetap menyatakan tidak memberikan suap, baik kepada polisi, jaksa, maupun hakim."



Haposan Hutagalung

Haposan cuek, meski dijepit keterangan tersangka lain yang menyebutnya sebagai pembuka keran aliran uang, termasuk waktu penyerahannya. "Haposan minta uang kepada Gayus dan memberikan kepada orang-orang yang katanya bisa membantu," kata pengacara Gayus, Pia Nasution.

Haposan seperti menganggap sepi tudingan itu. Menurut Agus, keterangan para tersangka lain tidak kuat. Ia mengatakan berita acara pemeriksaan cuma bisa jadi alat bukti kalau diakui para tersangka di persidangan. "Bukti yang sebenarnya nanti muncul di pengadilan," ujarnya.

Terlihat percaya diri, Haposan kabarnya menyimpan bukti penting yang akan dibuka di pengadilan. "Dia pegang kartu Susno," kata seorang sumber.

BUKTI penting itu berkaitan dengan kasus Antaboga Deltasekuritas, produk nonperbankan dari Bank Century. Patgulipat dari pemilik lama bank itu membuat nasabah Antaboga kehilangan ratusan miliar rupiah. Anehnya, para penggansir duit justru dihukum ringan di pengadilan.

Ringannya hukuman itu dikeluhkan Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Ito Sumardi dalam diskusi "Quo Vadis Penegakan Kasus Century dan Antaboga", Februari lalu. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Fuad Rahmany



PT ANTABOGA DELTASEKURITAS INDONESIA

TEMPO/POSA PERINTASAN

pun berpendapat sama. Keduanya menunjuk hukuman sepuluh bulan bagi Presiden Direktur PT Signature Capital, Tariq Khan, yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Rupanya, vonis ringan itu digarap sejak jauh hari di Badan Reserse. Adalah pengacara Tariq Khan, Haposan Hutagalung, yang mengurusnya. Menurut sumber *Tempo*, Haposan minta bantuan Susno Duadji, Kepala Badan Reserse kala itu, agar jeratan bagi Tariq tak kelewat mencekik.

Sidang kasus Tariq sudah digelar tujuh kali ketika Haposan mengantar imbalan. Diantar ke ruang kerja jenderal bintang tiga itu, kata seorang penyidik, Haposan menenteng tas berisi US\$ 500 ribu atau sekitar Rp 5 miliar. Susno membantah cerita ini. "Saya baru tahu dari Anda," katanya.

Haposan sudah bersiap jika Susno berkelit. "Haposan diam-diam merekam penyerahan uang itu," ujar seorang sumber. Rekaman video itulah yang akan menjadi kartu As bagi Haposan buat menekan balik Susno.

Haposan, yang dipanggil "Lung" oleh Sjahril Djohan, tersangka lain kasus ini, juga menyiapkan saksi mata penyerahan uang. Merekalah dua orang yang mengantarnya ke kantor Susno, hari itu. Satu di antaranya bernama Yuli Abner Lubis, yang kerap ikut mengurus kasus klien Haposan.

Kepada *Tempo*, Yuli mengaku sudah 12 tahun mengenal Haposan. Ia juga menyatakan sering membantu Haposan mengawal klien atau menjaga tanah sengketa. Namun ia membantah menge-

tahui penyerahan uang dari Haposan kepada Susno. "Aku tidak pernah ikut-ikutan menemui 'baju cokelat'. Kelasku tidak setinggi itu," ujarnya.

Tempo mencoba meminta konfirmasi kepada Haposan. Tapi, ketika disambangi di tahanan Kepolisian Resor Jakarta Selatan, Jumat pekan lalu, selnya kosong. Seorang petugas jaga memberi tahu, hari itu Haposan diboyong ke Markas Besar Kepolisian. "Dia sedang diperiksa," katanya.

Agus Siswoyo pun menggeleng ketika ditanya soal rekaman tersebut. Ia mengaku tak diberi tahu Haposan.

TIM independen Markas Besar Kepolisian memisahkan tempat penahanan delapan tersangka rekayasa kasus Gayus ini. Beberapa tersangka seperti Sjahril Djohan dan Andi Kosasih ditahan di Markas Besar Kepolisian. Haposan dijauhkan di ruang tahanan Kepolisian Resor Jakarta Selatan.

Agus Siswoyo mengatakan, akses ke tahanan Haposan dibatasi. "Harus izin dulu ke Markas Besar Polri," ujarnya.

Sepanjang pekan lalu tim penasihat hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia juga kocar-kacir karena tengah menghadiri kongres asosiasi pengacara tersebut. Jumat pekan lalu, ketika ditanya soal pemeriksaan Haposan, Agus pun kerepotan mencari keterangan karena telepon seluler para mitranya itu mati.

Setelah menelepon berkali-kali, akhirnya ia terhubung dengan Apolos Djara Bonga. Agus mendengarkan penjelasan Apolos sambil manggut-mang-

gut. "Bang Haposan sedang dibuatkan berita acara pemeriksaan tambahan," ujarnya.

Seorang sumber di penegak hukum menceritakan Haposan sama sekali tak tertekan dengan kondisi tersebut. Dalam pemeriksaan maraton pun ia kelihatan tenang, malah berani menggelar aksi tutup mulut. "Skenarionya memang menembakkan semuanya kembali ke Susno," ujar sumber tersebut.

Tak mengherankan kalau dalam soal Susno, Haposan bernyanyi nyaring. Kepada penyidik dia menjelaskan, kasus Gayus dipantau langsung oleh Susno lewat penyidiknya, Komisaris Arafat. Ia mengaku pernah ditunjukkan Arafat memo dari Susno bertulisan: "Kompol Arafat, Tangani, Lapor".

Haposan juga membeberkan soal pemberian uang Rp 500 juta kepada Susno lewat Sjahril Djohan. Namun Agus berkeras tak ada keterangan seperti itu. "Sampai dengan hari ini Haposan membantah semua itu," ujarnya.

Tim independen yang sudah mendingar informasi tentang rekaman penyerahan uang kepada Susno pun menekan Haposan. Tapi sang tersangka bungkam. "Kalau dibuka sekarang bahaya karena dia bisa kena pasal penyusapan," kata seorang sumber yang mengenal baik Haposan.

Rencananya, rekaman akan dibebaskan di pengadilan. Selain melepas kemungkinan jadi tersangka penyusapan, Haposan berharap informasi itu justru jadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukumannya.

Oktamandjaya Wiguna, Setri Yasa

Andi Kosasih:

Saya Hanya Menolong Teman

PENDIDIKAN formal Andi Kosasih hanya sampai kelas III Sekolah Dasar Negeri Selat Panjang, Kepulauan Riau. Tapi keputusannya pindah ke Tanjung Balai Karimun pada 1975 membuka jalan baginya menjadi pengusaha bidang properti dan perkapalan.

Tiga puluh lima tahun setelah kepindahannya, Andi Kosasih kini menjadi populer setelah terungkapnya makelar kasus di Markas Besar Kepolisian RI. Dia diduga menjadi bagian komplotan makelar yang membebaskan Gayus Halomoan Tambunan, pegawai Direktorat Jenderal Pajak, pemilik rekening berisi Rp 28 miliar.

Ditahan di ruang tahanan Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian sejak akhir Maret lalu, Andi Kosasih bersedia menjawab pertanyaan Setri Yasra dari *Tempo* pekan lalu.

Anda dinilai memiliki peran besar dalam rekayasa membebaskan Gayus Tambunan?

Tidak benar saya ikut mengatur kasus ini. Saya hanya memenuhi permintaan Haposan Hutagalung agar mau membantu kliennya. Saat itu saya juga tidak tahu Gayus Halomoan Tambunan itu siapa. Saya dijebak. Saya tidak tahu.

Apa permintaan Haposan?

Saya diminta mengaku sebagai pemilik uang Rp 28 miliar yang sedang diblokir polisi. Saya tidak minta imbalan apa pun. Ada bukti soal itu berupa surat perjanjian antara saya dan Gayus, yang isinya saya tidak mendapat atau tidak minta imbalan apa pun darinya.

Ini janggal. Anda membantu orang dalam hukum yang memiliki potensi bermasalah di kemudian hari?

Ada perjanjian soal itu. Kalau timbul masalah terhadap saya di kemudian hari, mereka yang akan urus perkara ini.

Jadi apa alasan Anda?

Ini semata hanya ingin menolong teman.

Sejak kapan Anda kenal Haposan?

Saya kenal saat dia menangani kasus hukum antarpemegang saham PT Salmah Arowana Lestari.

Dalam pemeriksaan di hadapan penyidik tim independen Mabes Polri, Anda mengaku pernah diterima di ruang kerja Susno Duadji. Ada pembicaraan soal pemberian uang saat itu?



Saya tidak mau bicara soal itu. Seluruh keterangan sudah saya serahkan ke penyidik. Silakan tanya ke penyidik. Saya tidak mau membawa pejabat-pejabat itu.

Apa benar Anda menawarkan uang agar blokir rekening itu dibuka?

Sekali lagi, saya tidak mau menjawab itu. Tanya saja ke Susno atau Haposan.

Kepada penyidik, Anda juga mengaku diminta Haposan menawarkan uang masing-masing Rp 1 miliar ke Brigadir Jenderal Edmon Ilyas dan tim penyidik agar membantu pencairan dana Gayus?

Sudahlah. Semua keterangan sudah saya sampaikan ke penyidik. Saya tidak mau menyeret pejabat-pejabat itu.

Anda mengaku hanya membantu, tapi mengapa ada aliran dana Rp 1,95 miliar dari Gayus ke rekening Anda?

Saya dan Gayus ada proyek kerja sama pembelian lahan untuk pengambilan pasir. Ada perjanjiannya. Dalam proyek itu, Gayus mendapat Rp 5.000 per kubik.

Bukankah perjanjian kerja sama ini bagian dari rekayasa?

Ada bukti perjanjiannya. Saya siap tunjukkan (di pengadilan). Selain itu, saya tidak secara gratis mendapat dana tersebut. Saya memberikan jaminan

sertifikat tanah seluas 5.000 meter persegi kepada Gayus.

Dalam dokumen pemeriksaan, Sjahri Djohan menyebut Anda sebagai salah satu Direktur PT Fankhaus Far East, perusahaan milik Sjahri?

Itu sama sekali tidak benar. Saya tidak pernah menjadi direktur di perusahaan itu. Saya ini punya perusahaan sendiri.

Apa benar setelah kasus ini meledak, anak Anda bertemu dengan Gayus di Singapura?

Tidak benar. Itu bohong. Anak saya tidak pernah bertemu dengan Gayus di Singapura. Akan saya somasi orang yang bilang itu.

Anda merasa dijebak?

Saya minta Gayus mengaku saja apa adanya. Haposan juga harus mengaku apa adanya. Mereka harus jadi gentleman. Saya tidak mau bertanggung jawab atas masalah ini hingga di akhir.

Saya ini pengusaha yang memiliki aset jauh di atas dana milik Gayus (Rp 28 miliar). Saya punya banyak proyek properti di Jakarta yang nilainya jauh lebih besar dibanding uang Gayus itu. Tapi, gara-gara ingin menolong teman, saya terseret dalam masalah besar ini.

Itu Hanya Isapan Jempol

SETELAH diperiksa Tim Independen Kepolisian RI tiga hari berturut-turut, dua pekan lalu Susno Duadji seperti ditelan Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian ini tak pernah lagi muncul di depan publik. "Saya tidak ingin mengganggu proses pemeriksaan," katanya kepada Setri Yastira dari Jempol melalui telepon, Rabu pekan lalu.

Susno mengatakan sepanjang pekan ini berada di Palembang. Ia pun kemudian hanya bersedia menjawab pertanyaan melalui surat elektronik, sebagian besar dengan jawaban-jawaban pendek.

Setelah diperiksa Tim Independen Markas Besar Kepolisian, Anda terkesan menghindari dari publik?

Saya tidak berubah. Masih Susno Duadji yang dulu. Kalaupun terkesan demikian, itu karena pertanyaan rekan-rekan wartawan banyak yang berkaitan dengan materi pemeriksaan. Sebaiknya Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian, saya lebih betul, kalau materi pemeriksaan lebih dibocorkan, itu merupakan pelanggaran. Dampaknya akan sangat merugikan pemeriksaan atau penyidik. **Benarkah Anda mulai melunak setelah kekati bekas Kepala Polri Sutanto?** Tidak. Saya tidak pernah mendengar hal



11/05/2007

itu.

Apakah dalam pemeriksaan Anda dikonfirmasi dengan para tersangka kasus Gayus Halomoan P. Tambunan?

Tidak.

Tersangka Andi Kosasih kepada penyidik mengaku pernah bertemu dengan

Anda di ruang kerja Anda untuk membahas pemblokiran rekening Rp 28 miliar milik Gayus. Benarkah?

Dari mana Anda tahu? Tim penyidik tidak pernah menyatakannya hal itu.

Tersangka Sjahrh Djohan dalam dokumen pemeriksaan yang juga beredar menyatakan pernah mengantarkan dana Rp 500 juta ke rumah Anda terkait sengketa hukum antarpemegang saham PT Salmah Arowana Lestari....

Dari mana Anda tahu? Tim penyidik tidak pernah menyatakannya itu.

Benarkah Anda pernah sangat dekat dengan Haposan Hutagalung, terutama dalam penyelesaian kasus hukum Salmah Arowana Lestari?

Sumber informasi itu tidak jelas dan tidak benar. Buat apa saya menanggapi? Kasihan rakyat jadi semakin bingung.

Haposan Hutagalung saat menjadi kuasa hukum Tarq Khan, pemilik PT Siga-ture Capital yang terkena kasus Antaboga Delta Sekuritas, disebut-sebut memiliki rekaman ketika menyerahkan US\$ 500 ribu kepada Anda?

Saya baru tahu dari Anda.

Ada anggapan semua aktivitas Anda terakhir ini sebagai upaya melawan penyidik Polri?

Tidak benar itu. Tidak ada perang bintang di markas polisi.

Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Syarifuddin Sudding, menyatakan rencana kepergian Anda ke Singapura beberapa waktu lalu untuk bertemu dengan Sjahrh Djohan dan sejumlah anggota Komisi Hukum DPR?

Tidak. Keterangan anggota Komisi Hukum DPR tersebut sudah terbukti hanya isapan jempol belaka. ■



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diwawancarai wartawan di Istana Negara, Jakarta. Merestui kepindahan Sri Mulyani ke Bank Dunia.

Menurut Randy, Februari lalu, Bank Dunia membentuk panel khusus beranggotakan sembilan pejabat senior. Panel ini bekerja sama dengan lembaga internasional yang khusus mencari para eksekutif. Mereka mensurvei dan mengumpulkan kandidat dari seluruh kawasan untuk menjadi pemimpin Bank Dunia. "Sri Mulyani masuk urutan teratas," ujarnya.

Lantas Zoellick menawarkan posisi direktur pelaksana kepada Sri Mulyani saat keduanya bertemu di forum *spring meeting* tahunan Bank Dunia di Washington, pada 24 April lalu. Gayung bersambut. Mantan Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) itu bersedia. Tapi dia meminta Zoellick berbicara langsung kepada Yudhoyono. Pria Jerman ini pun menyurati Yudhoyono pada 25 April. "Lalu mereka bertelepon-teleponan, di situ Zoellick meminta izin Yudhoyono menarik Sri Mulyani."

Sri Mulyani enggan berkomentar soal mundurnya dari kabinet. Dia juga tak bersedia membeberkan soal kapan sesungguhnya Bank Dunia memintanya pertama kali. "Silakan kutip dari narasumber *Tempo* saja," ujarnya di Jakarta pekan lalu. Tapi Ani—begitu ia kerap disapa—mengakui telah bertemu dengan Zoellick di Washington. "Itu betul."

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Taufiq Kiemas senang dengan keberhasilan Sri Mulyani. Mantan Menteri Koordinator Perekonomian ini, kata dia, akan membuat Indonesia semakin terkenal lantaran Bank Dunia lembaga prestisius. "Saya ikut bangga."

SEJATINYA, rencana mundur sebagai Menteri Keuangan merupakan yang kedua kalinya dilakukan Sri Mulyani. Dua tahun lalu, saat di Kabinet Indonesia Bersatu I, doktor ekonomi dari University of Illinois, Amerika Serikat, ini pernah mengancam mundur. Gara-garanya, Sri berbeda pendapat dengan anggota kabinet lainnya atas status perdagangan saham Bumi Resources milik Grup Bakrie.

Sri Mulyani kecewa ada intervensi pemerintah kepada Bursa Efek Indonesia yang sedianya akan memperdagangkan kembali saham Bumi. Kolega Sri di kabinet meminta otoritas bursa tetap menghentikan perdagangan saham perusahaan pertambangan itu. Alasannya, Grup Bakrie yang sedang terikat perjanjian dengan kreditor akan merugi besar jika saham kembali diperdagangkan. Namun Presiden Yudhoyono menolak keinginan Sri Mulyani. Mundur pun batal.

Kebijakan Menteri Keuangan terbaik Asia versi majalah *Euromoney* dan *Emerging Market* ini sering bertolak belakang dengan keinginan Partai Golkar. Misalnya, penolakan Sri membantu masalah saham Bumi Resources; masalah dana talangan semburan lumpur di ladang gas milik PT Lapindo Inc., perusahaan milik keluarga Aburizal Bakrie; dan kasus pajak perusahaan Grup Bakrie. Sri Mulyani pernah membeberkan perseteruannya dengan Aburizal di *Asian Wall Street Journal* akhir tahun lalu.

Hubungan dengan PDIP juga panas-dingin. Menurut pejabat ini, Partai Banteng Moncong Putih kurang sreg

lantaran Sri Mulyani menyudutkan mantan Direktur Jenderal Pajak Hasto Purnomo, yang kini Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. Tak terkecuali dengan Partai Keadilan Sejahtera. Sri Mulyani juga pernah bergesekan lantaran menolak keinginan partai ini agar Bea dan Cukai membangun tempat penyimpanan sementara barang impor di Marunda, Jakarta Utara. Menurut politikus Golkar, Harry Azhar Azis, "Komunikasi politik Sri Mulyani kurang baik."

Perseteruan Sri Mulyani dengan anggota Dewan semakin terbuka saat proses hak angket Century. Para inisiator hak angket Century pernah meminta Presiden Yudhoyono menonaktifkan Sri Mulyani, juga Wakil Presiden Boediono, pada November tahun lalu. Tapi Presiden yang ketika itu sedang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmark, mengabaikan desakan ini.

Ambisi sejumlah anggota Dewan menggedor Sri Mulyani semakin tinggi ketika Sidang Paripurna DPR awal Maret lalu memutuskan penyelamatan Century melanggar aturan dan diduga terindikasi korupsi. Sri Mulyani dan juga mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono dianggap bersalah. Lagi-lagi mereka meminta Presiden Yudhoyono memberhentikan sementara Menteri Keuangan. Presiden bergeming dan tetap menolak rekomendasi tersebut.

Serangan terhadap Sri Mulyani semakin menjadi-jadi. Politikus PDIP, Partai Hanura, dan beberapa anggota Partai Golkar memboikot Sri Mulyani saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2009. Pembahasan bujet negara memang sudah disetujui, tapi sempat tersendat-sendat lantaran aksi *walkout* sejumlah anggota Dewan.

Cobaan datang lagi. Bekas Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Kobrin misaris Jenderal Susno Duadjri membongkar mafia pajak Gayus Tambunan dan Bahasyim Syafii, dua pegawai yang berasal dari kantor Kementerian Keuangan, yang melibatkan aparat pajak serta pejabat tinggi kepolisian dan jaksa. Kasus mafia pajak Gayus dan Bahasyim memukul Sri Mulyani yang dinilai gagal membersihkan kantor pajak. "Peristiwa ini secara tak langsung mencoreng Bu Menteri," kata seorang anggota staf khusus Presiden.

Sri semakin terpojok oleh kasus gelap pajak Paulus Tumewu. Anggota

menuding Sri bermain dalam kasus pribadi Komisaris PT Ramaya-Sentosa Tbk. ini. Menteri Keuangan memang mengusulkan kepada Presiden Agung agar kasus Paulus tak ke pengadilan dengan alasan sudah bayar ganti rugi empat kali lebih dengan ketentuan.

Di *Tempo*, Sri Mulyani menganggarkan langkah politik para Dewan. Tapi dia juga tetap melaku anggota parlemen sudah menyentuh urusan pribadi. Saya prihatin," ujarnya (lihat Percaya Garis Tangan).

tekanan hebat politikus dan mitra koalisi pemerintahan Yudhoyono, Sri Mulyani akhirnya memilih sebagai Menteri Keuangan. Presiden rela melepasnya ke Bank Dunia dalam tempo enam hari setelah surat resmi Zoellick.

sebelum *Tempo*, tanda-tanda akan melepas Sri Mulyani sudah saat pemerintah menggelar di Tampaksiring, Bali, pada April lalu. Presiden tampaknya bisa lagi menahan gemuruh dan mitra koalisi kepada Sri

Mulyani. "Tak ada jaminan setelah kasus Century, Gayus, dan Paulus selesai, tak ada lagi serangan ke Sri Mulyani," ujarnya. Walhasil, Sri Mulyani pun dilepas.

Upaya mencari jalan keluar buat Sri Mulyani juga dilakukan Yudhoyono dengan Ketua Partai Golkar Aburizal "Teal" Bakrie. Keduanya bertemu sedikitnya dua kali pascalamaran Bank Dunia, di antaranya di rumah pribadi Yudhoyono di Puri Cikeas Indah, Bogor. "Hubungan di koalisi akan lebih baik," bisik sumber *Tempo* mengutip Aburizal. Benar: akhirnya Yudhoyono, sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, sesuai rapat di Cikeas, Kamis malam pekan lalu, mengangkat Teal sebagai Ketua Harian Sekretaris Bersama Koalisi partai propemerintah.

Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menilai mundurnya Sri Mulyani bagian dari kompromi politik untuk menyelamatkan semua muka. "Ini bagian dari kemenangan Golkar," katanya dalam diskusi di Gedung DPR, Kamis pekan lalu. Muzani semakin curiga lantaran Golkar juga mulai joyo terhadap kasus Century. "Ada apa ini?"

Aburizal yang ditemui *Tempo* di sela-sela rapat kerja daerah Partai Golkar di Semarang, pekan lalu, mengatakan mundurnya Sri Mulyani tidak ada hubungannya dengan Partai Golkar. Aburizal mengaku bertemu dengan Yudhoyono hanya untuk mengurus koalisi. "Saya menjelaskan kebijakan, bukan menyangkut orang per orang," katanya. Dia memastikan tidak ada "main mata" dengan Yudhoyono soal Sri Mulyani. "Saya tidak pernah berani melakukan deal dengan SBY karena ada 60 persen lebih rakyat yang memilihnya," katanya.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Dodi Ambaridi, mengatakan, dalam konteks koalisi, Yudhoyono memang sulit mempertahankan lagi Sri Mulyani. Dalam realitasnya, wanita yang masuk daftar 100 wanita berpengaruh di dunia versi majalah *Forbes* itu dianggap sebagai batu sandungan bagi keutuhan koalisi. "Tekanan dari Golkar kepada Yudhoyono dan Boediono akan berkurang pasca-mundurnya Sri Mulyani," ujarnya.

Padga Iwana, Yantha Arhan, Agoeng Wijaya, Fey Firmansyah, Tito Siangar, Rofidadi (Semarang)

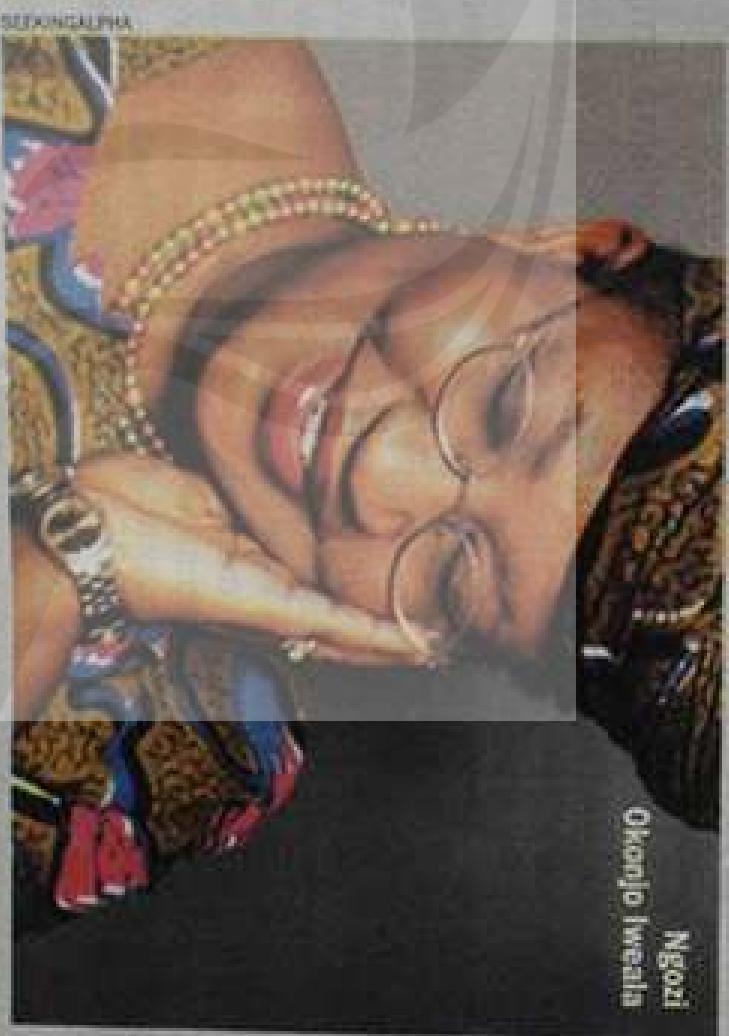
Isah Dua Menteri Keuangan

DA sedikit kesamaan antara Sri Mulyani dan Ngozi Okonjo Iweala, Direktur Pelaksana Bank Dunia periode 2007. Keduanya sama-sama wanita dan pernah menjabat Menteri Keuangan. Okonjo Iweala adalah mantan Menteri Keuangan Nigeria. Bedanya, Okonjo Iweala pernah menjadi Menteri Negeri Nigeria.

Okonjo Iweala dikenal sebagai tokoh perempuan anti korupsi dan berhasil menghapus utang Nigeria melalui *Paris Club* US\$ 16 miliar. Sebagai seorang mantan anggota staf Perserikatan Bangsa-Bangsa, dia diprotes oleh beberapa negara-gara masalah gaji. Sebelumnya, PBB menggajinya US\$ 250 ribu (sekitar Rp 2,5 miliar) per tahun. Lantaran ada tekanan dalam negeri, dia harus menerima gaji US\$ 6.000 (sekitar Rp 60 juta) per tahun, sehingga menteri di Nigeria.

Hal mudah bagi Okonjo Iweala memerangi korupsi di Nigeria. Banyak koruptor khawatir pada gerakan bersih-bersih ini. Belakangan Bank Dunia mendapatuknya menjadi Direktur Pelaksana pada 2007.

Di Indonesia, Sri Mulyani dianggap Menteri Keuangan dan lurus memerangi korupsi. Wanita kelahiran Lamongan 47 tahun silam ini memelopori reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Dia berusaha membersihkan Korat Jenderal Pajak serta Bea dan Cukai, dua lembaga kerap disebut sarang penyamun. Sudah ratusan korupsi-batal pejak dan bea-cukai dipecatnya lantaran korupsi. Inisiasi Sri Mulyani juga diakui dunia. Bekas orang



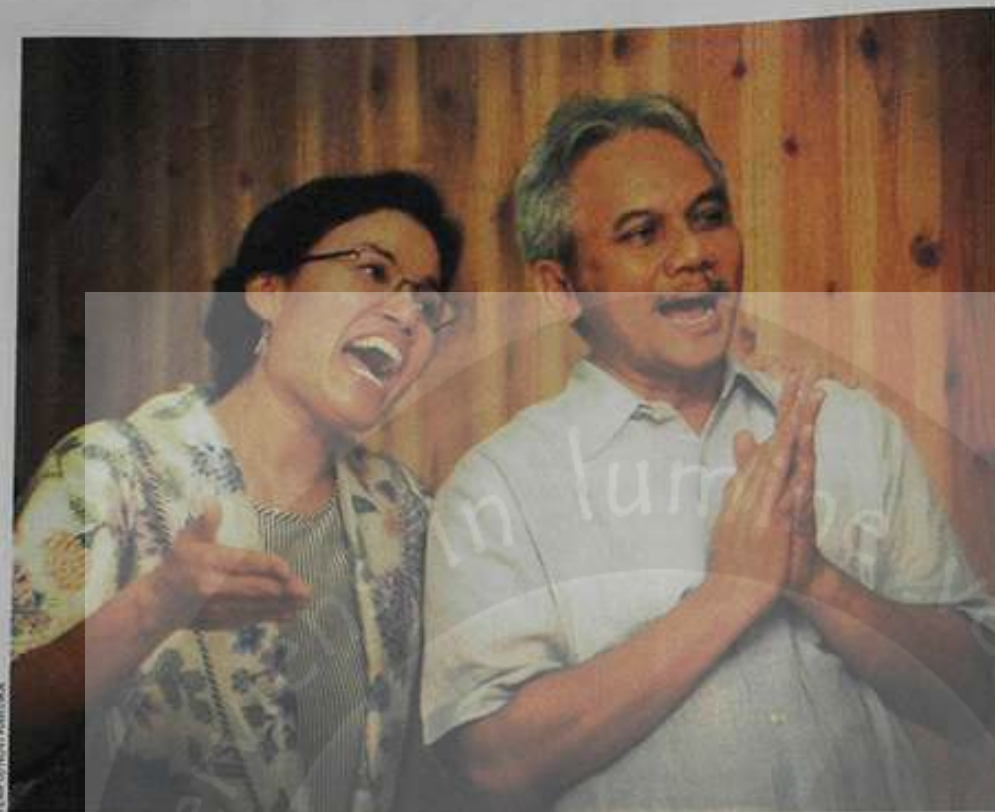
Ngozi
Okonjo Iweala

penting di Dana Moneter Internasional ini juga terpilih sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia versi majalah *Emerging Markets*. Majalah *Forbes* memasukkannya dalam 100 wanita berpengaruh di dunia.

Sayang, dia tersandung kasus *baiflow* Bank Century. Dewan Perwakilan Rakyat menilai bersalah lantaran menyalamatkan bank milik Robert Tantular itu. Kasus ini membuat Sri Mulyani dua kali dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Benarkah pengangkatannya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia untuk menyelamatkan tokoh yang dikenal punya integritas tinggi ini? Juru bicara Bank Dunia di Jakarta, Randy Salim, hanya mengangkat bahu ketika dimintai konfirmasi. "Mungkin kebijakan dewan direksi Bank Dunia begitu," ujarnya pekan lalu.

PI



TEMPO/NOVI KARIKA

Senyum di Sela Gundah

Sri Mulyani akan meninggalkan Indonesia selama empat tahun. Gundah memikirkan putra-putrinya.

LEWAT sambungan telepon jarak jauh, pekan lalu, Dewinta Illinia memprotes ibunya. "Ini tidak fair!" kata Dewinta, yang kini belajar hukum perdagangan di The University of New South Wales, Australia. Ibunya mengabarkan dari Jakarta akan mengemban tugas baru yang mengharuskan pindah ke Washington, DC, Amerika Serikat.

Pada percakapan lintas negara itu, Dewinta, 20 tahun, mengingatkan janji ibunya sekitar empat tahun lalu. Ketika itu ibunya, yang menjabat Menteri Keuangan Republik Indonesia, mengizinkan Dewinta kuliah di luar negeri setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 8, Jakarta, dengan syarat paling jauh sampai Australia, agar mudah bertemu jika sedang kangen.

Sebagai pejabat negara, ibunya juga akan mudah meminta izin Presiden terbang selama tujuh jam ke Australia jika Dewinta sakit dan perlu ditengok. "Kok, sekarang malah Mama yang pindah jauh?" sang anak bertanya kepada ibunya, Sri Mulyani Indrawati. Mulai 1 Juni 2010, Sri akan menempati satu dari tiga kursi jabatan Direktur Pelaksana Bank Dunia hingga 2014. Selama itu

pula dia akan meninggalkan Jakarta dan bermukim di ibu kota Amerika Serikat, markas Bank Dunia.

Dewinta adalah anak sulung pasangan Sri Mulyani-Tonny Sumartono. Dua adiknya adalah Adwin Haryo Indrawan, 17 tahun, baru saja lulus dari SMA Islam Al-Azhar 1, Kebayoran Baru, Jakarta; dan Luqman Indra Pambudi, 13 tahun, kini kelas II Sekolah Menengah Pertama Lab School Jakarta. Ketiga anaknya itulah yang menyebabkan hati Sri gundah akhir-akhir ini.

Adwin sebenarnya sudah diterima di Universitas Gadjah Mada lewat jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan. Jauh-jauh hari, Adwin sudah bilang kepada ibunya betapa hidupnya akan berubah, menjadi mandiri, tinggal di kos-kosan kota pelajar itu. "Lucu juga, keren katanya. Maklum, *sweet seven-*

Sejak dulu Sri dikenal tak bisa jauh dari keluarga. Ia bahkan sering pulang sekadar melihat putra-putrinya.

Sri Mulyani bersama suami saat perayaan ulang tahunnya di Jakarta.

teen," ujar Sri sambil tertawa.

Sri senang akan niat putranya terus terang saja, ia lebih senang sang putra tak begitu jauh dari rumah rena itu, hatinya bersorak ketika putra-putrinya tercantum di antara nama-nama yang lulus seleksi masuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada akhir pekan lalu. Dan hati Adwin sudah, ia tak akan menyia-nyiakannya semestian ini.

Tapi, kini Sri pun bingung. Selama mana pun Adwin, selama masih di Indonesia, tetap saja akan jauh dari Washington. "Itu akan jadi pilihan yang dilematis," katanya. "Tapi saya akan serah keputusan mereka."

Sejak dulu Sri dikenal tak bisa jauh dari keluarga. Ia bahkan sering pulang sekadar melihat putra-putrinya. Adwin belum mengikuti jadwal di luar kamar, perti mengikuti rapat di Gedung Cintaanya terhadap keluarga sudah ditanam dari orang tuanya, Profesor Doko moko (almarhum) dan Profesor Doko no Sriningsih (almarhumah).

Sri anak ketujuh dari sepuluh bersaudara. Dari orang tua yang berasal dari belakang akademis itu pula Sri belajar mendidik anak-anaknya dengan disiplin. "Dia sangat berdisiplin, kerangka pikirnya jelas," kata Wimar Witoelar. Dia memang tidak suka pada orang yang mau berupaya menjadi pintar.

Sofyan Djalil, kolega Sri di Kementerian Indonesia Bersatu I, menceritakan bahwa pada suatu hari Sri mengizinkan Dewinta ketika hendak menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Kepada Dewinta itu — yang tak lain adalah Dewinta — menitipkan tabungannya selama ia menjabat Executive Director International Monetary Fund pada 2002-2004.

"Kamu harus hidup dengan disiplin, enggak punya uang sekarang, bisa nganggur dulu," kata Sofyan menidurkan rita Sri. Menurut Sofyan, gaji Dewinta tak lebih dari Rp 19 juta. Padahal, kata Sofyan, Sri tak mau anaknya foya-foya di negeri orang dan mungkin cepat pulang ke Indonesia.

Mungkin akibat didikan disiplin pula, putra bungsu, Luqman, sudah mengerti arti tanggung jawab ketika ibunya mengabarkan rencana pindah ke Amerika Serikat, pengumuman organisasi Siswa Intra Sekolah Sekolah Jakarta itu mengajukan persyaratan. "Boleh pindah, asal mau ikut masa kepengurusan OSIS sampai akhir," kata Luqman. Yakin akan tak bermaksud menyindir, Sri tersenyum.

Mencari Dirigen Lapangan Banteng

Beberapa kandidat Menteri Keuangan ramai dibicarakan. Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Dirjen Anggaran Anny Ratnawati, dan Penjabat Gubernur BI Darmin Nasution masuk bursa.

SYARAT yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu langsung memercikkan spekulasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Setelah Presiden menyatakan Menteri Keuangan berikutnya harus memiliki pengetahuan mumpuni di bidang ekonomi makro dan aktif di forum G-20, nama Armida Alisjahbana mendadak ramai dibicarakan. "Dua kata kunci itu mengarah ke Ibu Armida," kata seorang pejabat Bappenas, Kamis pekan lalu.

Sinyal itu diberikan Presiden setelah kabar mundurnya Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan mencaut ke publik, Rabu pekan lalu. Siang harinya, kabar itu dibenarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam sebuah konferensi pers di Istana Negara, Yudhoyono menegaskan bahwa calon pengganti Sri Mulyani adalah figur yang memahami kebijakan fiskal dan makroekonomi. Menteri baru, kata Presiden, juga harus melanjutkan reformasi perpajakan dan bea-cukai serta bisa mewakili peran Indonesia di forum G-20.

Armida memang kenyang pengalaman. Sebelum menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, ia acap menjadi konsultan Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan Australian Agency for International Development. Dalam pertemuan tahunan ke-43 Dewan Gubernur Bank Pembangunan Asia di Tashkent, Uzbekistan, Selasa pekan lalu, ia juga mendorong Bank Pembangunan Asia berpartisipasi aktif dalam forum G-20, khususnya dalam "proyek" Global Financial Safety Net.

Sosok Armida, kata sumber *Tempo* yang dekat dengan lingkaran Presiden, pas dengan skenario yang akan diambil Yudhoyono. Menurut dia, setelah bertahun-tahun tensi hubungan antara Sri Mulyani dan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie memanas, Presiden tidak akan mengambil calon menteri yang dikenal dekat dengan lingkaran Sri Mulyani ataupun yang disodorkan Ical—panggilan Aburizal. "Akan dicari jalan tengah yang lebih adil," katanya. Pre-

siden juga tengah mempertimbangkan kembali kemungkinan sosok perempuan sebagai pengganti Sri Mulyani.

Kepulangan Armida dari Tashkent—lebih cepat dari jadwal semula—memperkuat spekulasi itu. Armida, yang melakukan kunjungankerjake Uzbekistan, sejatinya baru pulang pekan ini. Tapi, pada Jumat siang pekan lalu, Armida tiba di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng, kemudian menghadiri rapat di Kementerian Keuangan dengan Sri Mulyani. Ia mengelak ketika ditanya ihwal bursa Menteri Keuangan



TEMPO ONLINE/DESIKUN



TEMPO/NOVIA RITRA



TEMPO/REDAKSI

yang baru. "Wah, enggak tahu, saya belum dihubungi Presiden," kata doktor ekonomi lulusan University of Washington, Seattle, Amerika Serikat, ini.

Meski santer digadang-gadang, Armida bukan tanpa catatan. Untuk menjadi Menteri Keuangan, dibutuhkan sosok yang tangguh dengan determinasi tinggi. "Armida belum terbukti dalam hal ini," kata sumber di lingkungan Istana Wakil Presiden. Sedangkan Sri Mulyani sudah membuktikan diri saat menjadi Kepala Bappenas. "Ketika itu, ia langsung menangani Aceh yang habis dilumat tsunami dan ikut merasakan gempuran setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak lima tahun lalu," katanya.

Calon perempuan lain yang santer dibicarakan adalah Anny Ratnawati. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ini sebelumnya menjabat Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan

Keuangan. "Ia orang titipan Presiden yang ditempatkan di Kementerian Keuangan," kata sumber lain. Anny pula yang menguji disertasi doktornya Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang senat di Institut Pertanian Bogor enam tahun lalu. Menurut Andi Bahmat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera, meski tidak dikenal publik, Anny cukup dikenal di kalangan pelaku ekonomi dan politikus.

Dirjen Anny juga salah satu pesaing di Brighten Institute, lembaga pembiayaan yang mendukung Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden pada Pemilihan Umum 2004. Di lembaga itu Yudhoyono masih tercatat sebagai ketua dewan penasihat. Itu sebabnya, kata sumber di Kementerian Keuangan, meski tak tampak banyak berpolitik, doktor ekonomi pertanian Institut Pertanian Bogor ini dekat dengan lingk-



Gedung
Departemen
Keuangan RI,
Jakarta.

Armida S.
Alisjahbana,
Darmin
Nasution,
Anggito
Abimanyu, dan
Gita Wirjawan.

terti Keuangan, nama Anggito Abimanyu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, kembali disebut-sebut. "Ia dari dulu tangan kanan Sri Mulyani dalam penyusunan fiskal," kata Andi Rahmat. Menurut politikus ini, reputasi Anggito sudah dikenal publik. Kapasitas intelektualnya juga tidak kalah dengan Sri Mulyani.

Bedanya, pendekatan Anggito lebih lentur dan halus. Posisi Anggito selama ini, menurut Andi, menutupi kelemahan Sri Mulyani dalam menjalin komunikasi dengan politikus di parlemen. Sumber *Tempo* mengatakan ketegasan Sri Mulyani menolak menyediakan "posisi" buat mitranya di parlemen menyebabkan ia kurang disenangi para politikus Senayan.

Anggito bukan tanpa cela. Dalam kasus suap anggaran dana stimulus awal tahun lalu, Abdul Hadi Djamil—terpidana kasus suap proyek di Departemen Perhubungan—menyebut nama Anggito sebagai perwakilan pemerintah yang melakukan lobi kepada anggota Dewan soal kewenangan perubahan atau pengajuan anggaran dana stimulus. "Saya yang pertama kali dilobi," ujar bekas anggota Dewan dari Fraksi Partai Amanat Nasional itu. Pertemuan berlangsung di Hotel Borobudur pada akhir Januari 2009 dan di Hotel Four Seasons pertengahan Februari 2009. Anggito mengakui adanya pertemuan informal dengan Dewan. Namun ia juga mengaku lupa agenda pertemuan yang berlangsung di luar gedung Dewan itu.

Kebiasaan Anggito "main belakang" dengan anggota Dewan itulah yang membuat hubungannya dengan Sri Mulyani renggang. "Ia terlalu dekat dengan Dewan," kata sumber itu. Sri Mulyani bukannya tidak tahu apa yang dilakukan Anggito. Ia beberapa kali memanggil Anggito. "Tapi kekuatan Anggito, yang merapat ke (Menteri Koordinator Perekonomian) Hatta Rajasa, juga diperhitungkan," kata sumber tadi. Yang pasti, kata sumber di lingkaran Presiden, insiden Anggito dengan Abdul Hadi Djamil menjadi bahan pertimbangan Presiden Yudhoyono mencari Menteri Keuangan baru.

Anggito belum mau berkomentar soal masuknya nama dia dalam bursa Menteri Keuangan baru. "Saya tidak tahu apa-apa," katanya ketika dihubungi Rabu pekan lalu. Ia juga belum memastikan kesediaannya seandainya Presiden menunjuknya menggantikan Sri Mulyani. "Saya masih umrah. Soal itu nanti saja kalau sudah pulang."

Dari semua kandidat yang bermunculan, cuma Darmin Nasution yang sudah menyatakan bersedia. Penjabat Gubernur Bank Indonesia itu mengaku tidak bisa menghindar bila nanti ditunjuk menggantikan Sri Mulyani. "Kalau saya anggap itu sebagai amanah, ya, saya tidak bisa menghindar," katanya Kamis pekan lalu. Darmin termasuk yang paling senior di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia pernah menjadi Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Kepala Badan Pengawas Pasar Modal, dan Direktur Jenderal Pajak.

Jauh sebelum nama-nama itu muncul, kabarnya, Presiden sudah mengajukan wacana untuk menunjuk Gita Wirjawan sebagai pengganti Sri Mulyani. Menurut sumber *Tempo*, nama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal itu dimunculkan dalam pertemuan di Istana Tampak Siring, Bali, akhir April lalu. Pertimbangannya, bekas Presiden JP Morgan Indonesia itu dinilai sosok yang biasa menghadapi gejolak risiko di pasar. "Saya cuma sekadar mendengar (kabar itu)," kata M. Ikhsan, anggota staf khusus Wakil Presiden Boediono.

Yang jelas, sebari setelah pengumuman Sri Mulyani pindah ke Bank Dunia, Presiden menggelar pertemuan di Puri Cikeas, Bogor. Di rumah pribadinya itu, ia mengumpulkan menteri serta ketua umum partai dan ketua fraksi pendukung pemerintah. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengaku tidak mengantongi nama yang akan disodorkan ke Presiden. "Kami sepakat Menteri Keuangan dari kalangan profesional," kata seorang sumber yang hadir pada Kamis malam itu.

Yandhrie Arvian, Agoeng Wijaya, Isma Savitri



Siapa Senang Kerikil Menyingkir

Setelah Sri Mulyani mundur, koalisi pendukung Yudhoyono merapatkan barisan. Aburizal Bakrie diberi peran penting.

MAKAN malam prasmanan membuka pertemuan menteri, ketua umum partai, dan ketua fraksi pendukung pemerintah di rumah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Puri Cikeas, Bogor, Kamis malam pekan lalu. Sahibul bait menyilakan tetamu yang sudah datang sejak pukul tujuh. Setelah sejam berbincang ringan, Yudhoyono bicara. Ia menyatakan pertemuan digelar buat membangun kembali kekompakan.

Hanya setengah jam bicara, Yudhoyono memberi kesempatan semua ketua umum dan ketua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat anggota koalisi bicara. Menteri-menteri dari partai koalisi tak diberi kesempatan bicara, tapi seorang menteri tunjuk jari. Yudhoyono mengizinkan dia bicara.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera

Luthfi Hasan Ishaq mengatakan, Yudhoyono mengumumkan pengurus koalisi yang dilembagakan. Ketua umum dipegang Yudhoyono sendiri. Ia didampingi Ketua Pelaksana Harian Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Sedangkan Syarif Hasan, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dari Partai Demokrat, menduduki posisi sekretaris. Inisiatif pembentukan sepenuhnya diambil Yudhoyono. "Kami terima, *given*," kata Luthfi.

Memang tak ada rapat koalisi yang mendahului lahirnya keputusan itu. Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan, Aburizal mendapat posisi ketua umum koalisi karena memimpin partai terbesar kedua dalam koalisi setelah Partai Demokrat. "Bang Ical—panggilan Aburizal—juga sudah lama bekerja sama dengan Pak SBY," kata Anas.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Aburizal Bakrie. *Harmoni koalisi.*

Koalisi pendukung Yudhoyono terdiri atas Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Meski begitu, mereka berpusat jalan ketika Dewan Perwakilan Rakyat mengambil keputusan atas hasil penyelidikan tentang penyelamatan Bank Century. Pertemuan digelar sebulan setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang dituduh Dewan bertanggung jawab atas penempatan dana Rp 6,7 triliun di Bank Century, menyatakan mundur.

Setelah ditunjuk menjadi ketua harian, Aburizal fasih bicara tentang "harmoni koalisi." Ketika membuka rapat kerja Partai Golkar Jawa Tengah di Hotel Patra Jasa Semarang, Jumat pekan lalu, ia mengatakan pertemuan di Cikupa untuk merenda beberapa kesepakatan. Dalam konsep baru, menurut Aburizal, partai koalisi ikut menentukan ke-



Gayus Lumbuun (kiri) bersama anggota Pansus Angket Bank Century lainnya.

pemerintah. "Anggota koalisi terbentuk sejak perencanaan," kata pemilik kelompok usaha Bakrie ini.

Yudhoyono, Aburizal menambahkan, menyatakan forum bersama koalisi bertujuan untuk menyeragamkan pendapat. "Masalah-masalah krusial yang pendapat sama. Contohnya, partai koalisi harus satu suara dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan. "Semua harus mendukung perubahan ini secara kompak," tuturnya.

Pembahasan anggaran ini terganggu oleh sejumlah politikus yang memboikot kehadiran Sri Mulyani. Kini, menurut Aburizal, partai tak harus warna dalam pembahasan anggaran. Artinya, partai masih punya kesempatan untuk selalu bermanuver, bergerak mencari simpati demi Pemilihan Umum 2014. Namun Aburizal menjajarkannya tetap membela pemerintahan Yudhoyono-Boediono hingga masa jabatan.

Untuk mengukuhkan komunikasi sesama anggota koalisi bakal dibentuk sekretariat gabungan. "Kami akan mencari tempat di daerah Jalan Diponegoro atau sekitar sana," kata sumber *Tempo*. Sementara, fungsi dirigen koalisi dipelembungkan oleh Menteri-Sekretaris Negara Rajasa. Pertemuan koalisi partai pemerintah kerap berlangsung di rumah pertemuan Umum Partai Amanat Nasional Partai Demokrat mulai mengambil setelah bergulir kasus Bank Century di Dewan Perwakilan Rakyat. Rumah

dinas Syarif Hasan pun dijadikan tempat pertemuan.

Sumber di kalangan Istana mengatakan, Yudhoyono memang merasa Sri Mulyani dan Boediono menjadi pengganjal hubungannya dengan partai koalisi, terutama Aburizal Bakrie. Dengan "melempar" Sri Mulyani ke Bank Dunia, hubungan dengan Aburizal Bakrie pun bisa diperbaiki. Sri Mulyani enggan menanggapi ihwal ini. Sedangkan Ical mengatakan, "Saya tidak pernah berseteru dengan Ibu Sri Mulyani."



Tyasno Sudarto, mantan Kepala Staf Angkatan Darat, yang berada dalam barisan oposisi pemerintah, mengatakan Sri Mulyani diselamatkan "induk semangnya".

KONSOLIDASI pendukung Yudhoyono tak mengurangi kerasnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gayus Lumbuun, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari partai itu, mengatakan kepergian Sri Mulyani ke Bank Dunia tidak cukup dengan persetujuan Presiden. Komisi Pemberantasan Korupsi, kata dia, perlu memberikan persetujuan karena Sri Mulyani sedang diproses secara hukum di lembaga antikorupsi itu. "Penegak hukum punya hak memberikan izin atau menolak," kata Gayus.

Suara keras PDI Perjuangan itu, kata sumber *Tempo*, merupakan bagian dari manuver untuk menjadikan Sri Mulyani bahan negosiasi. Apalagi sejumlah kader partai itu terbelit skandal korupsi yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sumber itu mengatakan, sejak kasus Bank Century dipersoalkan Dewan Perwakilan Rakyat, sejumlah petinggi partai itu berusaha menembus Istana. Mereka bersedia melunakkan sikap, dengan syarat kasus korupsi sejumlah kader partai itu dibekukan.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto membantah tuduhan itu. "Kami tak punya *track record* membarter kasus hukum untuk urusan politik," katanya. Justru, kata dia, banyak kader partainya yang secara politik *dikerjain* dengan dicari-cari kasus hukumnya.

Haris Rusly, koordinator Petisi 28, kelompok yang kritis terhadap pemerintah, mengibaratkan Presiden Yudhoyono kehilangan tangan yang biasa menangkis serangan lawan-lawan politiknya. Tyasno Sudarto, mantan Kepala Staf Angkatan Darat, yang berada dalam barisan oposisi pemerintah, mengatakan Sri Mulyani diselamatkan "induk semangnya".

Namun politikus anggota koalisi segera melunak. Harry Azhar Azis, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, misalnya, menganggap mundurnya Sri Mulyani sebagai satu hal tak terduga yang bisa mencairkan kebekuan hubungan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah ingin memperbaiki hubungan ini. "Ini titik kompromi yang baik," katanya.

Aktivis Panitia Khusus Bank Century, Andi Rahmat, pun menurunkan tensi bicaranya. Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menyatakan yakin, konsolidasi partai koalisi segera terbangun setelah Sri Mulyani mundur. Menurut dia, selama ini Sri Mulyani membuat koalisi tidak solid.

Sunyudiantoro (Jakarta), Rofuddin (Semarang)



Sri Mulyani Indrawati:

Saya Percaya Garis Tangan

MENJALANI hari-hari terakhir sebagai Menteri Keuangan, kesibukan Sri Mulyani Indrawati, 48 tahun, tidak kian surut. Rabu pekan lalu, setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memastikannya meninggalkan kabinet dan menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, ia menggelar rapat internal dengan jajaran Kementerian Keuangan. Keesokan harinya, ia melantik pejabat eselon II, menerima tamu, dan meladeni wartawan yang tak pernah berhenti menyemut di kantornya. Tak seperti ketika menjadi bulan-bulanan Dewan Perwakilan Rak-

yat dalam kasus Bank Century, kini ia tak pernah kehilangan senyum. "Saya happy," katanya perihal keputusannya meninggalkan kabinet.

Rabu malam pekan lalu, wanita paling berpengaruh ke-23 versi majalah *Forbes* tahun 2008 ini menerima tim wartawan *Tempo* di kantornya di lantai tiga gedung Kementerian Keuangan, Jakarta. Mengenakan pantalon hitam dan blazer *broken white*, ia tampak segar. Di luar pintu, teronggok sebuah karangan bunga ucapan selamat dari seorang kolega.

Direktur Jenderal Pajak M. Tjiptardjo dan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Mulia P. Nasution ikut

hadir dalam pertemuan itu. Sejumlah anggota staf berkerumun mendengarkan wawancara yang berlangsung dari tiga jam itu. Sayang, dalam kesempatan, Sri Mulyani hanya memberikan keterangan *off the record*.

Kapan persisnya Anda diminta Bank Dunia untuk bergabung?

Ya seperti yang sudah disampaikan Bapak Presiden saja.

Apa betul sejak tahun lalu?

Itu cerita versi siapa? Ya, cerita sendiri saja, tapi bukan dari saya (*tertawa*).

Beberapa bulan lalu, Presiden Bank Dunia berbicara kepada pengusaha Jusuf Wanandi. Katanya, Indonesia telah memperlakukan menteri keuangannya dengan sangat buruk dan, karena itu, Bank Dunia akan merekrutnya?

Kalau begitu, kutip saja dari Pak Jusuf Wanandi, he-he-he.... Saya memang



...k tahu.
...da merasa ada kelompok yang men-
...ng Anda mundur sebagai Menteri Ke-
...an?

...ya fokuskan kerja di sini saja. Soal
...sis pernyataan tokoh-tokoh itu,
...Tempo saja yang mengerjakan.
...ada dipanggil DPR dalam kasus Cen-
...Mereka memboikot rapat dengan
...Anda terganggu dengan DPR?

...ya menghormati lembaga yang di-
...lah wakil rakyat yang dipilih me-
...proses pemilihan umum. Kalau
...menggunakan hak politiknya un-
...meng-exercise eksekutif, saya hor-
...ngga. *I'm not taking that person-*
...Saya menghormati *power* mereka
...gali legislatif. Hanya, kenapa per-
...Century harus dipersonalisasi
...ada saya? Itu yang perlu kita kritisi.
...gaimana dengan boikot DPR?

...ma datang ke DPR berbekal amanat
...den. Mereka mengundang saya de-
...surat yang ditandatangani Ketua
...dan memakai kop surat DPR. Un-
...an juga diproses dalam Badan Mu-
...arah DPR yang dihadiri wakil se-
...krasi. *Lha*, kok tiba-tiba ada yang
...atakan tidak suka kepada saya
...meminta saya tidak hadir. *Lo*, ini
...ada persoalan dalam proses in-
...al mereka sendiri.

...ada kecewa?
...kan masalah kecewa, tapi kita se-
...bertanggung jawab untuk mem-
...demokrasi ini menjadi lebih ber-
...dan dewasa. Keprihatinan saya
...ada kita kerap menggunakan stan-
...anda dalam berpolitik. Kalau
...dipakai, kalau tidak, tidak dipa-
...buat Indonesia tidak per-
...ormati di dunia internasional.
...konsistenan ini menurunkan

reputasi kita.

Lima tahun menjadi Menteri Keuangan dan menjalankan program reformasi birokrasi, apa yang telah Anda capai?

Lima tahun ini tiga undang-undang perpajakan diubah: Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, serta Pajak dan Retribusi Daerah. Menteri Keuangan yang baru harus menjalankan semua ini secara konsisten.

Reformasi birokrasi belum selesai, Anda malah pergi....

Tolong jangan direduksi masalah ini hanya pada satu orang. Ini persoalan sistem. Kita tidak bisa mengandalkan hanya, misalnya, Direktur Jenderal Pajak yang bagus, bersih, lalu dengan tongkat ajaibnya semua persoalan di republik ini selesai. Kami membutuhkan kepolisian yang baik, kejaksaan yang baik, pengadilan yang baik. Sehingga, kalau ada wajib pajak atau anak buah saya yang jahat, bisa dihukum dengan konsisten.

Setelah Anda pergi, Anda yakin reforma- si birokrasi akan berlanjut?

Pasti berlanjut karena di sini ada teman-teman yang sudah lima tahun bekerja sama dengan saya. Sebuah program besar yang hanya berdasar pada *one man show* tak akan bertahan lama. Indonesia selama ini suka dengan yang seperti itu. Di Kementerian Keuangan, reformasi didesain tidak bergantung pada satu orang. Reformasi ini milik kita semua. Ini bukan cuma program saya. Saya bisa diganti kapan saja, tapi reformasi ini kebutuhan inheren organisasi. Reformasi dilakukan bukan karena instruksi Sri Mulyani.

Tapi faktor *leadership* tetap penting? Saya tidak membantahnya.

Anda tidak khawatir reformasi di Ke-
menterian Keuangan akan berhenti?

Eenggak. Kami satu tim. Jika ada satu anggota yang hilang, tentu akan terasa, tapi itu bukan berarti seluruh tim akan hancur.

Pergantian menteri biasanya diikuti pergantian pejabat di bawahnya. Ini bisa mengganggu program reformasi....

Saya rasa Presiden dan Wakil Pre-
siden juga berpikir untuk menjaga *achievement* yang sudah dicapai. Ka-
lalu yang kami lakukan dianggap se-
bagai aset, pencapaian yang membuat
Indonesia bernilai plus, mereka tidak
akan membiarkan sesuatu terjadi de-
ngan apa yang sudah dicapai itu.

Reformasi Anda jalankan termasuk de-
ngan memperbaiki sistem remunera-
si pegawai Kementerian Keuangan. Tapi
orang seperti Gayus tetap ada?

Memangnya kalau sekarang gaji Ga-
yus saya kembalikan ke posisi semula—
sekitar Rp 2,5 juta sebulan—dia akan
menjadi lebih baik? Kalau mereka di-
gaji *segitu*, kami tidak punya otoritas
moral untuk meminta mereka menjadi
jujur. Dengan sistem remunerasi yang
baru, saya bisa marah kepada mereka.
Mereka bisa kita *tagih*. Jadi jangan
dibalik: karena kasus Gayus, seluruh
sistem yang dihukum.

Di luar Gayus, apakah pegawai Kemen-
terian Keuangan sekarang lebih jujur?

Sekarang idealisme itu muncul. Me-
reka lebih bersemangat. Ada yang ber-
ubah karena tobat. Ada juga yang su-
dah kenyang karena korupsi di masa
lalu. Ada yang kepingin baik karena
Indonesia harus menjadi baik. Apa pun
alasan, anak buah saya yang seperti
itu sekarang banyak.

Kalau ada pilihan meneruskan reforma-
si birokrasi atau pindah ke Bank Dunia,
mana yang akan Anda pilih?

Setiap pekerjaan punya tantangan
dan nilai tersendiri. Yang bisa saya
katakan adalah dalam satu generasi
belum tentu ada orang Indonesia di po-
sisi itu (Direktur Pelaksana Bank Du-
nia). Jadi saya anggap itu tawaran yang
prestisius. Pekerjaannya juga penting.
Ini (keberadaan saya di Bank Dunia)
akan membuat pilar ekonomi dunia tak
didominasi lagi oleh satu kelompok. Ini
kesempatan yang boleh dibilang luar
biasa. Saya percaya pada garis tangan.

Jika Presiden tak mengizinkan Anda
pergi, Anda akan tetap memaksa?

Kita *ngurus* negara kan enggak se-
perti anak kecil yang mudah *ngam-
bek*. Ketika saya menjadi menteri, saya
membantu Presiden. Saya hormat ke-
pada beliau.

Ada bahagia dengan pilihan Anda me-
ninggalkan kabinet?

Ya, *happy*, ha-ha-ha....

KOALISI JAZZ PENYOKONG ISTANA

ABURIZAL BAKRI MEMIMPIN SEKRETARIAT GABUNGAN KUALIFIKASI PEMERINTAH YUDHONING SEPRATI MEMBANGUN PERPALAN BISNIS KELUARGANYA, HATTA TERBESER HARGA DAN GAJAP SERING GAGAL MENAWALKAN SEWAAN

DITAKANNO perwujudan rencana politikannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memfasilitasikan pertemuan peringgi Partai Demokrat, pada hari Selasa, 12 Desember 2011. Kapan pun itu, para wakil-sewaan Istana, Hattia Terbesar dan Sekretaris Jenderal Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Aburizal Bakri, dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat, Hattia Terbesar, akan bertemu.

Tidak mungkin berwujud itu jika pertemuan di tingkat yang lebih rendah antara para wakil-sewaan, seperti Yudhoyono dan sekretaris umum Partai Demokrat, Oedhoji, pada pertemuan yang berlangsung pada hari Selasa, 12 Desember 2011. Pertemuan ini berlangsung di Gedung DPR/MPR, Jakarta. Pertemuan ini berlangsung di Gedung DPR/MPR, Jakarta. Pertemuan ini berlangsung di Gedung DPR/MPR, Jakarta.

Menurut Soebe, Sekretaris DPR, pada Selasa, 12 Desember 2011, pertemuan ini berlangsung di Gedung DPR/MPR, Jakarta. Pertemuan ini berlangsung di Gedung DPR/MPR, Jakarta. Pertemuan ini berlangsung di Gedung DPR/MPR, Jakarta.

Sebelum pertemuan ini, sekretaris umum Partai Demokrat, Oedhoji, telah bertemu dengan Yudhoyono pada hari Selasa, 12 Desember 2011. Pertemuan ini berlangsung di Gedung DPR/MPR, Jakarta. Pertemuan ini berlangsung di Gedung DPR/MPR, Jakarta.





Anas Urbani, Syarif Hasan, dan Setya Novanto saat rapat koordinasi sekretaris gabungan. Partai peserta koalisi akan mengetahui kebijakan pemerintah dari awal.

Boediono dan Sri Mulyani Indrawati di kantor kepresidenan (kanan).

Peserta pertemuan sepakat hak menyatakan pendapat Dewan hanya bisa digunakan sebagai kelanjutan hak angkat jika terbukti presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum. Padahal dugaan pelanggaran yang disimpulkan Dewan dalam penyelamatan Bank Century sedang ditangani penegak hukum.

Yudhoyono dan politikus Demokrat khawatir hak menyatakan pendapat merupakan langkah awal menjatuhkan pemerintahan. Apalagi beberapa politikus juga mengajukan uji materi undang-undang yang mengatur pelaksanaan hak menyatakan pendapat ke Mahkamah Konstitusi. Mereka berusaha menurunkan syarat minimum pelaksanaan hak, yakni didukung tiga perempat jumlah anggota Dewan.

Toh, petinggi Partai Demokrat bukan kelompok pertama yang memperoleh informasi tentang rencana pembentukan sekretariat gabungan. Sepekan sebelum pertemuan malam itu, Yudhoyono telah membahasnya di Istana Tampak Siring, Bali, di sela-sela pelaksanaan rapat kerja nasional tentang pembangunan dan pemerintahan. Ia menyampaikan rencananya itu kepada Wakil Presiden Boediono dan sejumlah menteri.

Hadir pada pertemuan terbatas itu Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto; Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa; Menteri Koordinator Kesejahteraan

Rakyat Agung Laksono; Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring; Menteri Agama Suryadharma Ali; serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Selain itu, ada Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar.

Mengutip Aburizal, menurut Ketua Golkar Sharif Cicip Sutardjo, seorang menteri sempat mempertanyakan rencana pembentukan sekretariat gabungan. Sang menteri menyatakan sekretariat bisa bertentangan dengan sistem presidensial.

Ketika itu, masih menurut Sharif, Yudhoyono dan Aburizal bergantian memberikan penjelasan—seolah sudah ada saling pengertian di antara keduanya. Menurut mereka, format kelembagaan koalisi itu tidak melanggar konstitusi. Lagi pula Yudhoyono sebagai presiden sekaligus ketua sekretariat gabungan tidak merasa wewenangnya dicampuri.

Baru setelah pertemuan Tampak Siring dan rapat petinggi Demokrat, rencana pembentukan sekretariat gabungan disampaikan lebih luas. Yudhoyono mengundang para ketua umum, ketua fraksi, juga menteri-menteri yang berasal dari partai politik peserta koalisi ke Cikeas, Kamis dua pekan lalu.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaq mengatakan Yudhoyono malam itu mengumumkan pengurusan koalisi yang dilembagakan. Ketua umum dipegang Yudhoyono, yang didampingi Aburizal sebagai ketua

harian. Adapun Syarif Hasan, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, menduduki posisi sekretaris.

POSISI baru sebagai ketua harian koalisi—semacam kepala staf dalam struktur kemiliteran—merupakan "kemenangan" kedua Aburizal. Sebab, pada saat yang hampir bersamaan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersingkir dari kabinet, setelah Presiden Yudhoyono menyetujui penunjukannya menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Bukan rahasia lagi, hubungan Aburizal dengan Sri Mulyani tak akur. Dalam sebuah wawancara, Sri Mulyani secara terbuka mengatakan, "Aburizal tak pernah menyukai saya." Penyebabnya, tentu saja, sikap keras Menteri Keuangan terhadap sejumlah perusahaan milik keluarga Bakrie. Sri Mulyani bahkan pernah berniat men-

Posisi baru sebagai ketua harian koalisi merupakan "kemenangan" kedua Aburizal. Sebab, pada saat yang hampir bersamaan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersingkir dari kabinet ...



Mulyani, pendapat saya tidak *genuine* karena punya kepentingan, Pak."

Masih menurut Sharif, Aburizal menjelaskan tak pernah lagi mengurus perusahaan Grup Bakrie. Ia menunjuk Nirwan D. Bakrie, adiknya, sebagai penanggung jawab semua perusahaan. Kepemilikan saham Aburizal di Grup Bakrie juga tidak langsung, tapi lewat perusahaan keluarga.

Itu sebabnya, menurut Sharif, tak benar jika Aburizal bersedia menjadi bumper pemerintah dengan imbalan pembebasan kasus pajak perusahaan keluarganya. Lawan-lawan politik Yudhoyono memang menganggap sekretariat gabungan akan mengamankan Presiden dari serangan politik akibat penyelamatan Bank Century.

Lalu Mara Satriawangsa, juru bicara keluarga Bakrie, juga membantah jika dikatakan pembentukan sekretariat gabungan bagian dari kesepakatan

...ika merasa diintervensi dalam ...kaan suspensi saham Bumi Re ... yang tererosok pada krisis ke ... global 2008.

Mulyani juga berkeras menelisik ...akan pajak tiga perusahaan tam ...tu bara milik keluarga Bakrie: Resources, Arutmin Indone ... Kaltim Prima Coal. Ketiga per ... itu dituduh menunggak pajak ... Rp 2,1 triliun. Sampai sekarang ... ketiga perusahaan ini masih di ... Direktorat Jenderal Pajak Ke ... man Keuangan.

...lah politikus Beringin mengata ...sasi pajak ini cukup mengkhawa ... petinggi partai itu. Jika terbukti ...plang pajak dan keluarga Bak ...nus membayar denda empat kali ...jumlah tunggakan, kata seorang ... Golkar, sumber pendanaan par ... terguncang. Citra partai di mata ...arakat pun akan tercoreng. Kepada ...ngurus Golkar, kata sumber itu, ...sial selalu meyakinkan agar partai ...perlu khawatir.

...rif Cicip Sutardjo, yang diked ...kat dengan Aburizal, mengata ...ng Ketua Umum memang pernah ...icarakan persoalan pajak itu de ... Yudhoyono. Dalam pembicaraan ...ut, Sri Mulyani pun menjadi ob ...bicarakan. Pada saat itu, menu ...Sharif, Yudhoyono menanyakan ...pat Aburizal tentang langkah- ...ah Sri Mulyani dalam menangani ...pajak Grup Bakrie.

...alih memanfaatkan kesempatan ...emperoleh dukungan Presiden, ...ut Sharif, Aburizal mengatakan ...k berpendapat soal Menteri Ke ... Ketika itu, kata Sharif, Aburi ...ngatakan, "Kalau mengenai Sri

Lalu Mara Satriawangsa:

Ical-SBY Saling Menghormati

POSISI politik Aburizal Bakrie menguat setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuknya sebagai ketua harian sekretariat gabungan koalisi. Buat mengetahui proses penunjukan ini, *Tempo* mengajukan permintaan wawancara kepada Ketua Umum Partai Golkar itu. Tapi, menurut juru bicaranya, Lalu Mara Satriawangsa, Aburizal berada di luar negeri dan tak bisa diwawancarai. Lalu Mara, yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, berbicara mewakili Aburizal.

Posisi baru Aburizal berkaitan dengan mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani yang kritis terhadap tunggakan pajak Grup Bakrie?

Sri Mulyani tidak mundur. Dia diterima di Bank Dunia pada jabatan prestisius.

Bukankah itu bagian dari tawar-menawar politik antara Presiden Yudhoyono dan Aburizal?

Itu kampanye hitam dan pembunuhan karakter Pak Ical.

Keluarga Aburizal pernah melobi Sri Mulyani soal pajak?

Eggak pernah. Sri Mulyani memang pernah datang ke rumah Pak Ical. Saya saksi. Eggak ada masalah. Kita jangan melihat masalah ini secara personal. Itu tidak *fair*.

Apa benar ada komunikasi antara Aburizal dan SBY soal kasus Bank Century?

Pak Ical dan Pak SBY berkomunikasi secara efektif. Keduanya saling menghormati posisi masing-masing.

Ical dan SBY sempat membicarakan penyelesaian masalah pajak Grup Bakrie?

Tidak pernah. Kami ini *public company*. Pajak itu instrumen fiskal, bukan politik. Yang mengutip dan membayar harus tahu aturan. Ini hanya publikasi negatif buat Pak Ical.

Posisi ketua harian sekretariat gabungan koalisi menguntungkan Aburizal?

Jangan dilihat seperti itu. Lihatlah bahwa semua pihak bisa bekerja sama untuk kepentingan masyarakat. Program masyarakat bisa jalan bila iklim politik stabil.





Istana selalu membandingkan kinerja Hatta Rajasa dengan Aburizal Bakrie, yang selalu sukses melindungi pemerintahan Yudhoyono-Jusuf Kalla dari serangan Dewan.

politik Yudhoyono dengan Aburizal. "Itu kampanye hitam dan pembunuhan karakter Pak Ical," ujarnya.

DI blognya, Aburizal mengatakan format baru koalisi akan berlaku efektif tahun depan. Menggunakan istilah "sekretariat bersama"—bukan sekretariat gabungan—ia menyatakan format baru dibentuk dengan mengambil pelajaran pada jalannya koalisi selama ini. "Format koalisi lama, ketika partai-partai pendukung hanya membela kebijakan pemerintah, ternyata sulit," katanya.

Menurut Aburizal, dengan format baru, partai peserta koalisi akan mengetahui kebijakan pemerintah dari awal. Mereka bisa ikut memberikan masukan. Partai peserta koalisi tetap bisa berdebat dan berbeda pendapat, tapi tetap buat menyukseskan pemerintahan.

Peserta koalisi, menurut Aburizal, akan mengetahui dari awal tujuan, dasar, bahkan anggaran suatu program pemerintah. Ia menambahkan, partai koalisi sepakat mengarahkan semua kebijakan pemerintah "lebih nasionalistik". "Presiden juga mengatakan tidak boleh terlalu liberal, tidak boleh terlalu sosialis, tapi berada di tengah," Aburizal menulis.

Walhasil, posisi Aburizal sangat dominan dalam pembuatan kebijakan pemerintah—semacam perdana menteri dalam pemerintahan parlementer.

Kepada pers, Syarif Hasan dan politikus Partai Demokrat mengatakan Aburizal ditunjuk karena posisinya sebagai ketua umum partai terbesar kedua dalam koalisi. Namun sumber *Tempo* mengatakan Istana tak puas dengan kinerja Hatta Rajasa yang selama ini menjadi koordinator koalisi.

Hatta sebenarnya cukup rajin mengumpulkan petinggi partai. Tiap

Ahad malam, para ketua umum, ketua fraksi, dan menteri-menteri dari partai koalisi bertemu di rumah di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Pertemuan itu ternyata tak begitu efektif.

Hatta dianggap gagal memantapkan pembentukan Panitia Khusus untuk Angket Penyelamatan Century. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Tumpak Hatorangan Panggabean ditolak Dewan. "Banyak kebijakan pemerintah yang mental di DPR," kata orang politikus anggota koalisi.

Sumber lain mengatakan Istana selalu membandingkan kinerja Hatta Rajasa dengan Aburizal, yang selalu sukses melindungi pemerintahan Yudhoyono-Jusuf Kalla dari serangan Dewan. Antara lain dengan mandulnya usaha menggunakan hak interpelasi tentang keputusan menaikkan harga minyak saat interpelasi kasus beras.

Menganggap Hatta tak terlalu berhasil sungguh-sungguh, pertemuan koalisi kemudian dipindah ke rumah Syarif Hasan. Pemindehan dilakukan di tengah gencarnya serangan Dewan terhadap kasus Bank Century. Para politikus Demokrat bahkan mendorong Hatta segera mengambil alih dirigen koalisi.

Wakil Ketua Umum Demokrat Ahmad Mubarak menuduh, sebagai koordinator koalisi. Hatta ketika itu berkap mendua. Hatta, menurut Mubarak, berharap bisa menggantikan Boyko jika sang Wakil Presiden dijabat akibat kasus Century. "Sikap Pak Hatta tidak *firm*," katanya.

Penunjukan Aburizal dianggap cukup kulan bagi Hatta. Itu sebabnya politikus Partai Amanat Nasional ramai-ramai mengkritik pembesaran sekretariat gabungan. Hatta sempat menampik penilaian bahwa dia dikirakan. "Saya tidak pernah merasa ditelung," kata Menteri Koordinator Perekonomian ini.

Ketua Partai Amanat Nasional Partai Jaya Husin mengatakan justru Hatta yang berinisiatif mengusulkan penunjukan koordinator koalisi buat memulus hubungan pemerintah dengan DPR. Ia mengatakan partainya menyambut baik posisi Aburizal.

Soetan Bathoegana berharap dibentuknya sekretariat gabungan memperkuat pemerintah. Apapun para anggota koalisi tetap bisa berbeda pendapat. Ia bertamtil, "Itu banyak lagu boleh berbeda-beda, tapi semuanya sama-sama jazz."

Budi Setyarso, Budi Riza, Sumartono



TEMPO/INDRA SAKHA

Rizal Mallarangeng.
Santer disebut-sebut
bakal berperan.

Kantor sekretariat
gabungan partai koalisi di
Jalan Diponegoro, Jakarta.

Koalisi di Rumah Pinjaman

Menempati rumah pengusaha Jan Farid, sekretariat gabungan partai koalisi telah bekerja sejak pekan lalu. Bisa memanggil menteri.

DUA ratus meter dari kediaman Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, rumah itu tengah dibenahi. Aroma cat menusuk hidung, tiga pekerja terlihat sedang memperbaiki taman. Di luar tampak gazebo berpayung hijau plus meja-kursi kayu. Pepohonan tumbuh subur. Meja-kursi di ruang tamu tertata rapi. Letaknya di kawasan elite Jakarta: Jalan Diponegoro 43, Menteng. Persis sebelah rumah itu terletak Kedutaan Italia. Beberapa ratus meter kemudian ada rumah dinas Wakil Presiden Wediono. "Rumah ini biasanya dipakai Pak Jan menerima tamu," kata Dwi Wati, yang mengurus kediaman itu, Jumat pekan lalu.

Orang yang dimaksud adalah Jan Farid, bos PT Priamanaya Group, perusahaan properti dan energi. Kini Jan Farid anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi DKI Jakarta. Kabarannya, ia meminjamkan rumah itu secara cuma-cuma untuk dijadikan sekretariat gabungan partai koalisi pendukung pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jan Farid tidak bisa dimintai konfirmasi. Menurut Wati, sekretarinya, Jan sedang ke luar kota.

Sekretariat bersama adalah kelanjutan dari dikumpulkannya ketua umum, ketua fraksi, dan 22 menteri dari partai koalisi di rumah Yudhoyono di Puri

Cikeas, Bogor, Kamis dua pekan lalu. Yudhoyono menunjuk Ical, begitu Aburizal biasa disapa, sebagai ketua pelaksana harian sementara. Yudhoyono sendiri menjadi ketua sekretariat partai koalisi. Syarif Hasan, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat sekaligus Menteri Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah, didapuk sebagai sekretaris.

Jumat pekan lalu digelar pertemuan tertutup pemimpin fraksi partai koalisi di kantor sekretariat gabungan itu untuk membahas rencana kerja. Selain itu, ada Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Taufik Kurniawan, Bendahara Golkar Setya Novanto, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Musthafa Kamal, dan beberapa lainnya.

Musthafa mengatakan adanya sekretariat membuat koordinasi makin baik. Fraksi-fraksi partai koalisi jadi punya wadah untuk membicarakan, misalnya, rancangan undang-undang yang bakal dibahas Dewan Perwakilan Rakyat. Di kantor sekretariat fraksi-fraksi partai koalisi bisa berdiskusi dengan mengundang pakar. "Ini biar kerja pemerintah dan DPR efektif," katanya.

Pekan ini, sepulang dari lawatannya ke luar negeri, Ical bakal memulai kegiatan memegang setir koalisi enam partai propemerintah: Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan

Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Selasa pekan ini, kata Musthafa, Aburizal akan mengumumkan mekanisme kerja dan wewenang sekretariat gabungan.

Menurut Wakil Sekretaris Golkar Harry Azhar Azis, ada cita-cita sekretariat dibentuk menjadi semacam Barisan Nasional yang dikomandani UMNO di Malaysia. Memang tak mudah karena partai di Indonesia sulit menguasai suara mayoritas sederhana 50 persen plus satu. "Tapi bukan tidak mungkin kelak koalisi partai benar-benar dilembagakan," kata Harry.

Menurut Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham, semua aktivitas koalisi selalu bermula dari rapat. Ada tiga jenis pertemuan di sekretariat itu. Pertama, rapat umum dipimpin ketua koalisi Susilo Bambang Yudhoyono, yang membahas gagasan penting dan strategis Indonesia. Kedua, rapat yang dipimpin ketua harian, yang dihadiri rapat pimpinan partai ditambah ketua-ketua fraksi. Dalam rapat ini, jika Presiden setuju, menteri kabinet bisa dipanggil. Ketiga, rapat operasional yang dipimpin sekretaris.

Kesekretariatan melibatkan orang dalam Partai Golkar. Orang yang santer disebut-sebut bakal berperan adalah Rizal Mallarangeng, Ketua Bidang Pemikiran dan Kajian Kebijakan Partai Golkar. Ialah yang disiapkan mengoperasikan sekretariat bersama. Akrab dengan Ical sejak dulu, Rizal dianggap sukses mengelola Freedom Institute, lembaga kajian yang dibiayai Aburizal. Tapi Rizal Mallarangeng menyangkal terlibat. "Enggak benar itu. Saya enggak ikut-ikut," katanya.

Sunudyantoro, Dwi Riyanto Agustiar

Ban Serep Jadi Wayang

Wewenang sekretariat gabungan partai koalisi mengecilkan peran Wakil Presiden. Boediono terjepit.

WAKIL Presiden Boediono tersenyum simpul. Isroi, mahasiswa pascasarjana Universitas Gadjah Mada, baru saja bertanya kepadanya soal kasus Bank Century. "Kami ingin mendengar langsung dari Pak Boediono," kata Isroi dalam sesi tanya-jawab kuliah umum Boediono di UGM, Senin dua pekan lalu.

Di Balai Senat Gadjah Mada, Yogyakarta, Boediono menjawab panjang-lebar. "Saya siap bertanggung jawab dunia-akhirat karena merasa hasilnya baik," ujarnya menutup uraian.

Suasana hati orang nomor dua di Indonesia itu memang sedang bagus. Sepanjang kunjungannya di Yogyakarta ia tampil sumringah. "Saya bahagia bisa pulang ke kandang. Saya rindu sekali," kata Boediono di hadapan kepala daerah se-Yogyakarta. Ucapan yang sama ia sampaikan lagi saat memberikan kuliah umum.

Kunjungan kerja ke Yogyakarta itu memang bak liburan bagi Boediono yang suasana hatinya sedang tak menentu. Orang-orang dekatnya bercerita ia kecewa karena merasa ditinggal Menteri Keuangan Sri Mulyani yang hijrah ke Washington, Amerika Serikat, menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Soal rencana pemakzulan memang tak lagi dipikirkannya. Menurut sejumlah orang dekat Boediono, kesepakatan dalam partai koalisi, yang tak akan mengusik Wakil Presiden, untuk sementara membuat pria kelahiran Blitar 67 tahun silam itu bisa sedikit lega. "Usulan hak menyatakan pendapat yang bisa berujung pemakzulan Wakil Presiden tak dilanjutkan," kata seorang sumber.

Yang kini membuat Boediono tak enak adalah pembentukan sekretariat gabungan partai koalisi dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai ketua harian. "Ini akan semakin membuat Pak Boed terjepit," kata orang dekat Boediono.

Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham menjelaskan, Ical, sapaan Aburizal, punya wewenang memang-



Boediono dan SBY di Istana Negara, Jakarta.

gil menteri saat memimpin rapat harian sekretariat gabungan. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan M. Romahurmuziy, sekretariat juga akan membahas calon pengisi jabatan strategis, seperti Gubernur Bank Indonesia atau Kepala Kepolisian RI. Jika ini benar, sekretariat akan bergesekan dengan tim penilai akhir yang diketuai Boediono. "Sudah jadi ban serep, sekarang semakin jadi

ban serep lagi," kata orang dekat Wakil Presiden. "Di tangan SBY, Boediono seperti wayang saja."

Juru bicara Boediono, Yopie Hidayat, mengatakan atasannya memilih menunggu dan mengamati kerja lembaga sekretariat bersama. "Kita lihat saja dulu. Terlalu dini mengomentari barang yang belum jelas," ujarnya.

Oktamandjaya Wiguna, Sunudyantoro (Jakarta),
Bernada Ruit (Yogyakarta)



Uang pecahan seratus ribuan dan dua puluh ribuan yang terbuat dari bahan polimer.

Gedung Bank Indonesia. Bukan tempat baru bagi Radius Christanto.

Bank sentral waswas, ketika tahun berganti ke 2000, sistem komputerisasi di dunia perbankan kolaps. Fenomena ini dikhawatirkan memicu penarikan dana besar-besaran. "Apalagi trauma di Indonesia akibat *rush* 1998 belum hilang," kata Difi A. Johansyah, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Bank Indonesia. Otoritas moneter di seluruh dunia ketika itu sepakat menambah stok uang tunai mereka hingga minimal tiga kali lipat.

Bank Indonesia lalu meminta Peruri mendesain gambar pecahan Rp 100 ribu. Setelah desain rampung, BI menunjuk Note Printing Australia untuk mencetak pecahan tertinggi dalam sejarah peredaran uang di Indonesia itu. "Pesanan ke Australia dilakukan karena kapasitas Peruri sudah tidak mencukupi," kata Toni Pandelaki, Sekretaris Perusahaan Peruri. Sebelumnya, Peruri sudah menggarap proyek mencetak rupiah dengan berbagai nilai nominal sebanyak lima miliar bilyet.

Peruri juga tidak bisa memenuhi permintaan karena pecahan Rp 100 ribu dicetak memakai bahan polimer. "Hingga kini kami tidak memiliki teknologi yang memungkinkan pemakaian polimer dengan teknik cetak *intaglio* suhu tinggi," ujar Toni. Kalaupun harus digarap, Peruri butuh investasi untuk membeli mesin *coating*, sedangkan kebutuhan mencetak uang pada masa itu sudah mendesak.

Kenapa dipilih polimer? Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Rochadi, selain bersih dan bentuknya

bagus, uang dari polimer lebih awet 2,5 kali lipat. "Setelah ada pembicaraan dengan Dewan Gubernur, diputuskan menggunakan bahan polimer," kata Budi. Pemakaian uang berbahan polimer ketika itu lagi *ngetren*. Thailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam memakai bahan ini.

Namun harian *The Age* menyebut sisi lain di balik keputusan untuk memakai formula polimer buatan Securrency. Koran itu mengisahkan bahwa proyek ini bisa gol berkat lobi di lapangan golf antara beberapa pejabat Bank Indonesia dan Radius Christanto. Jika ada pejabat bank sentral Australia yang hendak ke Jakarta membahas kontrak, Radius mengirim *e-mail* atau faksimile yang mengingatkan agar eksekutif bank sentral negeri koala itu tak lupa membawa sepatu golf. Sejak awal 1999 itulah, beberapa pejabat BI sudah menanyakan komisi sesuai kontrak pengadaan uang Rp 100 ribu itu.

Pada awal Mei 1999, Radius menyampaikan saran untuk eksekutif Securrency yang, menurut pengakuannya, disusun bersama "teman" di Bank Indonesia. Isinya: agar Securrency menggelembungkan harga 20 persen pada tawaran pertama. "Teman kita akan membalas bahwa harga itu terlalu tinggi dan minta diturunkan," kata Radius. Securrency lalu diminta mengirim tawaran kedua yang besarnya 15 persen dari nilai kontrak. Radius mengatakan selanjutnya "teman" di bank sentral akan mengeluarkan tawaran final yang nilainya 5 persen lebih rendah dari tawaran Se-

currency.

Akhirnya nilai kontrak disepakati. Harganya 10 persen lebih tinggi dari nilai yang sebenarnya. Proyek pengadaan uang Rp 100 ribu itu memakan biaya US\$ 55,5 juta. Untuk menjaga kerahasiaan, Radius meminta seluruh tawaran disampaikan tidak melalui faksimile, tapi dikirim melalui kurir. Dalam korespondensinya, Radius menyebut hampir 10 nama eksekutif Securrency dan Note Printing, baik yang kini masih menjabat maupun pensiun. Di antaranya Hugh Brown, Manajer Penjualan Global Securrency.

Pada 18 Mei 1999, Bank Indonesia resmi mengumumkan pecahan Rp 100 ribu dicetak memakai formula khusus yang cuma bisa diproduksi oleh anak usaha Reserve Bank of Australia. Ketika kontrak diumumkan, BI dinakhodai Syahril Sabirin. Direktorat Peredaran Uang dipimpin Herman Y. Susmanto, Mardiyono dan Christian Sudirja menempati posisi Deputi Direktur Peredaran Uang. Adapun Made Sudana menjabat kepala bagian di direktorat itu.

Tiga hari setelah itu, Radius mengirim faksimile, menagih komisi US\$ 3,65 juta. Tidak berhenti sampai di situ. Faksimile itu juga menjelaskan bahwa Securrency sebelumnya sudah setuju membayar US\$ 1 juta buat "Mr S" di Bank Indonesia. Ia juga menyarankan agar Securrency mengirim sedikitnya US\$ 250 ribu buat "Mr M". Nama yang disebut terakhir ini bertugas menulis estimasi biaya yang mesti dikeluarkan Bank Indonesia pada saat Securrency



nyata tidak cocok dengan iklim tropis berhawa panas. Tiga tahun lalu bank sentral menarik uang plastik Rp 100 ribu, kemudian menggantinya dengan uang kertas berbahan kapas.



PERAN Radius Christanto tidak dibantah oleh Budi Rochadi. Meski Bank Indonesia berhubungan langsung dengan produsen pencetak uang di Australia, Budi mengatakan bantuan Radius—sebagai perwakilan anak usaha bank sentral Australia di Jakarta—dibutuhkan untuk memperlancar komunikasi dengan prinsipal di Australia. Urusannya mulai soal generik hingga ke persoalan teknis, semisal bila ada masalah kertas.

Pernyataan Budi bertolak belakang dengan Herman Y. Susmanto. Bekas Direktur Peredaran Uang ini mengatakan BI tidak pernah menggunakan jasa Radius. "Kami berhubungan langsung," katanya, Rabu pekan lalu. Negosiasi dilakukan oleh panitia independen yang diketuai bekas Direktur Bank Indonesia Dono Iskandar Djojokusubroto.

Ketika menjabat, Herman bertanggung jawab atas pencetakan uang pada saat itu. Namun dia membantah inisial "S" yang dilansir harian *The Age* adalah "Susmanto" yang tak lain adalah dirinya. "Kita tidak tahu apa 'S' itu saya," katanya. Kebenaran dokumen faksimile itu, kata Herman, harus dibuktikan terlebih dulu. Namun Herman mengaku kenal Radius. "Setahu saya dia itu agen mesin TNT, mesin hitung uang buatan Jerman," katanya. Ia menegaskan, selama menjabat, BI tidak pernah membeli alat dari Radius.

Pensiunan bank sentral ini juga mengaku sudah memberikan keterangan ke tim audit internal. "Saya sedang menyelesaikan laporannya," kata Herman kepada Mahardika Satria Hadi dari *Tempo*, Jumat sore pekan lalu. Herman yakin, proses percetakan itu tidak ada penyimpangan. Hal itu sudah dibuktikan dari audit laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut Difi A. Johansyah, juru bicara BI, bila terbukti ada penyelewengan, persoalan ini harus dibawa ke ranah hukum.

Seorang sumber *Tempo* mengatakan Bank Indonesia berupaya mengorek keterangan tentang faksimile itu dengan mendatangkan Radius Christanto ke Kebon Sirih. Dihubungi pada Selasa pekan lalu, Radius menolak berkomentar tentang persoalan rasuah itu. "Saya *no comment*, itu berita *ngawur*," katanya sambil buru-buru menutup telepon selulernya.

Yandhrie Arvian, Padjar Iswara, Fery Firmansyah, Agus Supriyanto

dan Note Printing Australia mengirim hasil cetakan uang.

Akhir Juli tahun itu, cicilan pertama proyek dibayar oleh Bank Indonesia. Radius lalu mengirim faksimile ke Securrency, meminta agar jatah komisinya ditransfer ke rekening Bank of New York di Singapura. Dia juga mengingatkan bahwa "teman" di Bank Indonesia selalu menanyakan kapan komisi buat keduanya dibayarkan.

Menurut faksimile dan e-mail yang dikirim Radius, komplain dari "Mr M" terhadap tertundanya "upeti" ini terus berlanjut. Setelah eksekutif senior Securrency berkunjung ke Jakarta pada Agustus tahun itu, setoran buat "Mr M" disepakati naik menjadi US\$ 300 ribu. Radius lalu mengucapkan terima kasih ke pejabat Securrency di Melbourne.

Menurut Radius, teman-temannya di BI berjanji akan mengamankan proyek ini. Para pesaing Securrency akan dicegah, sehingga tidak akan menang dalam kontrak pada masa mendatang. Pejabat di Bank Indonesia juga berkomitmen mengakhiri tender uang kertas berbahan kapas untuk pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu, untuk diganti dengan uang plastik. Kenyataannya, kontrak baru pengadaan uang plastik tidak pernah ada.

Belakangan, tidak semua pesanan uang Rp 100 ribu dicetak di Australia. Rupanya, Note Printing Aus-

tralia ketiban bejibun order. Sekitar 25 persen pesanan dialihkan ke Bank of Thailand. "Ini sesuatu yang tidak lazim karena menyangkut keamanan," kata seorang pejabat di Kebon Sirih, kantor Bank Indonesia. Pencetakan mata uang jenis yang sama di beberapa tempat, kata dia, bisa memicu pemalsuan. Faktanya, setelah dicetak di Australia dan Thailand, kasus pemalsuan uang plastik Rp 100 ribu merebak. Bahan polimer yang diklaim lebih aman ternyata mudah dipalsukan. "Karena tidak ada benang pengaman," kata pejabat tadi.

Budi Rochadi mengakui soal kelemahan ini. "Pengamanan uang berbahan polimer minim, sehingga gampang dipalsukan," katanya. Bahan polimer yang katanya awet ter-



Budi Rochadi, Deputi Gubernur Bank Indonesia

GEDUNG berlantai tiga persis di pinggir Jalan Cideng 55, Jakarta Pusat, itu terlihat biasa saja. Letaknya berimpitan dengan rumah penduduk dan toko. Tulisan "Fujitsu" merah terpampang di kaca gedung berwarna gelap. Rabu siang pekan lalu, tampak mobil Lintas Artha sedang parkir di halaman gedung tersebut.

Di sanalah PT Askomindo Dinamika berkantor. Perusahaan perdagangan umum itu milik Radius Christanto. Nama pria kelahiran Malang, Jawa Timur, 62 tahun silam ini melambung lantaran diduga terlibat suap—menyuap dengan pejabat Securency International Australia (produsen bahan plastik polimer) dan Note Printing Australia—perusahaan pencetak uang milik pemerintah Australia—kepada dua pejabat Bank Indonesia berinisial "S" dan "M". Radius memakelari proyek pencetakan uang kertas Rp 100 ribu pesanan Bank Indonesia dari Note Printing Australia.

Radius bukan orang kemarin sore dalam bisnis yang berhubungan dengan kertas uang. Selama bertahun-tahun, pria paruh baya ini malang-melintang menjembatani para pemasok kertas uang dunia dan produsen mesin pencetak fulus ke Bank Indonesia serta Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri). "Dia main di dua kaki, di Bank Indonesia dan Peruri," kata sumber *Tempo* di Jakarta pekan lalu.

Kiprah Radius di bisnis pencetakan uang bermula ketika ia menjadi pemasok alat tulis kantor dan kebutuhan kelontong di Bank Indonesia pada 1992. Menurut sumber *Tempo* di Bank Indonesia, Radius dibawa oleh direktur logistik dan pengamanan di bank sentral berinisial "S". Kedekatan ini membuat Radius "naik pangkat" menjadi agen atau perwakilan produsen mesin sortasi uang terkenal di dunia, seperti Giesecke & Devrient (G&D Jerman), De La Rue (Inggris), Glory dan Toshiba, keduanya dari Jepang. Bank Indonesia memiliki 53 mesin sortasi uang. "Hampir semuanya dipasok melalui Radius," bisiknya.

Dalam memasok mesin sortasi uang kertas ke Kebon Sirih—kantor Bank Indonesia—Radius menggunakan lebih dari satu perusahaan. Misalnya, tatkala mendatangkan mesin dari De La Rue, Radius menggunakan bendera PT Aneka Star. Untuk mesin sortasi dari Giesecke & Devrient, Radius memakai PT Startek Data Sistem. Dokumen yang dimiliki *Tempo* menunjukkan, pada 2000, Bank Indonesia pernah meminta Startek Data Sistem memasok mesin sortasi merek G&D tipe BPS 2000 se-



Radius Christanto

Palugada Berkantong Kresek

Radius Christanto bertahun-tahun merajai proyek pasokan kertas uang dan mesin sortasi di Bank Indonesia dan Peruri. Supel, mudah bergaul, serta pintar melobi pejabat.

nilai US\$ 1,55 juta (sekitar Rp 1 miliar) dan *uninterruptible power supply*—penyimpan listrik—merek Best Power senilai Rp 972,7 juta.

Bukan hanya memasok mesin sortasi uang, Radius, menurut sumber *Tempo* tadi, juga menjadi makelar kertas uang dari Goznak (Rusia), Arjo Wiggins (Prancis), dan Kimsco (Korea) ke Bank Indonesia.

Radius mulai menjamah Peruri ketika sang pejabat yang menjadi sohib dia tadi ditempatkan di perusahaan pelat merah itu sebagai direktur niaga pada 1999. Awalnya, kata sumber *Tempo* di Peruri, Radius juga hanya memasok barang kelontong dan alat kebutuhan perusahaan lainnya. Di kalangan orang Peruri, Radius dijuluki Palugada. "Apa aja yang lu mau, gua ada," kata dia menyebut kepanjangan Palugada. Lama-kelamaan, Radius semakin dekat dengan jajaran direksi Peruri. Bahkan ia bisa mempengaruhi keputusan manajemen. "Dia seperti direksi keenam," kata sumber *Tempo*. Saat itu anggota direksi



di Peruri berjumlah lima orang.

Sumber *Tempo* lainnya di Peruri menyebutkan, Direktur Aneka Star itu punya julukan lain, Napoleon dan Mister R, atau dengan nama samaran "Rakyat". Kehebatan Radius di Peruri adalah ketika ia berhasil memerantari pembelian tiga unit mesin pencetak uang kertas dari Swiss pada 2005 dan 2006.

Hasil investigasi majalah ini pada 2007 menunjukkan, Radius berada di balik keputusan manajemen Peruri memilih mesin cetak uang dari Koenig & Bauer Aktiengesellschaft-Giori (Swiss) senilai Rp 339,89 miliar. Pengadaan mesin cetak uang itu membuat jengkel Komori Corporation, perusahaan asal Jepang yang menawarkan mesin sejenis tapi dengan harga murah (lihat "Royal Peruri, Beban BI", *Tempo* edisi 19 Maret 2007).

Dalam investigasi *Tempo* itu terungkap, Radius ternyata kepanjangan "Swiss Connection". Jaringan ini membuat para pemasok lain kesulitan menembus Peruri. Maka jangan



Mesin pencetak uang merek Giori di pabrik percetakan uang kertas Peruri, Karawang.

itnya Rainbow Hill di kawasan Desa Cijayanti, Ciawi, Bogor. Meski senang bermain golf, penampilan Radius sama sekali tak tampak seperti orang kaya. "Dia sering membawa kantong kresek yang isinya kaus-kaus kotor."

Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Rochadi membantah bahwa para pejabat Bank Indonesia kenal dekat dengan Radius. Menurut Budi, setiap melakukan perjanjian bisnis dengan lembaga lain, Bank Indonesia selalu berhubungan langsung tanpa melalui perantara. "Kontraknya langsung," ujar dia dalam jumpa pers pekan lalu. Tapi, dalam kasus pencetakan uang di Negeri Kanguru, Budi mengakui ada peran perantara lantaran kesulitan menghubungi prinsipal.

Hal itu segendang sepenarian dengan Sekretaris Perusahaan Peruri Toni Pandelaki. Menurut Toni, pejabat-pejabat Peruri juga tak dekat dengan Radius. Tapi, dia mengakui, dulu Radius pernah punya peran dalam sejumlah pengadaan barang di Peruri. Kinerja Radius memasok barang ke Peruri sangat lancar dan tak pernah wanprestasi. "Dia sangat profesional dan tak ada aturan yang dilanggar," ujarnya.

Adapun Marlan menolak berkomentar. "Saya sudah pensiun. Lagi pula saya sedang menunggui ayah berusia 92 tahun yang sedang sakit," katanya kepada *Tempo* pekan lalu. Begitupun Radius. Saat dimintai konfirmasi, Radius menampik semua tuduhan. "No comment. Semua cerita itu *ngaiour*," ujarnya di Jakarta pekan lalu.

Upaya meminta penjelasan lebih detail dari Radius belum berhasil meski *Tempo* sudah mendatangi kantornya di Askomindo. "Pak Radius sudah lama tidak masuk kantor, katanya sedang di luar negeri," ujar seorang petugas keamanan. *Tempo* dijanjikan untuk bertemu dengan seorang dari manajemen Askomindo bernama Hendro. Tapi tak satu pun yang mau menampakkan diri.

Dalam *Tempo* edisi 19 Maret 2007, Marlan dan Radius mengakui pernah bermain golf bersama. "Dia sering ikut bermain golf dengan kami," kata Marlan. "Golf suka, tapi sekali-sekali," kata Radius ketika itu. Tapi dia mengaku sudah berhenti sejak tujuh tahun lalu. Dia membenarkan informasi telah memasok kertas, komputer, jaringan listrik, sampai mesin sortir ke Bank Indonesia, tapi tidak banyak di Peruri. "Di BI proyeknya lumayan, Peruri cuma sedikit," katanya.

Padjar Iswara, Ferry Firmansyah, Agus Supriyanto, Febriyan

beran jika Peruri selalu memilih tinta dari Siepa Group—produsen tinta uang terbesar di dunia yang berkantor satu kota dengan Giori di Swiss, Lausanne. Padahal Peruri memiliki sendiri Bagian Pembuatan Tinta (Batanta).



Radius pengusaha ulet dan sukses. Perusahaannya banyak menyebar di berbagai daerah di Tanah Air. "Sedikitnya dia punya 37 perusahaan," kata sumber *Tempo*. Bidangannya beragam, mulai perusahaan pemasok perangkat lunak komputer, perusahaan data dan telekomunikasi, hingga properti serta perhotelan. "Swiss-Bell Hotel Bali Aga di Nusa Dua milik Radius," ujar dia. Pada 2004, PT Aneka Spring Telekomunindo (Astel), perusahaan milik Radius, membeli PT Sisindosat Lintasbuana senilai Rp 40 miliar dari PT Indosat Tbk. Semula Radius ingin mempertahankan nama Sisindosat, tapi ditentang oleh karyawan Indosat. Salah satu pejabat senior Indosat, Ade

Raffi, paling keras menentang penggunaan nama Sisindosat. Radius mengalah dan mengganti nama Sisindosat menjadi Sisindokom Lintasbuana. Kepada *Tempo*, Ade, yang sudah mundur dari Indosat, tak membantah, tapi juga tak mengiyakan cerita ini. "Nantilah akan saya jelaskan," ujarnya.

Radius supel dan mudah bergaul. Alhasil, dia dekat dengan para pejabat Peruri, seperti Direktur Logistik Marlan Arif dan pejabat Bank Indonesia lainnya. Radius senang bermain golf bersama pejabat bank sentral dan Peruri. Salah satu lapangan golf favor-

Radius berada di balik keputusan manajemen Peruri memilih mesin cetak uang dari Koenig & Bauer Aktiengesellschaft-Giori senilai Rp 339,89 miliar.



Proses pemotongan uang kertas di Peruri, Karawang.

dugaan suap ini menguap begitu saja. Ketika isu itu muncul, juru bicara PT Pura, Hasan Aoni Aziz, menyatakan keberatan mutu kertasnya dipersoalkan. "Peruri sendiri sudah menyetujui kertas kami lewat hasil uji laboratoriumnya," katanya (*Tempo*, 15 Januari 2001).

Pada 2006, ketika Bank Indonesia menunjuk perusahaan asing, antara lain Giesecke & Devrient dari Jerman dan De La Rue dari Inggris, sebagai produsen uang kertas pecahan Rp 2.000 dan Rp 20 ribu, isu suap juga muncul. Kemenangan perusahaan itu mengundang protes karena saat itu baru saja keluar peraturan pemerintah yang menyatakan pencetakan uang harus dilakukan di dalam negeri oleh Peruri.



Cetak Rupiah Rawan Rasuah

PROYEK pencetakan uang rupiah selalu saja ramai masalah. Mulai lelang yang tak transparan, persetujuan Bank Indonesia dengan pabrikan uang, hingga isu suap. Satu sengketa terjadi pada 2000, tatkala PT Pura Barutama, pabrik kertas uang di Kudus, Jawa Tengah, menang tender pengadaan kertas untuk uang pecahan Rp 1.000 dan Rp 5.000.

Satu Deputi Gubernur Bank Indonesia, ketika itu, dituduh menerima dana dari Pura Barutama lantaran memuluskan tender kertas uang 400 juta bilyet itu. Persoalan ini menyeruak gara-gara korespondensi perusahaan pencetakan uang internasional, Crane & Co., dari Amerika Serikat, dan Portals Group dari Inggris. Kedua perusahaan itu mencurigai adanya kolusi lantaran bank sentral memenangkan Pura Barutama, yang belum terbukti kualitasnya.

Salah satu surat yang dikirim William G. Westervelt, International Sales Manager Crane & Co., kepada Bambang Sudibyo, Menteri Keuangan saat itu, serta sejumlah deputi gubernur Bank Indonesia, terang-terangan menyatakan Pura Barutama belum memenuhi syarat pabrik kertas uang modern. Pabrik milik Jacobus Busono itu bahkan dikatakan belum pernah mencetak kertas uang satu kilogram pun. "Saya minta Bank Indonesia mempertimbangkan kembali, dan membuka keseluruhan tender secara legal dan transparan," demikian surat itu.

Sayang, klaim perusahaan asing itu baru terbukti setahun kemudian. PT Percetakan Uang Republik Indonesia, yang bertugas mencetak uang, tak bisa bekerja karena kertas Pura Barutama tak bisa dicetak dengan baik. "Kertasnya berdebu dan hasil cetakannya jadi melengkung karena kertasnya keriting," kata sumber di Peruri, menceritakan pengalamannya kepada *Tempo*, awal bulan lalu.

Akibatnya, peredaran uang sempat terganggu. Namun

Tindakan ini menimbulkan dugaan adanya makelar asing yang bermain dalam tender.

Jejak makelar itu kemudian terendus pada Maret lalu, tatkala media Jerman memberitakan dugaan suap Ferrostaal AG, pemasok produk Giesecke and Devrient. Perusahaan itu dituduh mengucurkan suap hingga 240 juta euro, atau sekitar Rp 3 triliun, untuk kepentingan bisnisnya di beberapa negara, antara lain di Indonesia. Jejak Ferrostaal di Indonesia tercium lewat peranan Michael Groos, pimpinan cabang perusahaan itu, yang memasukkan kertas uang Louisenthal dan mesin sortasi produksi Giesecke and Devrient (*Tempo*, 3 Mei 2010).

Danang Widoyoko, koordinator Indonesia Corruption Watch, mengatakan proyek pengadaan barang strategis semacam mata uang memang rawan penyimpangan. Sebab, sifatnya cenderung tertutup, dan seluruh kebijakan dilakukan lewat satu pintu, yakni Bank Indonesia. Pemain bisnis *security printing* juga sedikit. "Kadang order sengaja diarahkan, dan di sinilah muncul suap."

Toni Iskandar Pandelaki, Sekretaris Perusahaan Peruri, mengatakan tuduhan suap tak selamanya relevan dan terbukti. Peruri, menurut Toni, pernah mengalami tuduhan semacam ini ketika menang tender pencetakan uang dan paspor di Nepal dan Sri Lanka. "Para pesaing itu menuduh tanpa menunjukkan bukti," katanya.

Namun tak tertutup kemungkinan penyimpangan terbesar dilakukan para agen perantara. Toni mengatakan berperan penting, terutama untuk menembus informasi tender. "Untuk jasa itu memang ada *fee*," katanya. Ini yang kemudian menjadi celah kebocoran. Sumber *Tempo* mengatakan para makelar ini kerap bermain tanpa dikendalikan.



yang masih rendah tidak memungkinkan bergaul rapat dengan para petinggi di kantornya. Dia membutuhkan tangan lain untuk menggerakkan pejabat di atasnya. Ia pun mengenalkan Alif dengan Maruli Pandapotan Manurung, atasannya.

Menurut Gayus, Marulillah yang meminta pembentukan tim khusus untuk memeriksa tindakan Kantor Pajak Gambir menyandera surat ketetapan pajak PT Kaltim. Maruli beberapa kali bertemu Gayus dan Alif di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, sebelum tim Dirjen Pajak bergerak. Surat ketetapan pajak PT Kaltim Prima Coal akhirnya terbit setelah tim Maruli turun tangan langsung.

Untuk keperluan ini, menurut Gayus, PT Kaltim mengeluarkan setidaknya US\$ 2,5 juta melalui Alif Kuncoro. Ia mengaku menerima US\$ 500 ribu, Alif mendapat jumlah yang sama, dan Maruli memperoleh US\$ 1,5 juta. Semua diserahkan di tempat parkir Hotel Peninsula. "Uang yang saya terima saya simpan dulu di rumah, kemudian setelah beberapa bulan saya setor ke BCA dan Panin," kata Gayus, seperti dituturkan sumber *Tempo*.

Sampai akhir pekan lalu, Maruli tak bisa ditemui. Sejumlah sumber *Tempo* memastikan pegawai pajak ini sudah diperiksa polisi, meski belum ditetapkan menjadi tersangka. Fendy Dharmasaputra, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Gambir ketika itu, menolak

Pertambangan Kaltim Prima Coal di Sangata, Kutai Timur.



berkomentar. "Ini terkait dengan rahasia jabatan," katanya. "Dan lagi, kasusnya sedang dalam pemeriksaan yang berwajib." Walhasil, patgulipat seputar surat ketetapan pajak PT Kaltim ini memang baru klaim sepihak Gayus.

KOMPLOTAN Gayus kemudian memuluskan persoalan pajak yang melibatkan PT Bumi Resources. Masih pada 2008, pria berkepala pelontos ini diminta mengurus proses banding Bumi atas penetapan pajak dari pemerintah. Jika kalah, biduk utama armada kelompok Bakrie itu harus membayar ekstra sampai Rp 100 miliar. Order ini lagi-lagi datang dari Alif Kuncoro dan adiknya, Imam Cahyo Maliki.

"Alif meminta saya membuat surat banding, surat bantahan, dan diminta berkoordinasi dengan panitera pengadilan pajak, untuk memenangkan Bumi Resources," kata Gayus dalam pengakuannya kepada polisi. Kon-

"Semua tuduhan itu tak berdasar, kami menolak semua pernyataan bernada miring seperti itu."

DILEEP SRIVASTAVA
JURU BICARA PT BUMI RESOURCES

sep surat banding dan surat bantahan itu dia ketik di kantornya sendiri, lantai 18 gedung Direktorat Pajak, Kementerian Keuangan.

Untuk memenangkan sang klien di pengadilan, Gayus juga tak bisa bermain sendiri. Maruli jelas tidak bisa dipakai karena order kedua ini membutuhkan akses dan keahlian berbeda. Dengan cerdas, Gayus menghubungi Idris Herawan, panitera pajak Majelis 10 Pengadilan Pajak. "Saya kenal dia pada saat ikut sidang di sana," kata Gayus. Kehadiran di pengadilan pajak memang bagian dari tugas Gayus sebagai pegawai penelaah banding.

Pada suatu malam, Alif datang membawa US\$ 500 ribu ke apartemen Gayus. Ia juga menitipkan uang dalam jumlah yang sama buat panitera, Idris. Gayus menemui sang panitera di sela-sela istirahat sidang. "Saya menyampaikannya ada pekerjaan banding PT Bumi dan minta tolong agar dia mengantar sampai beres. Idris menyanggupi," tuturnya kepada polisi. Duit dolar pun disodorkan ke Idris di tempat parkir bawah tanah gedung pengadilan pajak di daerah Senen, Jakarta Pusat. Tak sampai tiga bulan, pengadilan pajak memenangkan banding PT Bumi Resources.

Idris, yang dihubungi pekan lalu membantah semua tuduhan Gayus. "Tidak ada dan tidak tahu," katanya melalui pesan pendek di telepon seluler.





TEMPO/OMAS ARYO

Dia juga menolak keterangan Gayus yang menyatakan Idris menerima US\$ 500 ribu. Ia mengirim pesan: "Saya tidak pernah menerima apa pun."

Gayus kemudian juga masih sempat membantu dua perusahaan Grup Bakrie, PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia, buat menyiapkan surat pemberitahuan pajak pembetulan. Proyek ketiga ini datang menjelang penerapan *sunset policy*, yakni kebijakan Direktorat Pajak untuk menghapus semua sanksi administrasi pajak, pada 2008.

Gayus lalu *ngebut* memperbaiki surat pemberitahuan pajak terutang pajak penghasilan di kedua perusahaan itu. Ketika itu, dia mendapat akses penuh atas data laporan keuangan dan pembukuan Kaltim Prima dan Arutmin. "Saya tahu tindakan saya tidak bisa dibenarkan," kata Gayus ketika diperiksa penyidik.

Kuasa hukum Gayus, Pia Akbar Nasution, menyatakan otentik semua dokumen pemeriksaan Gayus yang diperoleh *Tempo*. Namun dia menolak berkomentar atas isinya.

●●●
GAYUS dan Alif kawan lama. Mereka saling mengenal sejak lima tahun lalu dan biasa bertemu di bengkel mobil milik Alif di Jalan KH Abdullah Syafiq 50, kawasan Casablanca, Jakarta Se-

latan. Salah satu mobil Gayus, sebuah Mercedes C180 hitam, dibeli dari Alif Rp 200 juta. "Saya diperkenalkan seorang kawan pada 2005," kata Alif dalam pemeriksaan polisi.

Alif tak melulu pengusaha otomotif. Ketika *Tempo* menemuinya pada pertengahan Maret lalu, dia mengaku terus terang bahwa bisnisnya ada di segala medan. "Orang bilang saya pengusaha 'palugada', apa *lu* mau *gua* ada," katanya terkekeh. Sayangnya, ketika hendak dibesuk di tahanan Mabes Polri pekan lalu, Alif menghindar. "Klien saya trauma," kata pengacaranya, Rachmat Ruslan.

Dua tahun setelah berkawan dengan Alif, Gayus berkenalan dengan adik Alif, Imam Cahyo Maliki. Imam adalah seorang auditor keuangan lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Rawamangun, Jakarta Timur. Terakhir, dia bekerja di Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta dan Mustofa. Namun, sejak 1999, dia memutuskan berwirausaha sendiri. Dia menjadi auditor keuangan lepas untuk sejumlah perusahaan.

Dua bersaudara inilah yang mempertemukan seorang eksekutif perusahaan Bakrie dengan Gayus. Kebetulan, salah satu wakil presiden bidang keuangan (*vice president finance*) di PT Bumi Resources, Denny Adrianz, adalah mantan kolega Imam di PT Sunkyoung-Keris, sebuah perusahaan tekstil patungan In-

donesia-Korea. Pada awal 2008, ketika Denny kelimpungan mencari pegawai Direktorat Pajak yang bisa membantu mengurus masalah pajak perusahaannya, Imam datang menawarkan bantuan.

Pucuk dicita ulam tiba. Kemunculan Gayus Halomoan Tambunan bagai malaikat penyelamat. "Waktu itu Denny ingin tahu bagaimana mekanisme permohonan keberatan pajak untuk perusahaan dia, Bumi Resources," kata Imam dalam pemeriksaan polisi.

Menurut Gayus, dia selalu menemui Denny Adrianz bersama kakak-adik Alif-Imam. Mereka pernah makan siang bersama di restoran hotel berbintang di Ibu Kota seperti Four-Seasons dan Ritz-Carlton, Kuningan. Dalam semua pertemuan itu, Denny tak pernah secara terbuka memberikan fulus. Pembayaran semua order Bumi Resources, menurut Gayus, selalu datang dari tangan Alif.

Adapun Denny Adrianz sampai akhir pekan lalu belum bisa ditemui. *Tempo* menunggui kantornya di lantai 7 Wisma Bakrie II, Kuningan, Jakarta Selatan, tanpa hasil. Surat permohonan wawancara yang dikirim pun tak berbalas. Wenny, sekretaris pribadi Denny, menyatakan bosnya rapat di luar kantor. "Belum tahu," katanya ketika ditanya kapan Denny kembali.

Rekayasa pajak yang dilakukan kom-



TEMPO/AGUS NOVANSARI

plotan Gayus memang direncanakan matang agar sulit dilacak. Imbalan untuk mereka selalu dibayar tunai di muka. Selain itu, transaksi selalu dilakukan di tempat yang jauh dari keramaian dan tak pernah melibatkan lebih dari dua orang.

Untuk proyek perdananya, membantu penerbitan surat ketetapan pajak PT Kaltim Prima Coal, misalnya, Gayus mendapat US\$ 500 ribu, yang dibayar di depan. Menurut Gayus, atasannya, Maruli, kebagian lebih besar, US\$ 1,5

juta. Paket duit tunai itu diserahkan Alif kepada Maruli dan Gayus di *basement* Hotel Peninsula, Slipi, setelah rapat mereka rampung.

Begitu juga untuk proyek kedua: pemenangan Bumi Resources di pengadilan pajak. Gayus menerima US\$ 500 ribu tunai yang dibawakan Alif langsung ke apartemen Gayus di Cempaka Mas, bersama berkas-berkas lain yang dibutuhkannya. Jumlah yang sama diserahkan ke Alif.

Juru bicara PT Bumi Resources,

Edward Arintonang memberikan keterangan

Dileep Srivastava, membantah keterangan Gayus tentang sa pajak perusahaan Bakrie. "Tuduhan itu tak berdasar," katanya. "Kami menolak semua pernyataan miring seperti itu."

Dileep menegaskan, semua keuangan, termasuk pajak perusahaannya, selalu diurus dengan transparan dan bisa langsung ditilik. "Kemenangan kami di Mahkamah Agung membuktikan status pajak tak bermasalah," ujarnya. Dia ada motif tertentu di balik cerita penyuapan ini. "Terdapat suatu, karena cerita-cerita ini tak lama setelah kami menang di Pengadilan Pajak."

Polisi masih terus menelusuri aliran dana Gayus. Sumber *Tempo* di pengadilan menegaskan, semua orang disebut Gayus sudah diperiksa saksi. Namun belum ada yang bisa dikaitkan menjadi tersangka.

Juru bicara Mabes Polri, Letnan Jenderal Edward Arintonang, mengatakan ada aliran dana dari Gayus ke pengadilan pajak. Namun dia belum melihat nama tiga perusahaan Bakrie di daftar perusahaan tersangka bermain mata dengan Gayus.

Wahyu Dhyatmika, Oktamandya Dwidjo Utomo Maksum

Rahmat Ruslan: Alif Hanya Pemilik Bengkel

GAYUS tak berhenti berkisah. Dalam pemeriksaan pada April lalu, pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu mengaku menerima duit dari "mengutak-atik" tiga perusahaan Grup Bakrie—PT Bumi Resources, PT Kaltim Prima Coal, dan PT Arutmin. Dia menyebut kakak-adik Alif Kuncoro dan Imam Cahyo Maliki sebagai orang yang menyetero uang dari perusahaan kakap tersebut kepadanya. Meringkuk di tahanan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Alif menolak ditemui wartawan. Kepada Dwidjo U. Maksum dari *Tempo*, Jumat pekan lalu, Rahmat Ruslan, pengacara Alif, menjelaskan posisi kliennya dalam sengkaret ini.

Alif tak bersedia dimintai konfirmasi, mengapa?

Dia masih trauma. Dia tak ingin masalah ini jadi polemik.

Benarkah Alif mengirimkan uang dari PT Bumi Resources dan PT Kaltim Prima Coal kepada Gayus?

Gayus berhak "nyanyi" apa saja, tapi itu semua tidak benar.

Apa peran klien Anda sebenarnya?

Nanti kita buktikan di pengadilan. Alif sekarang tersangka dan ditahan. Sedangkan Imam Maliki tidak ditahan karena hanya jadi saksi.

Di mana Imam sekarang? Apakah bisa ditemui?

Dia sedang menenangkan diri. Mohon maaf.

Kepada penyidik, Gayus detail menjelaskan sepak terjang Alif....

Biarkan saja Gayus *ngomong* apa saja. Mereka hanya teman biasa. Gayus sering datang ke bengkel Alif.

Apa kaitan Alif dengan PT Kaltim Prima Coal? Betulkah Alif bekerja untuk perusahaan itu?

Itu yang membuat kami dan keluarga Alif ketawa. Alif memang dia bekerja di sana, mengapa tak tercatat di dokumen sumber daya manusia? Apa mudah masuk ke perusahaan seperti itu?

Klien Anda hanya perantara?

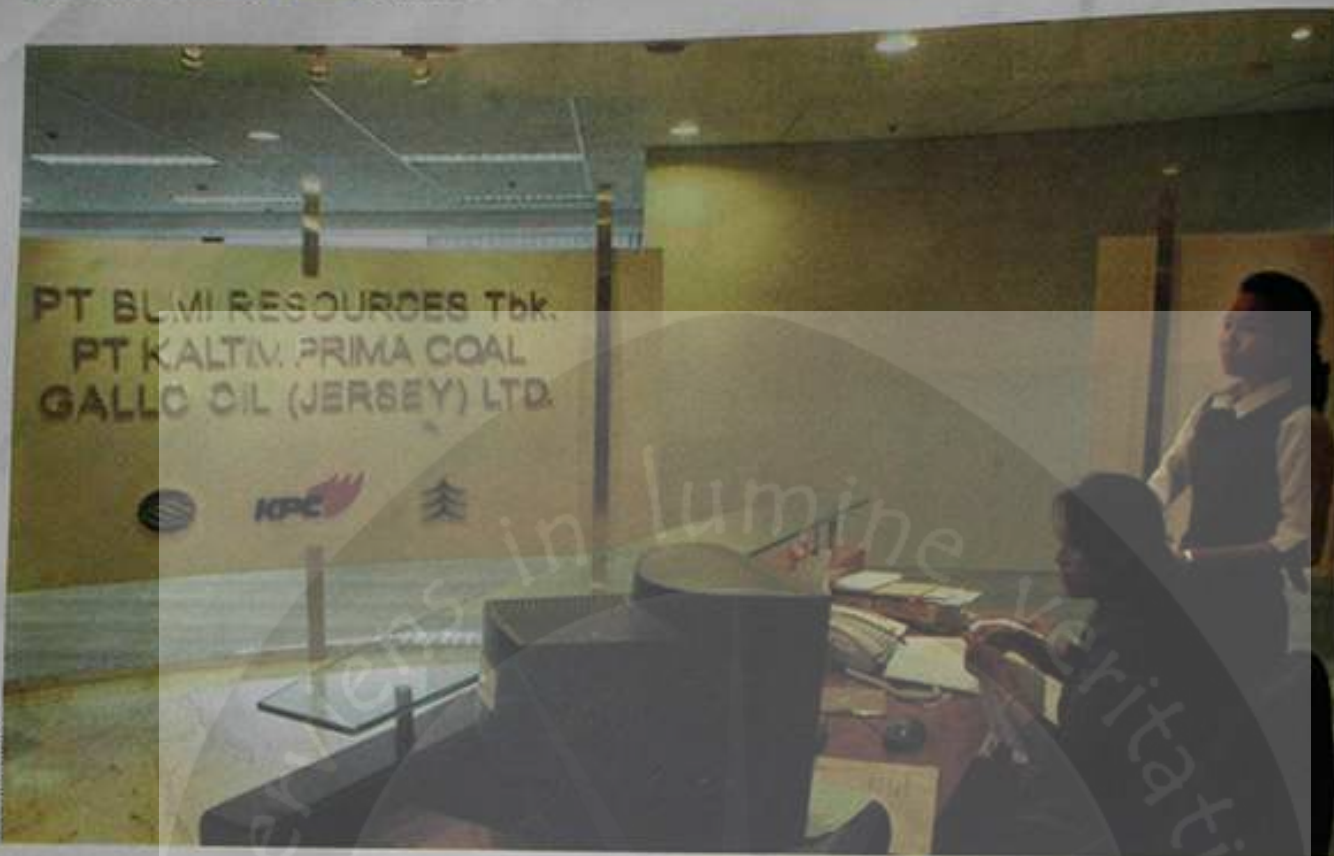
Bukan. Alif itu hanya pemilik bengkel. Tiap hari bolak-balik dari rumah ke bengkel. Tak mungkin Alif jadi perantara. Saya kan sepupu Alif. Saya tahu semua tentang Alif.

Gayus dan Alif sudah pernah dipertemukan?

Mereka pernah bertemu, kok, sewaktu sidang kasus Arafat (penyidik Polri yang disebut-sebut juga pernah menerima suap Gayus—*Réd.*). Gayus kelihatan malu. Alif juga malu.

Anda membantah klien Anda terlibat?

Gayus kan hanya omong. Tak ada bukti. Jadi, lihat nanti di pengadilan.



Kantor PT Bumi Resources Tbk., PT Kaltim Prima Coal, dan PT Gallo Oil (Jersey) di Jakarta.

Gayus Tambunan saat tiba di gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta (kanan).

Paket Hemat Pajak Batu Bara

Pengakuan Gayus Tambunan membongkar kiat perusahaan batu bara milik Bakrie berkelit dari pajak.

GAYUS Halomoan Tambunan melunasi janjinya. Di depan pengacara senior Adnan Buyung Nasution yang menemui di rumah tahanan Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri, Jumat, 3 April lalu, dia "bersumpah" membuka terang-benderang kasus yang melilitnya.

"Akan saya bongkar semua," katanya seperti ditirukan Pia Akbar Nasution, putri Adnan Buyung, kepada *Tempo*, Jumat pekan lalu. Menurut Pia, komitmen Gayus ditetapkan sebagai prasyarat agar ia bisa didampingi Kantor Hukum Adnan Buyung Nasution & Partners.

Lalu patgulipat menggansir uang negara lewat pajak itu pun terbongkar. Di depan penyidik Direktorat III Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri, pemilik rekening Rp 28 miliar ini mengaku pernah "menggarap" perkara pajak tiga perusahaan batu bara milik Grup Bakrie.

Awal 2008, manajemen PT Kaltim Prima Coal (KPC) sedang dilanda persoalan besar. Surat ketetapan pajak periode 2001-2004 tak kunjung diterbit-

kan Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar di Gambir, Jakarta Pusat.

Menurut pengakuan Gayus, pangkal soal adalah tidak adanya kata sepakat antara petugas pajak dan KPC tentang penetapan nilai kurs dalam penentuan nilai pajak.

Sumber *Tempo* di Direktorat Jenderal Pajak mengatakan KPC sangat berkepentingan mendapatkan surat tersebut. Sebab, jika tak kunjung datang, perkara pajak yang saat itu tengah diteliti tim pemeriksa Direktorat Jenderal Pajak bisa berlanjut menjadi bukti permulaan untuk masuk tahap penyidikan. "Kalau ini terjadi, KPC dijerat pasal pidana," katanya.

Bergulirnya kasus pajak ke ranah pidana menjadi momok menakutkan karena bisa bergulir ke pengadilan yang menjebloskan jajaran direksi perusahaan ke penjara. Pilihan lain, jika ingin diselesaikan di luar pengadilan, wajib pajak harus membayar denda 400 persen dari nilai pajak ditambah pokok. "Itu yang dihindari KPC," kata sumber tadi.

Soal berapa nilai pajak KPC yang diurus Gayus, Pia Nasution tak bersedia mengkonfirmasi. "Itu sudah masuk ma-

teri pemeriksaan," katanya.

Namun seorang penyidik polisi memperkirakan tunggakan pajak KPC selama empat tahun mencapai Rp 3 triliun. "Dalam prakteknya, *fee* untuk makelar itu satu persen dari nilai pajak," ujarnya.

Gayus bergerak cepat. Lewat jaringannya, dua tim yang dibentuk Inspektoral Jenderal Departemen Keuangan dan Direktorat Peraturan Pajak turun tangan "membantu" KPC. Langkah ini berbuah manis: KPC mendapatkan surat ketetapan pajak yang telah lama diimpikan.

Setelah menggarap KPC, Gayus mendapat *gawean* baru. Tak kalah rumit, lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada 2006 ini mendapat "amanah" memainkan proses banding PT Bumi Resources Tbk., di pengadilan pajak. Tiga tugas besar yang telah dititahkan: menyiapkan surat banding, membuat surat bantahan, dan berkoordinasi dengan panitera untuk memenangkan Bumi.

Langkah Bumi meminta banding bermula dari keputusan Direktorat Jenderal Pajak menolak keberatan nilai pajak badan dan pajak penghasilan untuk tahun buku 2005. Bumi menilai angka pajak yang mesti dibayar terlalu besar. Menurut aturan, wajib pajak boleh me-



TEMPO/SUBEKTI

minta banding ke pengadilan pajak.

Pilihan meminta Gayus turun tangan untuk kasus ini tepat. Sebagai petugas penelaah keberatan di Direktorat Keberatan dan Banding, sehari-harinya Gayus memang berkutat dengan kasus di pengadilan pajak.

Dalam proses sidang banding di pengadilan pajak, Gayus mengaku tidak perlu banyak turun tangan: dia hanya sesekali datang di ruang sidang. Permainan toh bisa dikendalikan dari luar. Berkat Gayus, banding yang diajukan Bumi dikabulkan pengadilan pajak.

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Firdaus Ilyas, mencium bau tak sedap dalam upaya banding pajak Bumi ini. Menurut dia, dalam laporan keuangan 2005 jumlah pajak yang dibayar perusahaan itu Rp 548 miliar, lebih rendah daripada 2004 yang Rp 619 miliar.

"Penurunan itu janggal," katanya. Sebab, sepanjang 2005 terjadi kenaikan penjualan yang dipicu melonjaknya harga batu bara di pasar dunia. "Setoran pajak seharusnya naik, bukan malah turun."

"Persembahan" lain Gayus bagi Grup Bakrie terjadi menjelang akhir 2008. Kepada polisi, Gayus mengaku diminta membuat surat pemberitahuan pajak pembetulan PT Arutmin Indonesia dan KPC untuk periode 2005-2006. Untuk kerja ini, dia diberi imbalan US\$ 2 juta.

Dua perusahaan ini membutuhkan tangan dingin Gayus untuk merapikan laporan keuangan agar bisa menikmati program *sunset policy*. Program *sunset policy* yang digulirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini memberikan kesempatan wajib pajak membetulkan SPT tahun 2007 dan tahun sebelumnya

agar bisa lolos dari sanksi administratif.

Tangan dingin Gayus kembali manjur. Kerja kerasnya membuahkan hasil: dua perusahaan ini bisa ikut program *sunset policy*, yang berakhir pada 31 Desember 2008. Kepada penyidik polisi, Gayus menyatakan bahwa pekerjaannya menggarap laporan keuangan dua perusahaan Bakrie tidak berhubungan dengan tugas pokoknya di Direktorat Jenderal Pajak.

Dileep Srivastava, juru bicara Bumi Resources, yang juga membawahkan KPC dan Arutmin, membantah semua keterangan Gayus. "Semua tuduhan tentang status pajak dan dugaan pengurusan pajak yang menyalahi aturan itu tak berdasar," katanya.

Dia menegaskan, sebagai perusahaan terbuka, semua laporan keuangan termasuk pajak perseroan selalu diurus dengan transparan dan bisa langsung dinilai oleh publik.

Pelaksana tugas Direktur Intelijen dan Penyelidikan Direktorat Jenderal Pajak Pontas Pane mengaku tidak bisa berbuat banyak. Kata Pontas, lembaganya tak lagi memiliki wewenang memeriksa wajib pajak badan usaha yang pernah diperiksa dan diputuskan sengketanya di pengadilan pajak. "Administrasinya sudah pindah ke pengadilan pajak," kata Pontas. "Kalau ada suap, kepolisian yang menangani."

Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi berjanji tidak akan mengabaikan keterangan Gayus itu. "Kami akan memeriksa semua pihak yang disebut Gayus," katanya.

Setri Yasra, Dwidjo U. Maksum, Oktamandjaya Wiguna, Nalia Rifika, Rieka Rahardiana



Lalu Mara Satriawangsa:

Dia Menuduh, Dia Harus Membuktikan

GAYUS Halomoan Tambunan menyeret tiga perusahaan Grup Bakrie. Menurut pegawai golongan IIIa Direktorat Pajak tersangka korupsi dan pencucian uang itu, PT Bumi Resources, PT Kaltim Prima Coal, dan PT Arutmin Indonesia menggelontorkan dana US\$ 7 juta buat membereskan persoalan pajak mereka. Sebagian, yakni US\$ 3 juta, masuk kantong Gayus.

Juru bicara keluarga Bakrie, Lalu Mara Satriawangsa, 45 tahun, membantah semua omongan Gayus kepada polisi itu. "Semua tidak benar," katanya kepada wartawan *Tempo*, Oktamandjaya Wiguna, Jumat pekan lalu.

Perusahaan Grup Bakrie tersangkut lagi kasus pajak...

Pak Ical (sapaan Aburizal—Red.) secara pribadi tidak pernah ada masalah dengan pajak. Beliau telah lama memiliki nomor pokok wajib pajak. Begitu juga perusahaan beliau yang sudah berkontribusi besar dalam pendapatan negara di bidang perpajakan. Keputusan Mahkamah Agung yang memenangkan PT Kaltim Prima Coal membuktikan pajak kami tak ada masalah (MA pada 24 Mei lalu menolak permohonan peninjauan kembali Dirjen Pajak dalam sengketa mengenai laporan pajak Kaltim Prima pada 2007 yang dinilai tak beres—Red.).

Tapi Direktorat Jenderal Pajak menial laporan Bumi dan unit bisnisnya bermasalah?

Yang memungut pajak tahu aturan dan yang dipungut juga tahu aturan. Perusahaan (milik keluarga Bakrie) sebagai wajib pajak ya membayar apa yang harus dibayar, tapi kalau yang tidak harus dibayar, masak harus dibayar? Pajak itu kan instrumen fiskal, bukan instrumen politik.

Gayus menyatakan pernah membantu membereskan persoalan pajak perusahaan Bakrie, termasuk ikut mengurus banding kasus pajak Bumi?

Bumi itu perusahaan publik, dan saya kira semua perusahaan publik punya konsultan pajak yang teregistrasi.

Ada eksekutif perusahaan Bumi yang meminta bantuan Gayus mengurus pajak?

Semua karyawan perusahaan milik Bakrie menjunjung tinggi prinsip profesionalisme. Perusahaan bisa bertahan lama karena semua karyawannya menjunjung tinggi profesionalis-

"Bumi perusahaan publik yang arus kasnya jelas dan proses audit keuangannya juga jelas."



me. Itulah kenapa perusahaan ini akan bertahan 100 tahun lagi. Pak Ical juga sangat percaya pada kompetensi para profesional yang mengelola perusahaannya

Kepada penyidik Gayus bercerita diberi imbalan sekitar US\$ 3 juta?

Saya sudah membaca itu dan semua itu tidak benar. Bumi perusahaan publik yang arus kasnya jelas dan proses audit keuangannya juga jelas.

Gayus juga menyatakan beresnya perkara pajak Bumi karena uang tadi sudah dialirkan ke pengadilan pajak ataupun kantor pajak?

Dia harus membuktikan itu. Dia yang menuduh, maka dialah yang harus membuktikan.

Anda yakin dalam pengurusan pajak Bumi dan unit bisnisnya tak ada penyimpangan?

Soal detail pengurusan pajak harus ditanya ke Bumi, saya tidak bisa

mengomentari hal itu. Yang jelas, perusahaan-perusahaan Bakrie adalah perusahaan publik yang transparan. Laporan keuangan yang disampaikan per kuartal itu juga selalu melewati proses audit oleh auditor independen terdaftar. Selama ini enggak ada masalah, semua *clear*.

Bagaimana keluarga Bakrie melihat permasalahan Gayus ini?

Pak Ical sudah menyampaikan langsung kepada publik bahwa semua tuduhan pajak atas dirinya dan perusahaannya tidak benar. Yang penting sekarang, seperti beliau sampaikan, jalankan saja semuanya dengan baik.

Keluarga Bakrie akan menuntut Gayus?

Capeklah kami kalau begitu. Pakal asas praduga tak bersalah saja. Pokoknya, dia yang menuduh, maka dialah yang harus membuktikan, bukan kami yang direpotkan.



PESTA BOLA

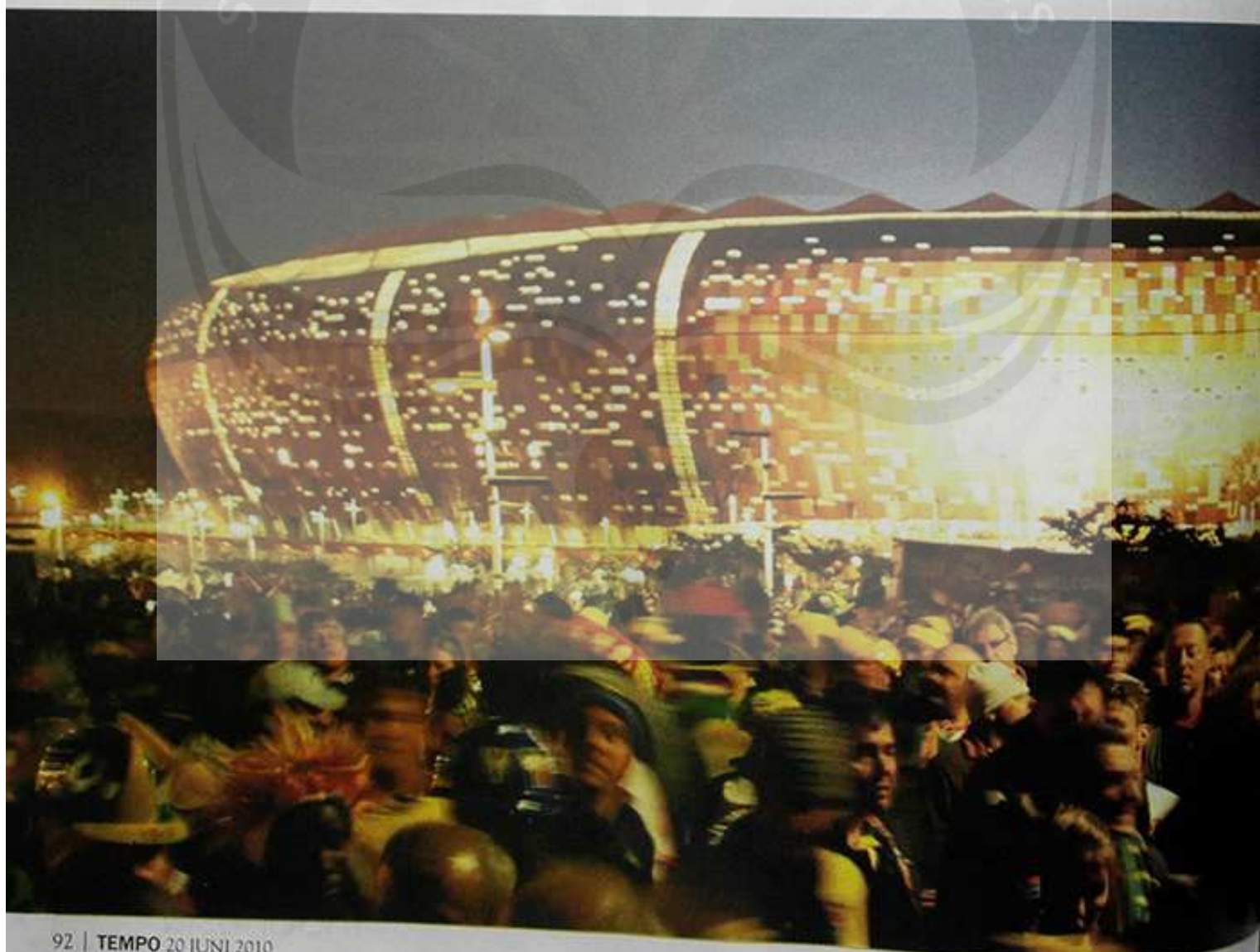
BERTABUR FULUS



Putaran final Piala Dunia Afrika Selatan 2010 dimulai. Seperti sukses penyelenggaraan empat tahun lalu, panitia berharap meraup keuntungan puluhan triliun rupiah. Penduduk setempat tak ketinggalan mengais rezeki dari pesta kulit bundar ini.

RABU pekan lalu, hari dua kereta cepat Gauteng beroperasi. Setelah dipiloti sebelas ribu orang dalam perjalanan perdananya, ke lima gerbong itu tampak lebih lapang. Penumpang bisa leluasa memilih tempat duduk. Dengan kecepatan 160 kilometer per jam, mendekati laju pesawat ketika menyentuh landasan, jarak 100 kilometer dari Bandara Internasional Oliver Reginald Tambo menuju Johannesburg, pusat bisnis Afrika Selatan ditempuh hanya dalam lima menit.

Di dalam kereta yang sejuk, dilapisi jok biru yang mulus dan empuk, perjalanan terasa terlalu cepat. Toshiyuki, yang duduk bersebelahan dengan wartawan lepas asal Jepang, Osamu Yoshiyuki, tak sempat berbincang panjang. "Nyaman, tak beda dengan Narita Express," kata Osami, membandingkan Gautrain dengan moda



di negerinya. Simon Scott, warga Amerika Serikat yang datang untuk mendukung tim nasionalnya, malah menyebut, "Gautrain lebih baik dibanding kereta di negeri saya."

Dalam hitungan bulan, Afrika Selatan, terutama Johannesburg dan kota-kota yang ditunjuk menjadi penyelenggara pertandingan Piala Dunia 2010, berubah total. November lalu, ketika *Tempo* berkunjung untuk meneliti kesiapan negeri itu menjadi tuan rumah, taksi yang menjadi moda transportasi dari bandara harus menempuh jalan berlalu penuh macet hingga dua jam. Sarana angkutan kota yang biasanya sudah berganti bus dan taksi bus bergambar pemain atau bendera nasional negeri itu.

Gautrain jadi salah satu kebanggaan negeri di kutub benua hitam itu. "Ini adalah aset untuk beberapa generasi ke depan," kata Gubernur Gauteng, Nomvula Mokonyane. Kereta cepat ini yang

pertama di Afrika, membuat negara itu sejajar dengan Prancis, Jepang, dan Amerika Serikat dalam hal perkeretaapian. Dari sekian banyak proyek menjelang Piala Dunia, pembangunan jalur kereta ini menjadi tolok ukur kesiapan Afrika Selatan untuk menyelenggarakan pesta empat tahunan itu.

Dibandingkan dengan proyek lainnya, Gautrain menyedot dana paling besar, 26 rand atau sekitar Rp 31 triliun. Sesungguhnya, pembangunan jalur kereta cepat yang sebagian besar menyusur perut bumi ini sudah direncanakan sejak sepuluh tahun silam, dan baru akan selesai tahun depan. Terpilihnya Afrika Selatan sebagai tuan rumah Piala Dunia membuat pemerintah mempercepat proyek itu. Kereta ini memang menjadi pintu gerbang bagi orang asing, sehingga mereka mendapat kesan tentang Afrika Selatan yang modern.

Di pusat kota, pendatang akan di-

sambut keriuhan Piala Dunia. Poster para pemain bintang, dan tentu saja—yang paling mendominasi—adalah poster yang berisi gambar serta dukungan terhadap tim nasional Afrika Selatan. Banyak bangunan, terutama yang menjadi pusat keramaian, tak ketinggalan bersolek, mulai sekadar mengganti cat hingga renovasi besar-besaran. Siang hari menjelang partai pembuka pada Jumat pekan lalu, suara *vuvuzela*, trompet khas negeri itu, terdengar riuh-rendah di jalan.

Kemeriahan semakin tampak di Stadion Soccer City, tempat pembukaan. Stadion berkapasitas 95 ribu penonton itu dipenuhi pendukung tuan rumah yang mengenakan kaus kuning, warna baju tim nasional. Suara trompet tak putus-putus. Upacara pembukaan diwarnai tarian khas Afrika, dan dimeriahkan artis-artis Afrika Selatan dan negara Afrika lainnya. Bila ada yang kurang, tak lain absennya Bapak

AFRPHOTO/EUGENE HOSHIKO/MARCO SANCHEZ





Para pekerja memasang banner raksasa menyambut Piala Dunia 2010 di Johannesburg.

Bangsa Nelson Mandela, yang tengah berduka karena cicitnya tewas akibat kecelakaan, malam sebelum pembukaan.

Zurich, 8 Mei 2004. Di markasnya, Presiden FIFA Sepp Blatter mengumumkan hasil pemungutan suara komite eksekutif lembaga itu, yang menunjuk Afrika Selatan sebagai tuan rumah. Afrika Selatan memang tak tertahankan, unggul 14-10 suara dari pesaing terdekatnya, Maroko. Tak ada calon dari benua lain, karena aturan perputaran tuan rumah Piala Dunia dari satu benua ke benua lain—peraturan ini baru dicabut pada 2007. Afrika Selatan sebelumnya pernah melamar jadi tuan rumah Piala Dunia 2006, tapi kalah atas Jerman.

Dua tahun setelah keputusan itu, mulai Juni hingga November 2006 Kementerian dan Komite Keuangan Kongres Afrika Selatan menggelar sebelas kali rapat. Kedua lembaga itu sepakat mengucurkan Rp 20 triliun dari surplus tahun fiskal 2006/2007 sebesar Rp 35 triliun, guna mendanai penyelenggaraan Piala Dunia. Belakangan—antara lain karena krisis—dana yang dikucurkan pemerintah melonjak hingga Rp 46 triliun. Angka ini belum termasuk biaya pembuatan Gautrain yang sudah disetujui dananya setahun sebe-

lumnya.

Pembuatan stadion dan sarana transportasi menjadi proyek besar yang memicu geliat perekonomian negeri itu, yang sempat sempoyongan diserempet krisis keuangan global yang berasal dari Amerika Serikat. Dari sepuluh stadion yang diusulkan untuk pertandingan Piala Dunia, lima adalah stadion baru. Gelontoran uang yang demikian besar untuk aneka proyek infrastruktur, belum termasuk proyek swasta seperti membangun atau renovasi hotel, menyerap 70 ribu tenaga kerja.

Badan statistik Afrika Selatan melaporkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini naik 4,6 persen. Salah satu pendorongnya adalah pembangunan infrastruktur yang disebut. Angka ini melampaui prediksi bank sentral, yang mematok 3,7 persen, serta melonjak tajam dibanding rata-rata pertumbuhan 2009 sebesar 1,8 persen. Dengan optimisme itu, ekonom senior IHS-Global Insight, Ronel Oberholzer, optimistis pertumbuhan tahun ini mencapai 3,1 persen. "Kami terbantu oleh belanja pemerintah untuk Piala Dunia," katanya.

Selain angka-angka pertumbuhan itu, pemerintah berharap puluhan tri-

DANA YANG DIKUCURKAN PEMERINTAH MELONJAK HINGGA RP 46 TRILIUN.

liun duit yang diguyurkan segera kembali. Kementerian Pariwisata memproyeksikan sedikitnya 500 ribu peacandu bola dari penjuru dunia akan memenuhi setiap stadion. Mereka diperkirakan akan membelanjakan uang hingga Rp 9 triliun. Konsultan investasi TradeInvest South

Africa bahkan memprediksi jumlah uang yang masuk dari luar selama berlangsungnya Piala Dunia akan mencapai Rp 23 triliun, dan membuka 300 ribu lapangan kerja musiman.

Pemerintah dan panitia penyelenggara memang berharap pesta sepak bola terbesar sejangat ini akan menjadi sukses penyelenggaraan terdahulu di Jerman 2006. Ketika itu keuntungan yang diperoleh mencapai Rp 28 triliun. Keuntungan terbesar, sekitar Rp 14 triliun, berasal dari hak siar televisi. Panitia di Jerman juga mendapatkan Rp 1 triliun dari penjualan hak pemasangan logo Piala Dunia. Jumlah ini dua kali lipat dibanding pemasukan dari penjualan tiket. "Kami yakin bisa mendapatkan keuntungan lebih besar," kata Danny Jordaan, ketua penyelenggara Piala Dunia 2010.

Tak kalah penting adalah keuntungan jangka panjang dari sukses pe-

pengorganisasian Piala Dunia. Turnamen sepak bola terbesar ini merupakan event terbesar yang berlangsung di Afrika. Sampai kini tidak satu pun negara di benua itu yang pernah menyelenggarakan Olimpiade atau Piala Dunia. Sukses Piala Dunia akan meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Afrika Selatan. "Investor tidak akan ragu menanamkan uangnya di negeri ini," kata Goolam Ballim, ekonom Standard Bank Afrika Selatan.

Piala Dunia tak cuma berkah bagi pemerintah dan panitia penyelenggara. Buruh bangunan seperti Genard Mkele sudah kecipratan rezeki jauh sebelum pertandingan pembuka. Ia berkulit legam ini adalah penjual bendera di perempatan Langermanne di Kensington, Johannesburg. Semangat dan dukungan terhadap tim nasional Afrika Selatan ditunjukkan dengan membeli bendera yang dijual Genard Rp 20 ribu hingga Rp 150 ribu.

Para penjual bendera sudah berseliaran di tiap perempatan sejak Mei lalu. Hampir tak ada bangunan atau mobil yang melintas tanpa menempelkan bendera. Bila pembeli ramai, Genard membawa pulang Rp 850 ribu per hari. "Lebih baik dari upah kuli bangunan. Saya akan berjualan sampai Piala Dunia selesai, semoga rezeki terus mengalir," katanya. Pertandingan pembuka antara tim tuan rumah dan Meksiko pun menjadi ajang yang digemakan Genard untuk menjual bendera di luar stadion.

Para penanggung untung juga bertebaran di pusat belanja, termasuk Mall Sandton di Kensington Selatan. Di sana banyak toko yang tiba-tiba beralih menjadi penjual merchandise Piala Dunia, kebanyakan kaus peserta dan syal. Banyak toko memilih tetap pada jualannya, tapi menyediakan pernik Piala Dunia. "Penjualan meningkat sejak Mei lalu," kata Nishan, kasir toko pakaian, yang biasa menjual pigura.

Bagi yang punya vila, Piala Dunia seperti durian runtuh. Clinton Braude, pemilik vila di tepi pantai Cape Town, mengantongi Rp 9 miliar setelah menandatangani kontrak dengan agen penyewaan properti. "Vila saya akan dipakai sejumlah selebritas yang akan menonton pertandingan," kata Braude. Ya, para pemilik vila dekat lokasi pertandingan memang menjadi incaran penonton berkantong tebal, bahkan sejumlah tim nasional.



Kereta Gautrain saat uji coba di Johannesburg.

Pedagang bendera-bendera peserta Piala Dunia 2010.



Tingginya tingkat kriminalitas juga menjadi lahan subur bagi penyedia jasa pengawalan. Menjelang Piala Dunia, DK Management Consultants di Johannesburg merekrut 45 pengawal yang rata-rata bekas anggota tentara dan polisi. "Bisnis kami meningkat dua kali lipat karena kedatangan orang-orang penting dari luar negeri," kata Kyle Condon, pemilik DK. Tarif seorang pengawal bersenjata per hari berkisar Rp 5 juta. Di negeri dengan angka pembunuhan 50 orang per hari itu, terdapat 6.400 penyedia jasa pengawalan.

Kriminalitas memang menjadi sorotan, bahkan menjadi ganjalan untuk mendatangkan lebih banyak turis yang membawa devisa. Tapi pesta sudah dimulai. Bak menumpang Gautrain yang deras, waktu sebulan akan terasa sangat singkat. Lupakan sejenak hitung-hitungan untung-rugi penyelenggaraan Piala Dunia! Warga Afrika Selatan hingga kini mungkin masih menyesali sontekan bola Katlego Mphela pada menit akhir yang menabrak tiang, sehingga skor partai pembuka melawan Meksiko berakhir 1-1.

Adek Media, Nurdin Saleh (Johannesburg)



Fery Wiraatmadja,
Direktur Komersial
Electronic City
Entertainment.

Electronic City
pemegang hak siar
Piala Dunia 2010.

Acara nonton bareng
(kanan).

Berlomba Kaya dari Piala Dunia

Lisensi penyiaran Piala Dunia di Indonesia seharga lebih dari setengah triliun rupiah. Pengusaha besar dan kecil ingin menangguk untung dari pesta akbar di planet ini.

KESIBUKAN Putri Anisa menjelang Piala Dunia meningkat. Ibu dua anak ini menerima semakin banyak pesanan membuat kaus. "Ada kafe yang memesan kaus bertema tim nasional Jerman dan Brasil untuk karyawannya," kata perempuan 27 tahun ini. Padahal sehari-hari ibu rumah tangga ini hanya membuat kaus lucu untuk anak-anak. "Lumayanlah, rezeki Piala Dunia," ujar perempuan berjilbab ini.

Rezeki Piala Dunia tak semata dinikmati Putri. Entitas bisnis berbagai level menenggak nikmatnya bisnis dari perhelatan pesta sepak bola terbesar di planet bumi ini. Mereka antara lain pedagang jadwal Piala Dunia di persimpangan jalan raya, pedagang kaus tim nasional di Tanah Abang, hingga perusahaan raksasa sekelas PT Electronic City Entertainment (ECE) dan PT Rajawali Citra Televisi Indonesia.

PT Electronic City Entertainment adalah perusahaan yang memegang li-

seni resmi penyiaran Piala Dunia di Indonesia. Ini pertama kalinya perusahaan nonpenyiaran berhasil memperoleh lisensi. Sebelumnya, Piala Dunia 2006 dibeli SCTV, 2002 dipegang RCTI, dan pada 1998 oleh RCTI dan SCTV. "Kami sudah lama mengincar lisensi penyiaran Piala Dunia," ujar Direktur Komersial ECE, Fery Wiraatmadja.

Lisensi penyiaran adalah satu dari empat lisensi Piala Dunia yang dijual FIFA atau federasi sepak bola internasional. Tiga lainnya adalah lisensi pembuatan *merchandise* yang dikuasai Global Brand, lisensi *new media* dipegang PT Asean Multimedia Interactive Network, dan lisensi *hospitality* di tangan Ticket Station. Para pemegang lisensi berusaha mengecerkkan hak menguasai itu guna menggelembungkan laba.

Global Brand, misalnya, menjual hak mendistribusikan berbagai pernik Piala Dunia kepada PT Indomarco Pris-

matama, yang menaungi jaringan ritel market Indomaret (lihat "Zukami dan Afrika Kidul"). Electronic City menjual dan bekerja sama dengan RCTI dan GlobalTV untuk menyiarkan langsung pertandingan dari Afrika Selatan. Selain mengharuskan RCTI membayar pola kerja samanya berupa pembagian pendapatan iklan, "Tentu bagian kami lebih besar," kata Fery.

Selain menjual hak siar ke televisi terestrial seperti RCTI dan GlobalTV, Electronic City mengecerkkan hak penyiaran lainnya. Untuk siaran berbasis satelit kepada Matrix, dan penyiaran audio atau radio kepada MNC Networks. Sedangkan izin *public viewing* dijual ke berbagai entitas bisnis yang mengadakan *nonton bareng* Piala Dunia. "Pokoknya, semua *nonton bareng* yang berbau komersial harus membeli izin dari kami. Saat ini sudah ada 1.200 yang mendapat izin," kata Fery.

PT Grand Indonesia, yang mengoperasikan Grand Indonesia Jakarta, adalah salah satu yang membeli izin menyelenggarakan *nonton bareng*. Menurut Manajer Humas Grand Indonesia, Teguh P. Soraya, pembelian izin itu bekerjasama dengan para penyewa mitra, terutama yang bergerak di bidang



TEMPO/UNO WISARDI

and beverages. "Kami ingin tenant bisa menyelenggarakan *nonton* bareng. Soalnya pertandingannya masih pada jam *late mall*," ujar Teges.

ECE bersikap tegas dalam hal izin yang harus diperoleh penyelenggara *nonton* bareng komersial. Selain membuat pengumuman di media massa, ECE menyebarkan "intel" untuk memantau tempat-tempat *nonton* bareng yang tidak mengantongi izin. "Kami sudah menyekamnya di 33 kota besar," kata Chief Operating Officer ECE, Ernita Tanti.

ECE siap memperkarakan pihak yang melanggar aturan lisensi eksklusif tersebut guna meminimalkan potensi kebocoran pendapatan.

Mengecahkan izin dari lisensi yang dibeli secara eksklusif merupakan hal yang wajar, mengingat besarnya fulus yang dikeluarkan ECE untuk membeli lisensi itu. "Kami membayar lebih dari setengah triliun rupiah," kata Fery, yang pada awalnya tidak ingin menyebut nilai atau harga lisensinya. Nilai ini jauh lebih besar daripada Piala Dunia sebelumnya. Pada 2006 SCTV membelinya seharga US\$ 10 juta (sekitar Rp 100 miliar), dan pada 2002 RCTI harus mengeluarkan US\$ 5 juta.

Jalan panjang harus ditempuh ECE untuk mendapatkan lisensi penyiaran tersebut. Ketertarikan ECE membeli lisensi eksklusif dimulai sejak 2006. Ketika itu mereka membidik lisensi siaran langsung Liga Premier Inggris,

tapi kalah. Berikutnya mereka mengarahkan minat ke Piala Eropa 2008 dan masih gagal. Ketika FIFA membuka penawaran lisensi penyiaran Piala Dunia, ECE memastikan ikut.

Pesaing ECE dari Indonesia juga memasukkan tawaran. "Ada sekitar enam perusahaan pesaing kami," kata Fery. Ia mengaku tidak mengetahui siapa saja pesaingnya karena penawaran dilakukan tertutup. Pemberitahuan pemenang diterima ECE melalui surat elektronik sekitar Mei 2007. Pesta merayakan kemenangan digelar di Hotel Borobudur, Jakarta. Penandatanganan kerja sama baru dilakukan pada 27 Juli 2007.

Menurut Fery, ECE bisa menang tender karena duit dan kredibilitas perusahaan. "Kami menyerahkan pohon grup kami punya bisnis penyiaran," ujarnya merujuk pada *JakTV*. Selain itu, ECE menyewa agen di Eropa yang bisa melobi FIFA yang berkantor di Zurich, Swiss.

Pada awalnya Electronic City sempat ragu mengikuti *bidding* lisensi Piala Dunia. "Kami kaget. Kok, gede banget, sampai lima kali lipat dibanding harga 2006," kata dia. Namun, setelah berembuk keras, keputusan final pun diambil. "Tidak ada sejarahnya, penyiaran Piala Dunia merugi," kata dia.

Senior Manager Produksi *SCTV* Roni Kusuma mengakui hal tersebut. Pada penyelenggaraan siaran langsung Piala Dunia 2006, *SCTV* membukukan laba.

"Masih ada untung lumayanlah," kata Roni, yang enggan membocorkan besaran keuntungan. Peningkatannya jelas berasal dari iklan. Hasil riset The Nielsen Company Indonesia menunjukkan belanja iklan meningkat signifikan. Belanja iklan selama Piala Dunia pada Juni 2006 Rp 2,9 triliun, sebulan sebelumnya Rp 2,5 triliun.

Geliat ekonomi efek Piala Dunia tak hanya di tingkat korporasi. Sektor informal seperti Putri Anisa juga menikmati. Menurut survei Nielsen, penjualan produk konsumsi seperti camilan, minuman ringan, minuman suplemen (*energy drink*), kopi, dan rokok akan turut meningkat. "Bisa sampai 31 persen," kata Steve Mitchell, Managing Director Nielsen.

Helmi, salah satu pedagang kelontong di Kebayoran Lama, Jakarta, mengatakan peningkatan penjualan kopi dan camilan di warungnya bisa meningkat dua kali lipat. "Banyak yang begadang, banyak acara *nonton* bareng," kata pria 35 tahun itu. Untuk itu, ia telah mempersiapkan warungnya dengan membeli lebih banyak stok dagangan.

Menurut survei Nielsen pada 2006, beberapa produk yang penjualannya meningkat adalah kacang (72 persen), rokok (37 persen), minuman penambah energi (35 persen), makanan ringan (28 persen), dan minuman ringan (19 persen).

Di balik derasnya arus uang selama Piala Dunia, ada sisi lain yang dibidik para pemegang lisensi, yakni menaikkan pamor. Menurut Roni Kusuma, keuntungan uang bukanlah yang utama. "Yang penting adalah persepsi *brand* kami di masyarakat," katanya.

Fery membenarkan apa yang dikatakan Roni. Electronic City, kata dia, juga membutuhkan ajang untuk lebih mengenalkan perusahaannya kepada masyarakat luas. Sebelumnya, Electronic City bergerak pada bidang hiburan panggung, seperti mengadakan konser Linkin Park, Craig David, dan Beyonce Knowles. Film *Denias*, *Senandung di Atas Awan* juga merupakan salah satu karya yang dipromotori ECE, bekerja sama dengan Alenia Production.

Pengalaman pertama memegang lisensi siaran Piala Dunia ini tak disia-siakan ECE. Berbagai hal baru dikreasikan demi mencetak reputasi. Di antaranya 665 jam siaran, 1.300 acara *nonton* bareng, mengadakan *soccer revolution* di 1.000 sekolah, dan menyebar 100 kios *merchandise*. "Kami juga ingin Piala Dunia dinikmati secara luas," ujar Ernita Tanti.

**DANA YANG
DIKELUARKAN ECE
UNTUK MEMBELI
LISENSI LEBIH DARI
RP 500
MILIAR.**

Tito Sianpar, Harun Mahbub



Pernak-pernik Piala Dunia 2010 Afrika Selatan di salah satu gerai Indomaret, Jakarta.

Zukami dari Afrika Kidul

Miliaran rupiah peluang bisnis menanti pengusaha lokal selama pesta bola sejangat.

BELASAN kaus bergambar macan tutul berambut hijau sedang menggiring bola berjejer rapi pada lemari gantung di gerai Garasi Djawa, Jalan Kelinci AJ/5, Solo, Jawa Tengah. Sepintas gambar di kaus itu mirip dengan Zakumi, mascot Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Eit, hanya sepintas. Macan tutul ini ternyata berblangkon dan berkain batik. Namanya pun bukan Zakumi, melainkan Zukami dari Afrika Kidul.

Itulah kaus pelesetan Piala Dunia 2010 produksi Adaideaja.Tbk—"Tukang Bikin Kaos"—milik Wahyu Liez Sundoro. Di Garasi Djawa, pria kelahiran 29 tahun lalu itu menjual empat macam desain kaus pelesetan Piala Dunia bermerek Tomat. Mantan anggota tim kreatif Dagadu Jogja (produsen kaus ternama di Kota Gudeg) ini juga memanfaatkan dunia maya untuk menjual kreasinya. Di laman *kaospialadunia.wordpress.com*, satu kaus ditawarkan Rp 65 ribu.

Wahyu tak berani menampilkan Zakumi di kausnya lantaran takut melanggar hak cipta. "Saya buat dalam bentuk lain saja," ujarnya kepada *Tempo* pekan lalu. Sejak Desember tahun lalu, lulusan Jurusan Kimia Universitas Gadjah Mada ini sudah berhasil men-



jual seribu kaus Zukami—tiga kali lipat dari biasanya.

Piala Dunia 2010 memang membawa berkah ekonomi, tidak hanya bagi Afrika Selatan selaku tuan rumah dan negara-negara yang masuk putaran final, tapi juga bagi Indonesia, yang tak mampu meloloskan tim sepak bolanya ke sana. Turnamen sepak bola dunia empat tahunan ini memberikan peluang bisnis bagi para pengusaha lokal, terutama usaha kecil dan menengah. Kesempatan meraup fulus, ya itu tadi, salah satunya memproduksi dan memasarkan pernak-pernik dan souvenir bergambar Zakumi.

Pada Piala Dunia kali ini, lisensi pernak-pernik dan suvenirnya—termasuk Zakumi—dipegang oleh Global Brands Group (Inggris). Di Indonesia, Global Brands memilih PT Indomarco Prisma, pemilik gerai minimarket In-

domaret, untuk memasarkan pernak-pernik Piala Dunia Afrika Selatan. Perti boneka Zakumi, kaus, bola, pembungkus telepon seluler, kartu pemantik korek api, celengan, tas, bolpoin, gantungan kunci, botol minuman, dan buku tulis. Harganya mulai Rp 10 ribu sampai Rp 150 ribu. "Kami dipilih karena jaringan tokonya paling banyak dibanding ritail lain," kata Direktur Pemasaran Indomarco Prisma, Ma Laurensius Tirta Widjaja. Indomaret punya 4.000 minimarket di seluruh Indonesia.

Khusus buku tulis, kaus, dan bola minuman dipasok oleh pengusaha lokal. Selebihnya dipasok dari Vietnam dan Cina. Indomaret, kata Laurensius, menargetkan penjualan pernak-pernik Piala Dunia senilai Rp 100 miliar. "Penjualan hampir mencapai 50 persen dari target."

Toh, penjualan produk-produk tak resmi tetap saja sulit dibendung. Terlepas dari legal atau ilegal, Piala Dunia 2010 memang kesempatan emas meraup untung bagi orang-orang kreatif. Dhesy, ibu rumah tangga asal Gresik Jawa Timur, misalnya, memproduksi dan memasarkan kaus, pin, mug, dan boneka Zakumi lewat Internet. Pembelinya kebanyakan dari luar Jawa, seperti Medan, Padang, dan Riau. Kaus dan boneka Zakumi dibandrol Rp 80 ribu per buah, mug Rp 40 ribu, dan pin Rp 8.000, belum termasuk ongkos kirim. "Sampai saat ini, sudah 300 produk terjual," kata Dhesy.

Cipratan rezeki Piala Dunia Afrika Selatan juga dirasakan Sinjaraga Santika Sport, produsen bola di Desa Lingsung, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka. Usaha milik Irwan Suryanto ini kebanjiran pesanan bola sejak akhir tahun lalu. Mitranya di Eropa memesan dua juta bola untuk souvenir pesta bola sejangat ini. Tapi mantan pelatih tenis itu hanya bisa memasok satu juta bola. "Kebetulan ajangnya bertepatan dengan masa panen dan masa tanam. Jadi banyak pekerja yang tidak bisa masuk," katanya.

Irwan memang bukan orang baru dalam bisnis bola Piala Dunia. Sejak Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat, ia telah memasok bola. Tahun ini, Irwan bisa meraup penjualan hingga Rp 200 miliar. Tentu saja, warga Desa Lingsung juga ikut mencicipi gurihnya bisnis Piala Dunia ini.

Nieke Indrietta, Iansyah (Cebu)



Pesta di Afrika, Untung di Eropa

Keuntungan finansial Piala Dunia 2010 lebih banyak dinikmati di Eropa. Itu karena FIFA kaku dalam menerapkan aturan hak pemasaran.

KAWAT baja berukuran jumbo melengkung sepanjang 350 meter di atas lapangan Stadion Moses Mabhida, Durban, Afrika Selatan. Lengkungan tertinggi 106 meter dari lapangan rumput. Kawat itu merupakan jalan bagi mobil kabel yang bisa membawa pengunjung dari sisi utara stadion ke titik tertinggi. Di sanalah, pada awal bulan ini, Hubert Nienhoff berada untuk melakukan pengecekan terakhir sebelum stadion itu digunakan sebagai venue Piala Dunia.

"Sungguh mengejutkan, kami ternyata mampu menyelesaikannya tepat waktu meski tempo pengerjaannya sangat *mepet*," kata Nienhoff, arsitek senior dari Gerkan, Marg and Partners (GMP), perusahaan konstruksi yang berbasis di Berlin, Jerman. Puas, pembangunan kelar tak lewat tenggat. Lebih puas, fulus melimpah masuk ke kantong perusahaan.

GMP adalah salah satu dari beberapa kontraktor yang menikmati gurihnya uang US\$ 8,4 miliar (hampir Rp 77,5 triliun) yang diguyurkan pemerintah Afrika Selatan untuk Piala Dunia. Sebagian besar dana itu habis untuk membangun lima stadion baru dan renovasi lima stadion lama serta pembangunan infrastruktur lain.

Sekitar sepekan setelah Nienhoff melakukan pengecekan terakhir itu, Moses Mabhida menjalani fungsi utama pertamanya. Takdir menyenangkan bagi Nienhoff dan rekan-rekan GMP-nya, penjal pertama "stadion mereka" adalah tim Jerman, yang melakukan partai perdana di Grup D melawan Australia, Sabtu pekan lalu.

Nienhoff seperti menyediakan "rumah" bagi tim nasional negaranya. Dua "rumah" yang lain juga dia siapkan: Stadion Cape Town dan Stadion Nelson Mandela di Port Elizabeth. GMP terlibat dalam pembangunan tiga dari lima stadion baru. Cape Town dipakai Jerman bila lolos ke perempat final dengan status sebagai juara grup. Namun Nien-

Pembangunan Stadion Soccer City di Cape Town, Agustus 2009.



Liga Asal Pemain



Pendapatan FIFA dari Sponsor

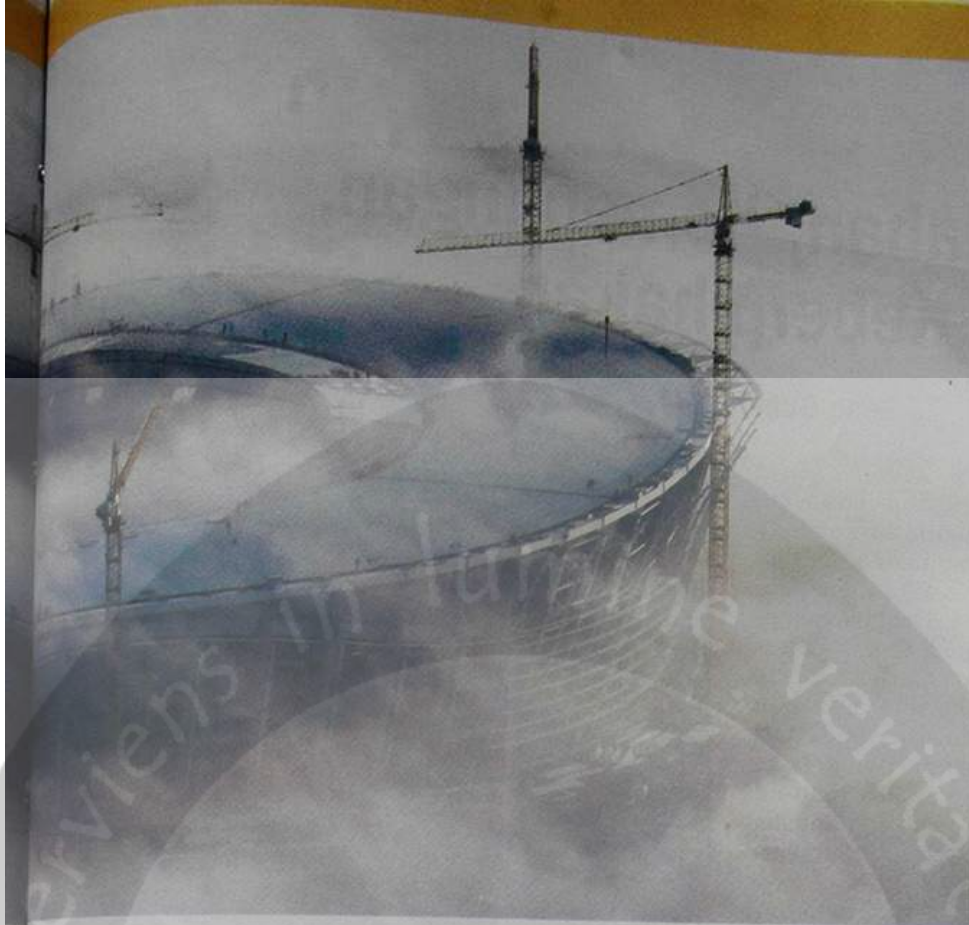
- Partner FIFA**
Adidas, Coca-Cola, Emirates Airlines, Hyundai-Kia, Sony, Visa: membayar **US\$ 24-44 juta per tahun** selama 2007-2014
- Sponsor Piala Dunia**
Anheuser-Busch InBev's Budweiser, BP, Castrol, Continental Tires, McDonald's, MTN, Mahindra Satyam, Seara, Yingli Solar: membayar **US\$ 10-25 juta per tahun** dari 2007-2014
- Sponsor Nasional (Afrika Selatan):**
BP Africa, FNB, Neo Africa, Prasa, Telko: membayar **US\$ 4,5-7,5 juta**

hoff tak berharap Jerman bermain di Nelson Mandela Bay, karena cuma akan berebut tempat ketiga.

Lebih indah bila Der Panzer—jujukan tim Jerman—maju ke partai puncak di Stadion Soccer City, Johannesburg yang salah satu subkontraktornya adalah Birdair-Pfeifer, gabungan perusahaan Amerika-Jerman. Birdair-Pfeifer menjadi subkontraktor dari Murray & Robert, perusahaan konstruksi terbesar dari Afrika Selatan.

Usahawan konstruksi Jerman jeli membaca peluang dengan memanfaatkan momen Piala Dunia 2006, yang berlangsung di negara mereka. GMP, misalnya, melobi delegasi pemerintah Afrika Selatan sejak 2005. Saat itu utusan pemerintah Afrika Selatan bolak-balik ke Jerman untuk melakukan studi banding. Dari sana kontrak Stadion Nelson Mandela Bay dan Cape Town mereka dapat. Adapun kesepakatan tentang stadion Moses Mabhida baru diteken beberapa hari se usai final Piala Dunia 2006.

"Kami bahkan baru mulai membangun Moses Mabhida pada 2007," kata Nienhoff. Kontrak stadion yang diambil dari nama salah satu pejuang apartheid itu mencapai 300 juta euro (sekitar Rp 3,3 triliun). Biaya pembangunan Cape Town tak kurang dari 400 juta euro dan



SOUTH AFRICA SPORT SOCCER

ndela Bay 90 juta euro.

Selain pengusaha Jerman, negara tetangga mereka, Austria, kecipratan resmi Rieder Smart Element mengekskusi 40 ribu meter kubik *fiberglass* non-wahid dari Austria. Dan Valenta Ballbau mengapalkan 100 ribu buah nomor satu.

Sementara pengusaha konstruksi menikmati fulus besar, nasib pekerja asal Afrika justru terpuruk. Banyak dari mereka yang hanya digaji US\$ 5 per pekan, padahal gaji minimum di sana US\$ 200 per bulan. Sekitar 70 ribu pekerja bangunan stadion melakukan aksi demonstrasi pada Juni tahun lalu. Mereka kembali bekerja setelah negosiasi yang berjalan alot.

Boleh saja Menteri Pariwisata Marthinus van Schalkwyk memprediksi Piala Dunia akan berkontribusi menaikkan produk domestik bruto negaranya 7,4 persen. Pengamat internasional pun bisa berpendapat bahwa produk domestik bruto tuan rumah meningkat 0,54 persen. Yang terlihat di depan mata sekarang adalah keuntungan perhelatan akseptor empat tahunan ini bukan milik tuan rumah.

Pemenang utamanya bernama FIFA, Federasi Sepak Bola Internasional. "Piala Dunia sukses besar secara komersial," ujar Sekretaris Jenderal FIFA Jerome Valcke, bangga. "Pendapatan kami meningkat hingga 50 persen dibanding Piala Dunia Jerman 2006." Dalam hitungannya, pendapatan FIFA mencapai

1,65 miliar pound sterling (sekitar Rp 22 triliun). Yang 60 persen berasal dari sponsor, 30 persen dari penjualan hak siar televisi, dan sisanya dari lain-lain, termasuk tiket.

Konsekuensinya, FIFA menerapkan aturan ketat soal hak cipta. Pengusaha gantungan kunci dari Johannesburg bernama Grant Abramhamse, misalnya, menerima surat teguran dari FIFA karena mencantumkan logo pada produknya. Sebuah bar di negeri itu juga menerima surat sejenis gara-gara memasang spanduk ucapan selamat datang kepada pengunjung Piala Dunia di dalam ruangnya. Padahal semua itu ada di teritori Afrika Selatan, sang tuan rumah. FIFA yang bermarkas di Zurich, Swiss, itu telah mengajukan 451 klaim pelanggaran pemasaran "kecil-kecil" semacam itu.

Itulah cara FIFA melindungi para sponsor yang menggelontorkan uang berjibun ke kantong mereka. Salah satu sponsor itu adalah Adidas. Perusahaan aparatel dari Jerman ini menargetkan keuntungan mereka tahun ini lebih dari 1,3 miliar euro (sekitar Rp 14,5 triliun), yang merupakan pendapatan terbesar mereka sebelumnya. Itu terjadi pada tahun pelaksanaan Euro 2008.

Sebagai sponsor resmi, logo Adidas bertebaran di Stadion Moses Mabhida yang dibangun Hubert Nienhoff dan kawan-kawan. Mereka semua orang Jerman.

Andy Marhaendra

ALIRAN JANGGAL REKENING JENDERAL

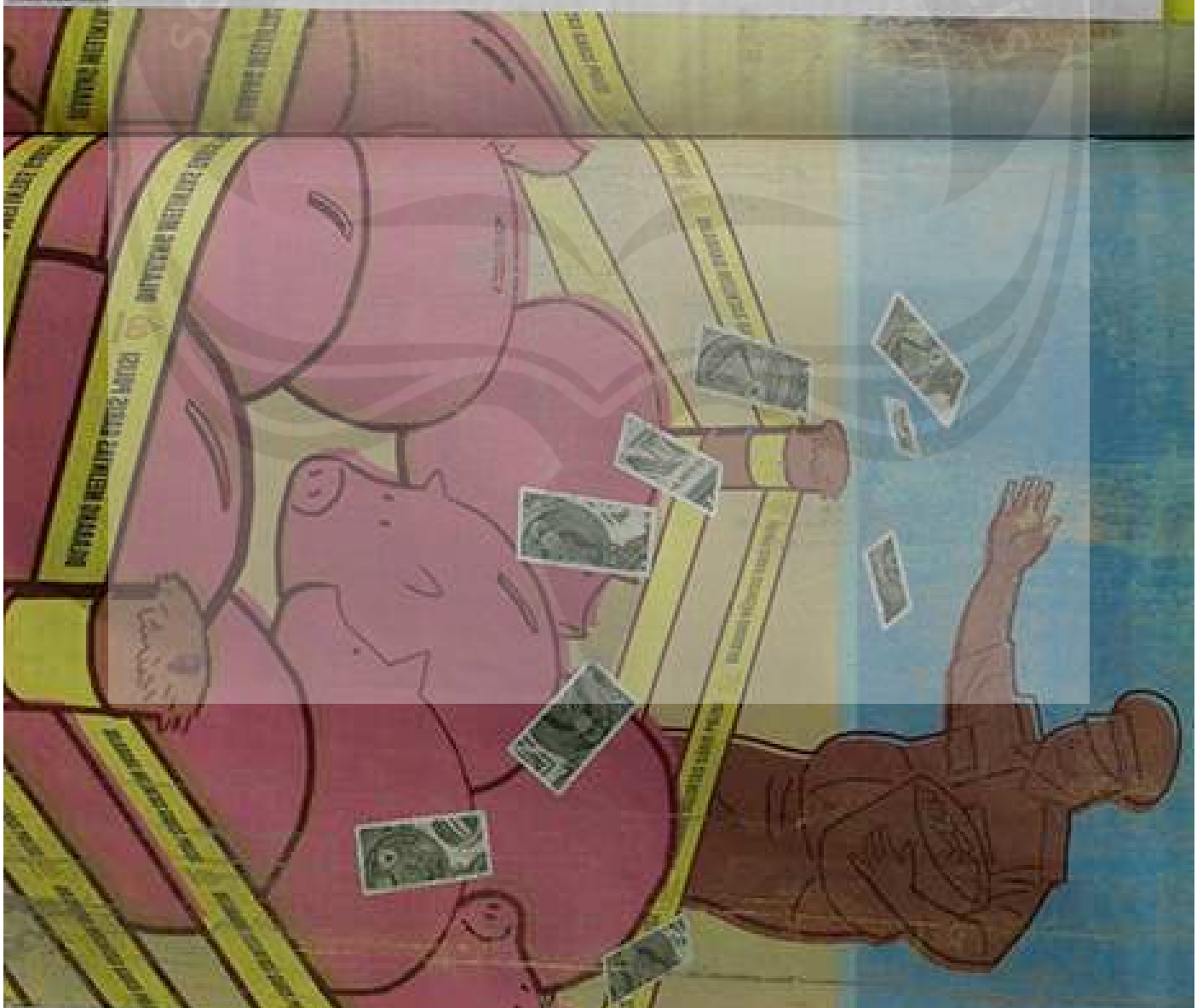
SEJUMLAH PERMIRA TINGGI POLISI DILAPORKAN MELAKUKAN TRANSAKSI MELANGKAN YANG MENJINGKAM, BERSAL DARI SUMBER TAK JELAS, PULIHAN MILIAR DIBELONTORKAN KE REKENING MEREKA. ADA YANG MENYETOR KE ANAK ATAU AJUDAN.

MERATAKAN, ada 12 orang yang diduga melakukan transaksi melangkaan yang menjingkamkan, bersal dari sumber tak jelas, pulihan miliar dibelontorkan ke rekening mereka. Ada yang menyetor ke anak atau ajudan.

Salah satu yang dilaporkan melakukan transaksi melangkaan yang menjingkamkan, bersal dari sumber tak jelas, pulihan miliar dibelontorkan ke rekening mereka. Ada yang menyetor ke anak atau ajudan.

Salah satu yang dilaporkan melakukan transaksi melangkaan yang menjingkamkan, bersal dari sumber tak jelas, pulihan miliar dibelontorkan ke rekening mereka. Ada yang menyetor ke anak atau ajudan.

Salah satu yang dilaporkan melakukan transaksi melangkaan yang menjingkamkan, bersal dari sumber tak jelas, pulihan miliar dibelontorkan ke rekening mereka. Ada yang menyetor ke anak atau ajudan.





TEMPO/NOVI KARTIKA



Inspektur Jenderal
Badrodin Haiti dan
rumahnya di Jalan M.
Kahfi I, Jagakarsa,
Jakarta Selatan

Komisaris Besar Edwan
Syah Pemong (bawah)

Dimintai konfirmasi soal nama-nama jenderal polisi pemilik rekening itu, Ito Sumardi secara tidak langsung membenarkan. Menurut dia, perwira-perwira itu termasuk dalam daftar 21 perwira pemilik rekening mencurigakan. Ia mengatakan telah menerima perintah Kepala Kepolisian Jenderal Bambang Hendarso Danuri buat melakukan klarifikasi terhadap para perwira tersebut. "Ini pembuktian terbalik, jadi menjadi beban mereka untuk menjelaskan asal-usul transaksinya," katanya.

Cerita soal rekening jenderal milik jenderal kepolisian juga pernah muncul pada akhir Juli 2005. Ketika itu, 15 petinggi kepolisian diduga memiliki rekening tak wajar. Termuat dalam dokumen yang diserahkan Kepala PPATK Yunus Husein kepada Jenderal Sutanto, Kepala Kepolisian ketika itu, sejumlah petinggi kepolisian diduga menerima aliran dana dalam jumlah besar dan dari sumber yang tak wajar. Sebuah rekening bahkan dikabarkan menampung dana Rp 800 miliar. Namun kasus ini hilang dibawa angin.

●●●
BANGUNAN itu terlihat paling besar dibanding sekitarnya. Terletak di Jalan M. Kahfi I, Jagakarsa, Jakarta Selatan, satu rumah utama, tiga rumah tambahan, plus satu bangunan untuk petugas keamanan berdiri di tanah seluas 3.000 meter persegi.

Di halaman rumah terpanjang ukiran berbentuk aksara "B" setinggi dua



meter. Air kolam renang yang cukup luas di halaman belakang berkilau memantulkan sinar matahari. Para tetangga menyebut bangunan itu sebagai "rumah Pak Kapolda". Inilah rumah Inspektur Jenderal Badrodin Haiti, yang pernah menjadi Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Badrodin, yang kini menjabat Kepala Divisi Pembinaan Hukum Kepolisian, adalah satu di antara sejumlah perwira yang melakukan transaksi

mencurigakan. Menurut sumber Tempo, Badrodin membeli polis asuransi PT Prudential Life Assurance dengan premi Rp 1,1 miliar. Disebutkan dana tunai pembayaran premi berasal dari pihak ketiga.

Menjadi Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Medan pada 2000 hingga 2003, Badrodin juga menarik tunai Rp 700 juta di Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Bukit Barisan, Medan, pada Mei 2006. Transaksi ini, kata

Ito Sumardi secara tidak langsung membenarkan. Menurut dia, perwira-perwira itu termasuk dalam daftar 21 perwira pemilik rekening mencurigakan.

ber tadi, dinilai "tidak sesuai profilnya". Sebab, penghasilan Badrodin setiap bulan berkisar Rp 22 juta, terdiri atas Rp 6 juta gaji, Rp 6 juta penghasilan dari bisnis, dan Rp 10 juta dari kegiatan investasi.

Hasil analisis rekening Badrodin juga memuat adanya setoran dana rutin Rp 50 juta setiap bulan pada periode Januari 2004-Juli 2005. Ada pula setoran dana Rp 120-343 juta. Dalam laporan itu disebutkan setoran-setoran tidak memiliki *underlying transaction* yang jelas.

Dimintai konfirmasi, Badrodin Haiti mengaku tidak berwenang menjawab. Itu sepenuhnya kewenangan Kepala Badan Reserse Kriminal," katanya. Komisaris Jenderal Ito Sumardi menyatakan timnya masih menunggu sejumlah dokumen pelengkap dari Badrodin.

Keanehan juga terdapat pada rekening Wenas, Bambang Suparno, Mathius Salempang, dan Susno Duadji serta sejumlah perwira menengah. Indikasi di rekening Wenas muncul pada 2005, ketika ia menjabat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. Pada 9 Agustus, isi rekening Wenas mengalir berpindah Rp 10,007 miliar ke rekening seseorang yang mengaku sebagai Direktur PT Hinroyal Golden Wing. Sejak pertama kali membuka rekening, transaksi perbankan Wenas hanya berupa transfer masuk dari pihak lain tanpa ada transaksi usaha (lihat "Rekening dalam Sorotan").

"Profil" Wenas cukup mentereng. Rumahanya di Perumahan Areman Baru, Tugu, mewah, di atas tanah seribu meter persegi. Sejak tiga tahun lalu, keluarga Wenas pindah ke sebuah rumah di Perumahan Pesona Khayangan, Depok. *Tempo*, yang menyambangi rumah Wenas di perumahan elite di Depok, Kamis pekan lalu, melihat dua Toyota Alphard dan satu sedan Toyota Camry terparkir di halaman rumah.

Kepada *Tempo* yang mewawancainya, Wenas menolak tuduhan melakukan transaksi ilegal melalui rekeningnya. "Semua itu tidak benar," katanya. "Dana itu bukan milik saya."

Susno Duadji, yang getol membongkar praktek mafia hukum di institusinya, ternyata juga memiliki transaksi mencurigakan. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri ini disebutkan



Rumah Inspektur Jenderal Mathius Salempang di jalan AIPDA K.S Tubun, Jakarta Barat.

Inspektur Jenderal Sylvanus Yulian Wenas (bawah) dan rumahnya di Kompleks Areman Baru, Tugu, Cimanggis.



menerima kiriman dana dari seorang pengacara berinisial JS Rp 2,62 miliar. Ia juga menerima kiriman dana dari seorang pengusaha berinisial AS dan IZM (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu). Selama periode 2007-2009, Susno telah menerima kiriman fulus dari tiga orang itu Rp 3,97 miliar. Terkait dengan aliran dana ini, Markas Besar Polri telah menetapkan JS sebagai tersangka.

Muhammad Assegaf, kuasa hukum Susno, menyatakan tidak pernah membahas soal transaksi mencurigakan punyanya kliennya. Di berbagai kesempatan sebelum ditahan, Susno berkali-kali membantah melakukan transaksi yang melanggar aturan. "Semua transaksi itu perdata," katanya.

TAK hanya perwira tinggi, transaksi yang membuat mata terbelalak pun dilakukan polisi dengan pangkat di bawahnya. Contohnya Umar Leha, terakhir berpangkat komisaris besar dan

Relasi Mantan Ajudan

Duit mencurigikan Rp 54 miliar masuk rekening Inspektur Jenderal Budi Gunawan. Dianggap tak ada masalah.

pernah 12 tahun bertugas sebagai Kepala Seksi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Samsat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Menurut sumber *Tempo*, Umar pada Juni 2005 memiliki dana Rp 4,5 miliar. Duit disimpan dalam bentuk reksa dana dan deposito di Bank Mandiri. Sumber dana, menurut analisis transaksinya, diduga berasal dari setoran-setoran terkait dengan pengurusan STNK.

Di Makassar, Umar memiliki dua rumah besar dan empat mobil. Dua tahun lalu perwira pertama polisi ini mencalonkan diri dalam pemilihan Bupati Enrekang, Sulawesi Selatan. Untuk itu, ia mengundurkan diri dari kepolisian dengan pangkat terakhir ajun komisaris besar polisi. Pada pemilihan kepala daerah, ia gagal.

Soal tuduhan bermain saat masih berdinis, Umar membantahnya. Dia mengaku tidak pernah mengelola langsung uang negara dari pengurusan STNK. "Apalagi mengambalnya," ujarnya. "Saya benar-benar tidak berani menyalahgunakan amanah itu."

Rekening Edward Syah Pernong, Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang, pun mengundang curiga. Menurut sumber *Tempo*, ketika menjabat Kepala Kepolisian Resor Jakarta Barat, ia menerima setoran Rp 470 juta dan Rp 442 juta pada Agustus dan September 2005 dari Deutsche Bank. Pada 15 September 2005, dia menutup rekening dengan saldo terakhir Rp 5,39 miliar. Edward mempersoalkan asal-usul data itu. "Data itu bohong. Itu fitnah," katanya kepada wartawan *Tempo*. Sohirin, di Semarang, Kamis pekan lalu. Ito Sumardi menyatakan tak mempersoalkan kekayaan Edward. "Dia raja Lampung, kebun sawitnya luas," kata Ito.

Kendati dibantah dari pelbagai penjur, anggota Komisi Kepolisian, Adnan Pandupradja, menilai laporan dugaan transaksi mencurigikan harus mendapat perhatian serius dari Kepala Kepolisian. Tanpa kejelasan pengusutan rekening-rekening itu, kata dia, citra kepolisian akan semakin terpuruk.

Neta S. Pane, Ketua Indonesia Police Watch, mendorong upaya pembuktian terbalik dari perwira yang memiliki rekening mencurigikan. Sebab, ia menyatakan jenderal yang memiliki kekayaan melimpah patut dipertanyakan. Ia menambahkan, "Jika hidup hanya dari gaji, sampai kiamat mereka tidak akan pernah bisa kaya."

Setri Yasra, Wahyu Dhyatmika, Cheta Nilawaty, Tia Hapsari (Jakarta), Abdul Rahman (Makassar)

BELASAN pekerja bertopi proyek kuning hilir-mudik. Matahari mulai turun di area pembangunan Apartemen Tamansari Semanggi, tepat di belakang bioskop Planet Hollywood, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat pekan lalu. Para pekerja sibuk membenahi jalur pedestrian. "Baru sebulan terakhir aktif dikerjakan lagi," kata seorang pekerja tersenyum lebar.

Proyek ini mangkrak lebih dari lima tahun. Bernama awal Apartemen Hollywood Residence, proyek itu tak kunjung selesai dibangun. Mei 2007, ratusan pembelinya melapor ke polisi. Mereka menuduh PT Masindo Lintas Pratama, pengembang proyek itu, menggelapkan dana Rp 200 miliar lebih. Ramai diberitakan, Kepolisian Daerah Metro Jaya berjanji menelisik pengaduan itu.

Lama tak terdengar kabar, Masindo menjadi sumber berita baru. Pada November 2006, perusahaan itu dilaporkan menggelontorkan duit Rp 1,5 miliar ke rekening Herviano Widyatama, putra Budi Gunawan, ketika itu Kepala Biro Pembinaan Karyawan Kepolisian. Budi kini berpangkat inspektur jenderal dan menduduki jabatan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.

Dana itu merupakan bagian dari total setoran senilai sekitar Rp 54 miliar ke rekening Budi Gunawan dan anak lelakinya itu. Indonesia Corruption Watch pekan lalu melaporkan transaksi mencurigikan ini ke Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Akan kami tunggu respons mereka sampai 30 hari ke depan," kata Emerson Yuntho, wakil koordinator organisasi antikorupsi itu.

Budi Gunawan bukan satu-satunya perwira kepolisian pemilik rekening yang mencurigikan. Menurut Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Ito Sumardi, ada 21 perwira yang melakukan transaksi mencurigikan dan dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ke Kepolisian. "Atas perintah Kapolri, kami sudah bentuk tim khusus untuk menyelidiki ini," kata Ito, Jumat pekan lalu.

Ito mengakui rekening Budi menjadi prioritas tim penyelidikan. Sebab, menurut dia, jumlahnya lebih besar dibanding rekening milik perwira lain. Se-



Budi Gunawan dan Apartemen Tamansari Semanggi, Jakarta Selatan (kanan).

lain itu, dugaan transaksi di rekening Budi sudah beredar di masyarakat. Itu sebabnya, ia menyatakan Budi merupakan perwira pertama yang diminta klarifikasi.

Selain Masindo, sebuah perusahaan lain bernama PT Sumber Jaya Indah dilaporkan menyetorkan dana ke rekening Budi Gunawan. Melalui rekening anak Budi, perusahaan itu menggelontorkan hampir Rp 10 miliar.

Sumber Jaya adalah sebuah perusahaan penambang timah yang menguasai 75 hektare lahan tambang di Bangka Belitung. Nama perusahaan sempat jadi berita pada Desember 2007, ketika polisi setempat menyetop 13 truk yang mengangkut timah ilegal milik perusahaan itu. "Saya ingat kasus itu. Penyidikan polisi tidak jelas sampai sekarang," kata Yudho Marhoed, Koordinator Wahana Lingkungan Hidup Indonesia di Bangka Belitung, yang dihubungi pekan lalu.

Dari hasil penelusuran *Tempo*, kedua perusahaan yang disebut-sebut dalam laporan analisis rekening Budi bukanlah perusahaan fiktif. Sumber Jaya Indah, misalnya, terdaftar resmi di se-



Rekening Budi menjadi prioritas tim penyelidik. Sebab, jumlahnya lebih besar dibanding rekening milik perwira lain.

agenda tertentu di balik isu ini. "Mengapa Budi Gunawan saja yang dibidik?" kata salah satu orang dekat mantan Kepala Kepolisian Daerah Jambi itu. Dia juga mengaku heran kenapa kabar ini muncul sekarang, ketika fulus yang diributkan, menurut ia, sudah tak ada lagi di rekening Budi.

Dari semua dokumen laporan hasil analisis dari PPATK yang beredar di publik, memang hanya laporan transaksi mencurigakan di rekening Budi Gunawan yang detail dan runut, lengkap dengan kronologi dan data mengenai pihak-pihak yang diduga terlibat. Orang dekat Budi menduga bosnya diincar karena dekat dengan Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri Komisaris Jenderal Nanan Soekarna. Nanan santer disebut-sebut sebagai salah satu kandidat Kepala Kepolisian, menggantikan Jenderal Bambang Hendarso Danuri yang akan mengakhiri masa tugasnya, Oktober nanti.

Budi Gunawan memilih tutup mulut. Ditemui *Tempo* di kantornya, Jumat pekan lalu, dia hanya tersenyum dan berkomentar pendek, "Nanti saja, ya." Belakangan, lewat seorang bawahannya, Budi Gunawan mengaku sudah menyerahkan masalah ini ke Kepala Badan Reserse Kriminal. "Semua berita itu tidak benar," katanya.

Komisaris Jenderal Ito Sumardi mengakui bahwa Budi Gunawan adalah perwira pertama yang menjelaskan ihwal rekeningnya. "Masih ada bukti-bukti formal yang belum lengkap, karena sudah lama kejadiannya. Tapi prinsipnya, ini sudah *clear*," katanya. Ditanya soal dua perusahaan penyeter dana yang punya kasus di kepolisian, Ito angkat tangan, "Semua sudah dimintai keterangan. Saya tidak bisa cerita detail karena ini merupakan penyidikan."

Sebagai bekas ajudan presiden, menurut Ito, Budi Gunawan memiliki hubungan luas. Ia menduga para kolega Budi bisa saja memberikan hadiah. Karena tak berkaitan dengan perkara, menurut dia, hal itu tidak ada masalah. Ia lalu menyebutkan "kebaikan" Budi Gunawan. "Anda lihat, gedung Divisi Profesi kini sangat bagus, jauh lebih bagus daripada kantor saya," kata Ito. "Anda tahu siapa yang membangun? Pak Budi Gunawan, dengan dana pribadi."

Wahyu Dhyatmika, Jupemalis Samsir (Pangkalpinang)

buah kantor notaris di Pangkalpinang, sebagai perusahaan pertambangan dengan setoran modal awal Rp 1,5 miliar.

Demikian juga dengan Masindo, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan usaha, dengan setoran modal awal Rp 30 miliar. Ketika *Tempo* mengunjungi alamat kantor Masindo di gedung Samporna Strategic Square, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, perusahaan ini tampaknya sudah berganti alamat. "Sudah lama tidak di sini," kata petugas di gedung itu.

Selain dua perusahaan tersebut, ada

sejumlah individu yang terdeteksi mentransfer dana ke rekening Budi. Ada juga setoran tunai dalam jumlah miliaran rupiah. Sejumlah sumber *Tempo* menjelaskan, posisi Budi sebagai ajudan Megawati Soekarnoputri, wakil presiden dan kemudian presiden pada 1999-2004, berperan besar dalam penumpukan harta itu. "Ada banyak pengusaha yang, ketika mau bertemu RI-1, sukarela memberi. Duit Rp 100-200 juta itu kecil buat mereka," katanya.

Diterpa isu tak sedap, lingkaran dalam Budi Gunawan tak mau berpangku tangan. Mereka balik menuding ada



TEMPO/ALBERT NGAWAN/REDA

BERJAS hitam, Kamis pekan lalu, Yusril datang ke Gedung Bundar, Kejaksaan Agung. Didampingi tiga pengacaranya, Mohammad Assegaf, Maqdir Ismail, dan Wirawan Adnan, Yusril menyatakan kedatangannya untuk menyampaikan pendapatnya tentang penetapan dirinya sebagai tersangka. "Penetapan itu tidak sah," katanya keras.

Pakar hukum tata negara itu menunjuk posisi Jaksa Agung Hendarman Supandji sebagai biang keladinya. Menurut Yusril, Hendarman diangkat menjadi Jaksa Agung berdasarkan keputusan presiden pada 2007 dan masa tugasnya berakhir bersamaan dengan selesainya tugas Kabinet Indonesia Bersatu pada Oktober 2009. Setelah itu, ujarnya, Hendarman tak diangkat dan dilantik lagi.

Dalam kaca mata Yusril, dengan demikian posisi Hendarman sebagai Jaksa Agung tak sah. Karena itu pula, penetapan dirinya sebagai tersangka otomatis tidak sah pula. "Karena ditandatangani Jaksa Agung yang telah berakhir masa jabatannya."

Yusril menolak diperiksa. Arminsyah, yang menemui Yusril di ruang tamu, tak mampu membujuk pria kelahiran Beitung 54 tahun silam itu masuk ruang pemeriksaan. Sehari sebelumnya di kantornya, Graha Citra, di kawasan Jalan Gatot Subroto, Yusril menegaskan tidak ada yang keliru pada proyek Sisminbakum. Menurut dia, penetapan dirinya sebagai tersangka lebih karena unsur politik, untuk menamatkan karier politiknya, terutama untuk menghadapi pemilihan presiden 2014. "Targetnya saya, bukan Hartono."

PENETAPAN Yusril sebagai tersangka memang tinggal menunggu waktu. Kepada *Tempo*, seorang jaksa yang ikut memeriksa Yusril bercerita, nama Yusril dan Hartono, pada awal 2009, sudah masuk daftar tersangka. "Saat itu sudah dilakukan gelar perkara di depan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus," ujarnya.

Kesalahan Yusril terang-benderang. Selain mengeluarkan surat keputusan pemberlakuan Sisminbakum, dia menerbitkan surat keputusan penunjukan Sarana—dan Koperasi Pengayoman—sebagai pengelola Sisminbakum. Dua SK itu dikeluarkan masing-masing pada 4 dan 10 Oktober 2000. Di luar itu, setumpuk bukti lain juga ditemukannya jaksa. Yusril pernah memakai duit itu untuk sugu perjalanannya ke luar ne-

Hartono
Tanoesoedibjo
(kanan).

Yusril Ihza
Mahendra
sempat dicegah
meninggalkan
Kejaksaan
Agung setelah
menyampaikan
pendapatnya
tentang penetapan
dirinya sebagai
tersangka (kiri).



sana tercantum direktur utamanya Yohanes Waworuntu. "Padahal Yohanes baru masuk Sarana pada 2 September 2000," ujar seorang jaksa. Kepada *Tempo*, Yohanes menunjuk pendirian Sarana itu memang dibuat mundur. "Semua sudah diatur," ujarnya. Pemegang sahamnya juga berubah-ubah. Pertama kali tercatat pemegang sahamnya Lydia Lili, Gerald Yakobus, dan Endang Setiawaty, kini 99 persen sahamnya dikuasai PT Bhakti Asset Management dan sisanya Hartono. "Hartono adalah pengendali Sarana, semua uang yang keluar harus lewat dia," kata Yohanes.

Jaksa Reda Manthovani, yang memeriksa dokumen pengeluaran Sisminbakum, mengakui peran Hartono sangat besar. Hampir semua kuitansi pengeluaran Sarana yang kini dipegang kejaksaan ada tanda tangan kakak sulung Hary Tanoesoedibjo, Presiden Direktur MNC itu. "Dia tidak ada di mana-mana, tapi ada di mana-mana," kata Reda perihal Hartono yang juga menjabat komisaris di Bhakti Investama.

Tapi, soal perannya di SRD, Hartono selalu berkelit. Kepada jaksa yang memeriksanya pada 12 Februari 2009, ia misalnya menunjuk pemegang saham

Sarana adalah Yohanes dan Gerald. Saat jaksa memperlihatkan sejumlah bukti notulensi rapat SRD yang ada tanda tangannya, Hartono menjawab, "Saya tidak yakin itu tanda tangan saya." Yang pasti, duit yang dikeruk SRD memang besar. "Sejak Undang-Undang PT disahkan, setiap bulan bisa masuk sampai Rp 30 miliar," kata Yohanes.

Jumlah uang keluar-masuk rekening SRD inilah yang ditelisik kejaksaan untuk menetapkan kerugian negara. Dan untuk menghitung itu, kejaksaan pernah meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Siang-malam, sejumlah auditor BPKP memelototi dokumen keuangan Sarana. "Mereka sampai menginap di sini," ujar seorang jaksa. Saat itu para auditor BPKP menyatakan kerugian negara akibat korupsi itu "tergambar jelas".

Hanya, belakangan kesimpulan resmi yang keluar dari BPKP berbunyi lain. Lembaga audit negara ini menyatakan "tidak bisa menyimpulkan kerugian negara". Dalam dokumen yang diperoleh *Tempo*, memang tidak tercatat aliran pengeluaran atau keterangan ke mana duit SRD mengalir.

Ini yang membuat berang sejumlah jaksa. "Sejumlah auditor mengaku ada tekanan dari petinggi BPKP yang meminta kerugian tidak diungkap," ujar seorang jaksa. Para penyidik kejaksaan lalu melakukan penghitungan sendiri. Dasarnya dokumen SRD dan rekening perusahaan itu di Bank Danamon. Hasilnya: kerugian negara mencapai Rp 420 miliar. Itulah duit yang masuk dari para notaris. "Benar-benar ini namanya SRD, sarana rampok duit," ujar se-

Yang pasti, duit yang dikeruk SRD memang besar. "Sejak Undang-Undang PT disahkan, setiap bulan bisa masuk sampai Rp 30 miliar,"

**YOHANES WAWORUNTU,
DIREKTUR UTAMA PT SARANA**

geri, antara lain ke Malaysia. Fulus itu juga pernah mengalir ke rekening—kini mantan—istrinya, Suksesih.

Jaksa juga melihat kaitan Yusril dengan PT Sarana. Dalam susunan komisaris tercantum nama Gerald Yakobus, yang kala itu menjabat bendahara Partai Bulan Bintang, partai Yusril. Karena itu, sejumlah jaksa menduga kuat, Sarana bisa masuk, serta mendapat proyek dengan penunjukan langsung. Karena peran Yusril. Kendati mengakui Gerald pernah menjadi bendahara PBB, Yusril menolak jika dikatakan duit Sisminbakum mengalir ke partainya (lihat wawancara Yusril: "Akan Saya Lawan").

Pendirian PT Sarana sendiri dinilai berbau rekayasa. Dibentuk berdasarkan akta tertanggal 30 Juni 2000, di

orang sumber *Tempo* di Kejaksaan.

Dihubungi pekan lalu, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Suradji menampik bahwa kesimpulan "tidak ada kerugian negara" itu merupakan permintaan dari atas. Menurut Suradji, lembaganya tak bisa menyimpulkan adanya kerugian negara lantaran bahan yang diserahkan kejaksaan hanya rekening koran, tak ada pendukung lainnya seperti pembukuan bank arus keluar-masuk uang. "Kalau dasarnya rekening koran, semua auditor sama," kata Suradji. "Karena itu, kami tidak berani menyatakan Sisminbakum itu merugikan negara."

Yusril Ihza Mahendra, yang bertekad akan mati-matian melawan tuduhan dirinya melakukan korupsi, menegaskan tak ada kerugian negara dalam proyek ini. "Karena dibiayai swasta, biaya akses tidak tergolong pendapatan negara bukan pajak," ujarnya. Pengacara Hartono, Hotman Paris Hutapea, juga yakin kliennya tak bisa dijerat kasus ini. "Ini bukan perkara korupsi, tak ada anggaran negara yang dirugikan," katanya. Hartono sendiri kini sudah melesat ke luar negeri. Ia terbang ke Taiwan tepat sehari sebelum Imigrasi mengeluarkan surat pencekalan atas dirinya.

APA pun argumentasinya, tampaknya perjuangan Yusril sia-sia. Kejaksaan sudah menyiapkan sejumlah dalil untuk mematahkan "perlawanan" Yusril. Tentang pengakuannya proyek ini sudah dibicarakan kabinet, misalnya, kejaksaan menyatakan, bisa jadi Presiden mendapat laporan secara umum saja. "Apakah Presiden, misalnya, juga tahu adanya pembagian duit dan masuk ke swasta?" ujar Yunitha, salah satu jaksa yang menangani kasus ini.

Alasan bukan duit negara juga bakal disikat. Bagi kejaksaan, yang dipungut itu jelas uang publik, dan seharusnya masuk kas negara. "Sisminbakum itu memakai kop Departemen Kehakiman, menggunakan kekuasaan negara untuk mengambil pungutan, tapi uangnya masuk swasta, itu pelanggaran," kata Reda.

Pertarungan Yusril versus kejaksaan memang bakal ramai. Setidaknya empat jaksa sudah disiapkan untuk memeriksa Yusril pekan-pekan ini. Setumpuk dokumen untuk meng-"KO"-kan Yusril sudah disiapkan. Sejumlah jaksa berbisik, besar kemungkinan nasib Yusril juga bakal seperti bekas anak buahnya. Seusai pemeriksaan, dikirim ke tahanan.

L.R. Baskoro, Anton Aprianto, Erwin Daryanto

Satu Pohon Berakar Seribu

Dari satu rekening penampungan, duit pungutan Sistem Administrasi Badan Hukum mengalir ke mana-mana. Untuk urusan, dari bisnis hingga plesir.

REKENING di Bank Danamon cabang Wisma Gabungan Koperasi Batik Indonesia, Semanggi, Jakarta, itu masih digembok Kejaksaan Agung. Diblokir sejak November dua tahun lalu, rekening penampungan milik PT Sarana Rekatama Dinamika itu masih menyisakan duit belasan miliar rupiah.

Dengan setoran awal Rp 2,5 juta, rekening itu dibuka Sarana untuk menampung pungutan Sistem Administrasi Badan Hukum alias Sisminbakum di Departemen Kehakiman. Melalui keputusan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra, Oktober 2000, Sarana dan Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman ditunjuk sebagai pengelola layanan *online* itu.

Karena proyek Sisminbakum terindikasi korupsi, Kejaksaan untuk sementara menyita rekening yang dibuka pada akhir November 2000 itu. "Seharusnya semua setoran masuk dulu ke kas negara, bukan ke rekening itu," kata Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Arminsyah.

Tak sampai empat bulan dibuka, rekening itu sudah diguyur duit miliaran rupiah. Sejak Sisminbakum dioperasikan pada awal Maret 2001, para notaris berbondong-bondong memanfaatkan layanannya. Tentu tak gratis. Untuk pemesanan nama perusahaan, misalnya, biayanya Rp 350 ribu. Urusan pendirian dan perubahan badan hukum dibandrol Rp 1 juta. Duit inilah yang meluncur ke rekening penampungan.

Menurut laporan tahunan Sarana yang sudah diaudit, pendapatan Sisminbakum bisa mencapai Rp 5 miliar per bulan. Laba bersih Sarana per tahun bisa di atas Rp 4 miliar. Sampai rekening diblokir, menurut Kejaksaan, duit dari pengurusan ratusan ribu akta badan hukum itu berjumlah Rp 420 miliar.

Lalu ke mana isi rekening itu mengalir? Kejaksaan mengaku sudah menelusurinya. Menurut seorang penyidik, ada duit yang berpindah ke Bank Danamon cabang Kebon Sirih dan BCA. Kemudian mengalir lagi ke BNI dan Bank

PT Sarana Rekatama Dinamika.

Tak sampai empat bulan dibuka, sudah diguyur duit miliaran rupiah.

Mandiri cabang Singapura. "Dari bank di Singapura, uang itu mengalir ke mana-mana," katanya.

Menurut Yohanes Waworuntu, Direktur Utama Sarana yang dinonaktifkan per medio Juni lalu, sepuluh persen rekening penampungan disetor ke Koperasi. Dalam perjanjian kerja sama Sarana mendapat bagian 90 persen, sisanya buat Koperasi. Pada Januari 2003, jatah Koperasi naik menjadi 15 persen, dan Sarana 85 persen "Bagian Sarana mengalir ke induk semangnya," kata terpidana kasus Sisminbakum ini.

Melalui anak usahanya yang menguasai mayoritas saham Sarana, yakni PT Bhakti Asset Management, kata Yohanes, PT Bhakti Investama mengangsur duit di rekening itu. Soal kepemilikan Bhakti di Sarana juga diungkapkan tiga saksi di persidangan Yohanes. Mereka adalah Direktur Bhakti Asset Kushindrarto, Direktur Sarana Richard Leo Tirtadji, dan Komisaris Utama Sarana Gerard Yakobus.

Yohanes memerinci, Bhakti pernah memakai dana dari Sisminbakum untuk membeli tanah di Tanah Abang, Jakarta, dan membeli lima persen saham perusahaan jalan tol. Soal pembelian ini dibenarkan pegawai *accounting* Sarana, Dewi Tembaga, di persidangan.



Hartono Tanoesoedibjo, menurut Yohanes, juga memakai duit itu untuk membeli satu unit Apartemen Four Seasons Tower 2 Lantai 27B di Kuningan, Jakarta, dan rumah mewah di Kembangan Baru, Jakarta.

Yohanes menambahkan, Bhakti Investama juga pernah menggunakan duit Sisminbakum untuk mengakuisisi separuh saham maskapai Adam Air. Perusahaan investasi keluarga Tanoesoedibjo ini dituding Yohanes pernah pula menyubsidi sejumlah usaha media lainnya, yaitu majalah *Trust* dan *Seputar Indonesia*, dengan duit itu. Unit usaha telekomunikasi milik Bhakti, Mobil 8, tak ketinggalan mendapat guyuran. "Mereka yang pakai, kenapa saya yang harus ganti?" kata Yohanes.

Di samping menjatuhkan vonis lima tahun penjara, putusan kasasi pada 12 Mei lalu itu mengharuskan Yohanes membayar kerugian negara Rp 378 miliar. Jumlah itu senilai setoran Sisminbakum ke Sarana selama delapan tahun. Menurut ayah tiga anak ini, di atas keributan, Bhakti menjadikannya pemilik Sarana. Padahal pengendalinya Hartono. Sebagai pengendali, kata Yohanes, Hartono punya akses besar mencairkan uang. Tanpa tanda tangannya, duit bisa keluar. Di pengadilan, pemim-

pin Bank Danamon Wisma Gabungan Koperasi Batik, Tien Novianto, membenarkan soal itu. Mery Effendi dari Bagian Operasional Danamon di persidangan menyebutkan Hartonolah yang paling banyak menarik dana.

Pemilik Bhakti Investama, Bambang Hary Tanoesoedibjo, meradang dituding Yohanes. Menurut adik bontot Hartono ini, tudingan itu tak bisa dipertanggungjawabkan. Bhakti, kata Hary, tak ada hubungannya dengan Sarana. Menurut dia, perusahaannya diaudit kantor akuntan yang kredibel. Mengutip laporan keuangan, ia menyebutkan tak ada sepeser pun saham Bhakti di Sarana. "Kalau ada, akan saya pertanggungjawabkan."

Senin pekan lalu, Hary melaporkan Yohanes ke Markas Besar Kepolisian RI dengan tuduhan pencemaran nama baik. Hartono, yang dua pekan lalu ditetapkan sebagai tersangka Sisminbakum, tak bisa dimintai konfirmasi karena kini sudah di Taipei, Taiwan. Pengacara Hartono, Hotman Paris Hutapea, membantah kliennya memakai duit korupsi. "Itu uang Sarana," katanya.

Saat bersaksi di persidangan mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Romli Atmasasmita pada 29 Juni

2009, Hartono membantah tudingan Yohanes. Pengeluaran Sarana, kata dia, sepenuhnya tanggung jawab direksi. Ia juga mengaku tak tahu soal aliran duit Sarana. Spesimennya di cek dan bilyet giro, kata Hartono, hanya sebagai perwakilan pemegang saham. "Tak harus ada tanda tangan saya," ujarnya.

Tudingan tak sedap juga hinggap ke Partai Bulan Bintang. Partai yang didirikan Yusril ini disebut-sebut menerima gelontoran dana Sisminbakum. Menurut sumber *Tempo* di Kejaksaan, aliran duit itu diduga mengalir dari bank di luar negeri. Tudingan ini muncul karena Komisaris Utama Sarana Gerard Yakobus disebut-sebut sebagai bendahara partai Yusril.

Kepada wartawan di kantor hukumnya, Rabu pekan lalu, Yusril membantah tudingan tersebut. "Itu isu," katanya. Gerard, ujarnya, memang pernah menjadi bendahara partai, tapi jauh sebelum Sisminbakum. Ketua Partai Bulan Bintang Malam Sambat Kaban juga membantah. "Ini sarat kepentingan politik," ujar Kaban.

Tak hanya terjadi di Sarana, bagian Koperasi juga mengalir ke mana-mana. Menurut seorang penyidik, setoran ke kas negara hanya dari penerimaan negara bukan pajak senilai Rp 200 ribu per akta. Duit Koperasi ini ludes dibagi-bagi: enam persen untuk Direktorat Administrasi, sisanya untuk Koperasi. Kejaksaan mengaku mengantongi catatan aliran duit itu. "Peruntukannya macam-macam," kata penyidik itu.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus saat kasus ini bergulir, Marwan Effendy, pernah melansir soal aliran itu. Menurut Marwan, dalam catatan itu, eselon I kebagian Rp 10 juta, sekretaris jenderal Rp 5 juta, dan para direktur kecipratan Rp 5 juta. Beberapa kali ditanya *Tempo*, para pejabat eselon I periode itu, termasuk Romli, membantahnya. Kepada jaksa, mereka juga kompak tak mengaku. "Tapi kami punya bukti dan keterangan saksi," ujar Marwan.

Ada berbagai modus menguras uang itu: uang saku pejabat dan istrinya ke luar negeri, biaya seminar, dan tip untuk menggolkan rancangan undang-undang. Yusril dan istrinya, Sukesih (kini bekas istri), dituduh turut menikmati. Sukesih, menurut jaksa, kecipratan Rp 15 juta untuk biaya ke luar negeri. Yusril beberapa kali membantah tuduhan itu.

Di tingkat Koperasi, modusnya juga rupa-rupa. Menurut Kejaksaan, duit itu ada yang dibagikan dalam bentuk sisa hasil usaha dan tunjangan hari raya. "Ini ibarat satu batang pohon berakar seribu," kata penyidik itu.

Anton Aprianto

Yusril Ihza Mahendra: Akan Saya Lawan

BEBERAPA kali Yusril Ihza Mahendra memegang gembok pintu gerbang barat kompleks gedung Kejaksaan Agung. Tangannya menggoyang-goyang rantai yang mengaitkan kedua daun pintu. Kamis siang pekan lalu itu, ia seperti tak percaya bakal mendapat perlakuan seperti itu. Dirinya dicegah keluar dari gedung Kejaksaan. "Padahal tadi saya sudah berpamitan kepada Direktur Penyidik. Ini tindakan melanggar HAM," ujarnya.

Siang itu sebenarnya Yusril dipanggil kejaksaan untuk diminta keterangan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Ia memang datang, tapi emoh diperiksa. Sebaliknya, ia menyatakan sikap bahwa penetapan tersangka terhadap dirinya tidak sah.

Setelah itu, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia era Presiden Abdurrahman Wahid ini pun pamit kepada Direktur Penyidikan Arminsyah. Saat akan keluar dari kompleks Gedung Bundar, markas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi, itulah laju mobil Yusril ditahan petugas keamanan. Ia sempat tak diizinkan keluar. Barulah setelah para jaksa mendapat jaminan Yusril bersedia datang lagi untuk diperiksa, pintu gerbang dibuka.

Sehari sebelumnya, kepada sejumlah wartawan, termasuk wartawan *Tempo* Erwin Daryanto, Yusril menegaskan dirinya tak bersalah dalam kasus ini. Sebelumnya, wartawan *Tempo* Anton Aprianto menelepon Yusril untuk sebuah wawancara.

Anda dituding bersalah karena menunda PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) tanpa tender. Komentar Anda?

Tender itu kalau program ini memakai anggaran negara, APBN. Tapi ini tidak sepeser pun memakai uang negara, karena memang tidak ada pos anggaran untuk itu. Maka, dalam rapat kabinet, Presiden Abdurrahman Wahid menyarankan agar mengundang swasta. Saya tanya ke pejabat teknis di kementerian. Dulu-dulunya bagaimana kalau harus swasta yang ditunjuk? Mereka menyatakan Koperasilah yang ditunjuk bekerja sama dengan swasta. Lalu diundanglah swasta.

Bagaimana ceritanya SRD bisa masuk? Itu masalah teknis. Sebagai menteri,

saya tidak pernah masuk ke hal-hal teknis secara detail.

Bagaimana dengan pembagian fee yang 90 persen untuk PT SRD dan 10 persen untuk Koperasi Pengayoman Departemen Kehakiman?

Mereka (Koperasi dan SRD) tidak membicarakan itu. Karena memang Koperasi tidak *invest* sama sekali. Yang *invest* adalah SRD. Dan itu disepakati sebagai BOT (*build, operate, and transfer*). Setelah sepuluh tahun, diserahkan kepada negara. Dan sekarang sudah berjalan delapan tahun, tidak ada masalah.

Benarkah pernah ada surat dari Koperasi kepada Anda yang menyatakan keberatan perihal pembagian fee itu?

Benar. Kemudian saya kembalikan lagi ke sekretariat jenderal untuk dibahas lagi sampai selesai. Semua ada nota disposisinya, dibahas semua sampai selesai. Mereka minta *appraisal* untuk menentukan berapa biaya yang wajar, dan kemudian diusulkan ke saya. Sudah ada *understanding* dari Koperasi mereka sudah bisa terima. Ya, oke.

Kenapa, menurut Anda, pungutan Sisminbakum ini tidak masuk ke pendapatan negara bukan pajak (PNBP)?

Siapa yang memungut biaya akses? Departemen tidak pernah memungut, yang memungut biaya akses itu swasta. PNBP di sebuah instansi pemerintah itu ditetapkan oleh presiden atas usul Menteri Keuangan. Sisminbakum ini tiga kali presiden berganti. Zaman

SBY, dia dua kali mengubah peraturan pemerintah yang berlaku di Departemen Kehakiman dan HAM, tapi dalam dua kali itu tidak pernah mencantumkan biaya akses ini sebagai PNBP.

Anda sudah mengkonsultasikan soal ini ke Menteri Keuangan waktu itu?

Kami konsultasikan ke Menteri Keuangan, menterinya sudah meninggal, yaitu Pak Prijadi Praptosuhardjo. Beliau mengatakan, silakan jalan, ini tidak perlu masuk PNBP karena ini memang swasta murni.

Juga, seperti pengakuan Ada, ke rapat kabinet?

Ya. Pada waktu Ibu Megawati meresmikan, itu kan transparan. Seluruh perincian biaya ditaruh di dinding. Biayanya sekian-sekian. Disebutkan Rp 200 ribu langsung dibayar ke kementerian untuk disetor ke kas negara, inilah PNBP-nya. Yang biaya akses tidak dikenai PNBP. Biaya akses yang Rp 1.250.000 dibayar ke rekening Sisminbakum di Bank Danamon. Tidak ada yang tidak transparan.

Benarkah yang membawa PT SRD adalah Gerald Yakobus, waktu itu bendahara partai Anda, Partai Bulan Bintang?

Gerald itu baru saya kenal September 1999. Yang memperkenalkan Hartono Mardjono (tokoh Partai Bulan Bintang dan kini sudah meninggal) dan diusulkan sebagai bendahara partai. Dia menjadi bendahara dari September 1999 sampai April 2000. Dalam satu kesempatan, Gerald berbicara kepada saya, "Pak, kami mau masuk ke Sisminbakum." Saya katakan, ya silakan.

Sejak 2004 Gerald sudah menjadi anggota calon legislatif DPR dari Partai Bintang Reformasi. Tapi dia selalu dikaitkan sebagai bendahara PBB. Barangkali ada yang lalu menduga PBB kebagian duit Sisminbakum. Ini kan yang kemudian jadi isu.

Anda sudah siap menghadapi kasus ini?

Secara yuridis akan saya hadapi. Tapi, menurut saya, faktor nonyuridisnya berat.

Siap juga kalau ditahan?

Prinsip saya, mati satu mati semua. Saya pikir, ya apa boleh buat. Akan saya lawan. Saya tidak mau terus-menerus diperlakukan semena-mena.



PECAH KONGSI DI TAMAN MINI

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MENGATALKAN HASIL RAPAT LUMBU PEMEGANG SAHAM PT CPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA YERDI PENGUSAHA HARRY TANINGSOEDIBJO. RUMAHNYA INI PLIN DIANGGAP TAK SAH, DARI SOAL BLOKIR PENGESAHAN RAPAT PEMEGANG SAHAM, KONFLIK TUTUT VERSUS HARRY BERUBUNG DI PENGADILAN, BUNTUT AMUNISI YANG MENYINGKUNG WASAT TEN SOEHARTO.

Rapat lumbung pemegang saham PT CPTA Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang berlangsung di rumah pengusahanya Harry Taningsoedibjo, di Jalan Merdeka No. 10, Jakarta Selatan, Sabtu (11/10/2007) kemarin, menimbulkan kontroversi. Rapat tersebut dianggap sebagai upaya untuk menggulingkan Harry Taningsoedibjo sebagai ketua dewan direksi PT CPTA. Rapat tersebut berlangsung selama dua hari, yaitu Sabtu dan Minggu (10-11/10/2007).

Harry Taningsoedibjo adalah salah satu pendiri PT CPTA. Ia adalah seorang pengusaha yang sukses di bidang media. Ia adalah ketua dewan direksi PT CPTA sejak tahun 2003. Rapat tersebut berlangsung selama dua hari, yaitu Sabtu dan Minggu (10-11/10/2007).

Harry Taningsoedibjo adalah salah satu pendiri PT CPTA. Ia adalah seorang pengusaha yang sukses di bidang media. Ia adalah ketua dewan direksi PT CPTA sejak tahun 2003.

Rapat tersebut berlangsung selama dua hari, yaitu Sabtu dan Minggu (10-11/10/2007). Rapat tersebut dianggap sebagai upaya untuk menggulingkan Harry Taningsoedibjo sebagai ketua dewan direksi PT CPTA. Rapat tersebut berlangsung selama dua hari, yaitu Sabtu dan Minggu (10-11/10/2007).



Tutut lalu mengundang Hary Tanoe untuk berkongsi menyelesaikan utang yang jumlahnya mencapai Rp 1,2 triliun. Hary waktu itu sudah menjadi pemegang saham Bimantara Group, perusahaan yang didirikan adik Tutut, Bambang Trihatmodjo. Dipilihnya Hary tak lepas dari kehebatannya membeli dan mengakuisisi banyak perusahaan ketika pengusaha lain terjatrat tumpukan utang.

Lewat Bhakti Investama, perusahaan investasi pasar modal, Hary antara lain tercatat pernah membeli Bentoel (US\$ 30 juta), membeli utang (US\$ 35 juta) Centralindo Panca Sakti—pemilik Metrosel—di Chase Manhattan Bank, saham Astra International (Rp 300 miliar), dan Salim Oleochemical (US\$ 131 juta), menyuntikkan dana ke SCTV (US\$ 20 juta), serta membeli Indomaret (Rp 162 miliar). Bhakti juga membeli AGIS (agen Sony) dari tangan Tomy Winata senilai US\$ 30 juta.

Pendeknya, Hary orang yang tepat diajak kerja sama. Maka, pada 23 Agustus 2002, kedua pihak menekan surat perjanjian pembayaran utang-utang pribadi dan perusahaan Tutut, baik ke perusahaan lain maupun ke pemerintah. "Sejak awal, niat saya

Hary Tanoesoedibjo

membantu," kata Hary Tanoe kepada *Tempo*.

Hary diwajibkan menyediakan US\$ 55 juta. Tak semuanya tunai. Sebanyak US\$ 25 juta dalam bentuk ekuitas dan sisanya pembiayaan kembali. Jika utang-utang itu sudah terbayar, Hary bakal mendapat 75 persen saham TPI. "Kalau masih ada utang tapi dana itu sudah habis, sisanya akan ditanggung Mbak Tutut," kata Hary. Singkat cerita, ia mengaku sudah menyelesaikan utang-utang Tutut, termasuk utang TPI yang membuat televisi ini "hidup susah mati pun ogah".

Sesuai dengan perjanjian, Tutut pun menyerahkan kuasa penuh kepada PT Berkah Karya Bersama untuk mengelola TPI. Menurut Hary, ketika ia masuk, TPI memang hancur-hancuran. Boroboro membuat program baru, program lama saja tak terbayar. Ia membenahi TPI dengan melangsingkan struktur serta membuat program baru semacam *Audisi Pelawak Indonesia* dan *Kontes Dangdut TPI*. "Pokoknya, TPI jadi sehat lagi," katanya.

Namun Tutut rupanya tak sepenuhnya sreg dengan gerak cepat Hary. Terutama cara Hary menyelesaikan sisa utang TPI yang *idle* yang jumlahnya US\$ 69 juta plus Rp 143 miliar. "Dia memakai arus kas untuk mencicil utang-utang itu," kata Harry Ponto, pengacara Tutut. Puncaknya, kata Ponto, Tutut tersinggung berat ketika Hary berencana menjual beberapa bidang tanah di Taman Mini.

Hary beralasan, daripada tanah-tanah itu menganggur, lebih baik dijual untuk membangun studio atau mem-



Kantor Televisi Pendidikan Indonesia.

buat program acara baru. Manajemen TPI, yang sebagian besar sudah diis orang-orang PT Berkah, sudah setuju menjual tanah untuk memperoleh dana segar. "Tapi tak jadi karena Mbak Tutut tak setuju," katanya.

Tutut marah besar karena tanah-tanah itu wasiat almarhum ibunya, Tien Soeharto. Sebelum meninggal pada 1996, Tien berwasiat agar tanah-tanah di Taman Mini itu dialihkan ke pihak ketiga untuk dipakai demi kepen-

Benang Kusut TPI

SITI Hardijanti Rukmana dan Hary Tanoesoedibjo gagal berkongsi mengurus TPI karena tak sepaham soal pengeluaran membayar utang Rp 1,2 triliun. Putri sulung Soeharto itu tersinggung karena diminta menjual tanah warisan ibunya.

3 JUNI 2003

Tutut memberikan kuasa kepada PT Berkah Karya Bersama untuk mengelola secara penuh TPI.

20 DESEMBER 2004

Tutut menyurat PT Berkah menyatakan akan membayar pengeluaran Hary membereskan utang.

23 AGUSTUS 2002

Siti Hardijanti alias Tutut dan Hary Tanoe menekan kerja sama investasi. Hary diwajibkan menyediakan US\$ 55 juta untuk menyelesaikan seluruh utang Tutut yang berjumlah Rp 1,2 triliun. Kompensasinya, Hary, melalui PT Berkah Karya Bersama, akan mendapat 75 persen saham TPI.

3 JANUARI 2003

Perubahan direksi dan komisaris TPI.

21 JANUARI 2003

Pengakuan sisa utang TPI sebesar US\$ 69 juta plus Rp 143 miliar ke Santoro Corporation, perusahaan di British Virgin Islands.

21 JULI 2003

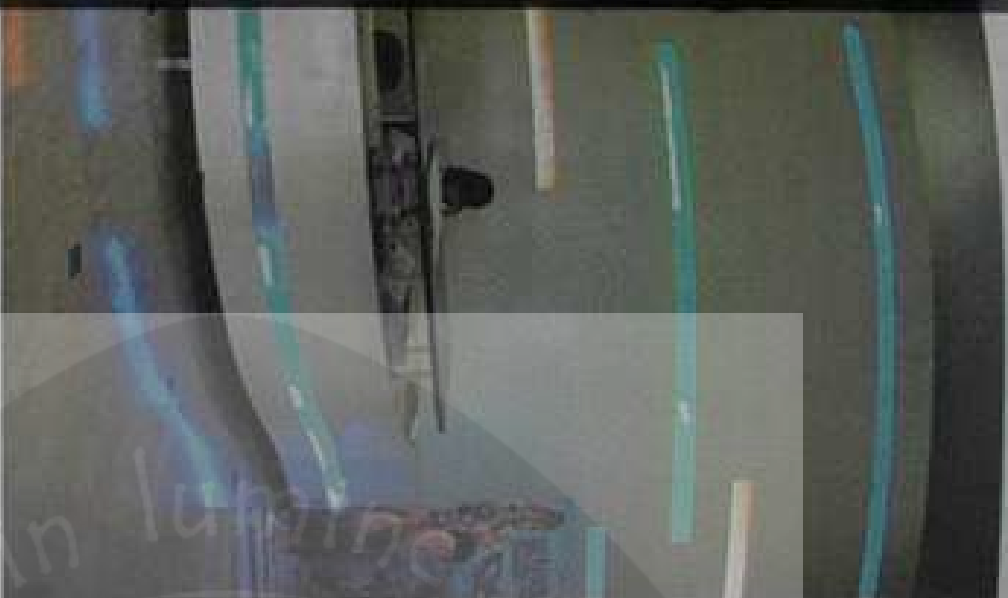
Rapat umum pemegang saham luar biasa TPI dengan agenda penambahan modal.

2004

Tutut mulai tak sreg dengan cara-cara Hary mengelola TPI dan menyelesaikan sisa utang. Salah satunya rencana menjual tanah warisan Tien Soeharto di Taman Mini Indonesia Indah.

7 JANUARI 2005

PT Berkah menanggapi surat Tutut dan menyatakan total pengeluaran Rp 685 miliar.



TEMPO/ARNOLD SIMANUNTAK

tingan orang banyak. Buntut kemarahannya, pada 20 Desember 2004, Tutut mengirim surat akan membayar seluruh pengeluaran Harry saat menyelesaikan utang-utangnya.

Harry tak percaya Tutut mengustirnya semata karena kemarahan itu. Ia curiga Tutut ingin kembali menguasai TPT karena keuangan televisi ini sudah membaik. "Setahun setelah saya masuk, saya merasa dan audiensinya melampaui RCTI," kata Harry. Toh, ia setuju "menjual" pembayaran itu dengan me-notok angka Rp 685 miliar. Tapi Tutut

meminta ada audit dulu sampai ketemu angka yang diajukan. "Kami beri kesempatan audit selama sebulan," kata Harry Ponto.

Angka itu memang turun menjadi Rp 630 miliar, tapi Tutut mengklaim tak pernah menerima hasil audinya. Menurut Ponto, tiba-tiba Harry mengirim tiga opsi penyelesaian transaksi dengan Tutut. Opsi itu adalah Tutut membayar pengeluaran Harry sebesar Rp 630 miliar, Tutut merelakan 25 persen sahamnya dibeli Harry senilai Rp 210 miliar, atau kerja sama diteruskan dengan pembagian saham tetap 75 : 25. "Kami tunggu jawabannya dalam rapat 18 Maret 2005," kata Harry.

Alih-alih memilih satu dari tiga opsi itu, Tutut membatalkan kuasa kepada PT Berkah pada 16 Maret 2005. Dengan pembatalan ini, Berkah lagi punya kuasa mengelola TPT. Menurut Ponto, kliennya tak mau memilih satu opsi karena undangan rapat ditujukan kepada PT Berkah sendiri tanpa mengundang enam pemegang saham lain. Juga audit yang menjadi syarat pembelian saham tak kunjung dibuat. Alhasil, Tutut menggelar rapat lain sehari sebelum RUPSS yang digelar Harry.

Tutut mencatatkan diri sebagai pemilik 41,7 juta lembar saham TPT senilai Rp 205,3 miliar bersama lima pihak lain di bawah kendalinya (PT Citra Iantowo Gang Persada, Yayasan Purna Bhakti Periwati, PT Tridhan Satriaputra Indonesia, Mohamad Jarman, dan Niken Wiyantati). PT Berkah tak lagi tercatat sebagai pemegang saham. Notaris Buntario Tigris Darmawa

Ng, yang menentang rapat itu, mendaf-arkannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sial tak bisa ditangkal, jaringan Internet Sistem Administrasi Badan Hukum tiba-tiba *error*. Buntario tak bisa memasukkan akta susunan direksi baru TPT. Setiap kali ia mengaksesnya, selalu muncul peringatan di laman web agar ia mencari nama lain selain PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia sebelum memasukkan data. Berkali-kali diceba, notifikasinya tetap sama.

Dandy Rukmana, anak sulung Tutut, yang ditunjuk menjadi Komisaris TPT, menyuarati Kementerian Hukum untuk mendatarkan hasil RUPSS itu secara manual. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Zulkar-



Siti Hardjanti
Rukmana

nain Yunus dalam suratnya tanggal 1 Februari 2006 menolak permintaan Dandy dan justru mengabaikan rapat yang digelar Harry Tanoe.

Rupanya, rapat pada 18 Maret 2005 tetap digelar meski tanpa kehadiran Tutut. Harry mengukuhkan direksi baru dan jumlah sahamnya di TPI. Dalam akta yang dibuat notaris Bambang Wiweko disebutkan PT Berkah memiliki 41,7 juta saham seri A dan 1,235 miliar lembar saham seri B dengan total nominal Rp 502,3 miliar. Untuk Bambang, Internet Sismimbakum lancar jaya menerima input data.

Belakangan muncul pengakuan Yohanes Waworuntu. Dia Direktur Utama PT Sarana Rekatama Dinamika, perusahaan yang mengelola Sismimbakum sejak 2001. Komisarisnya Hartono Tanoesoedibjo, kakak tua Harry, dan pemilik sahamnya tak lain tak bukan PT Bhakti Investama. Yohanes mengaku, dua hari sebelum rapat yang digelar Tutut, ia dipanggil Harry Tanoe ke ruangannya di Menara Kebon Sirih, Jakarta Pusat, lantai 28.

Harry, menurut Yohanes, memintanya memblokir Sismimbakum agar log in Bunterio Tigris ketika mencatatkan RUPPS TPI versi Tutut tak bisa mengaksesnya. Yohanes menurut karena akan dipecah jika menolak. "Saya mau karena ingat anak saya yang lima tahun sakit kanker darah," katanya dengan mata berkaca-kaca. Setelah setelah memblokir, anak itu wafat.

Sedangkan Harry Tanoe bisa memajukan hasil rapatnya, menurut Yohanes, karena aksesnya diberikan seluas mungkin. Harry menyangkal pernah meminta Yohanes memblokir akses Tutut. Menurut dia, blokir tak perlu dilakukan karena RUPPS yang digelar Kubu Tutut ilegal. Ia menuding Yohanes sengaja membuat pengakuan itu karena telah bergabung ke kubu Tutut.

Yohanes menjadi terhukum kasus korupsi Sismimbakum. Ia divonis lima tahun penjara dan diharuskan membayar Rp 378 miliar uang hasil pembayaran notaris ketika mencatatkan rapat-rapat perusahaan. Ia masygul menjadi korban sendiri karena dituding sebagai pemegang saham PT Sarana. Padahal, menurut dia, Hartono dan Harry Tanoe itulah yang menikmati uang Sismimbakum. Harry menepis. "Saya tersinggung dengan tuduhan ini," katanya.



PROTES-protes yang digencarkan Tutut ke Kementerian Hukum menuai hasil juga. Puluhan surat yang mempertanyakan mekanisme Sismimbakum membuat Patrialis Akbar, Menteri Hukum yang baru, panas kuping. Politikus Partai Amanat Nasional ini memben-tuk tim untuk menelisik klaim yang diajukan Tutut pada Januari lalu.

Hasilnya, pada 8 Juni 2010, ia menerbitkan surat yang membatalkan rapat yang digelar Harry Tanoe. "Ada kesalahan prosedur karena pengesahan PT

CTPI tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang," kata Patrialis. Tim juga memastikan kebenaran cerita Yohanes Waworuntu soal blokir tanpa izin itu.

Kubu Tutut bersorak dengan keputusan itu. Mereka segera menggelar rapat untuk menunjuk direksi dan komisaris baru. Japlo Soerjoseman pemimpin Pemuda Pancasila, ditunjuk menjadi pengacara. Syamsir Siragabekas Kepala Badan Intelijen Negara diampu sebagai komisaris. "Pak Japto itu kami anggap mewakili Keluarga Cendana dan Pak Syamsir, karena ini tahu seluk-beluk kasus ini," kata Dedi Kalimang, pengacara Tutut yang lain.

Lain Tutut, lain Harry Tanoe. Ia beres dan menuding surat itu palsu karena diteken Rike Amarta yang berstatus Pelaksana Harian Direktur Perdata Kementerian Hukum. Ia juga mengaku pernah dipanggil untuk dimintai konfirmasi saat penulisan. Namun Patrialis menjamin surat itu asli dan sesuai dengan prosedur di lembaganya. "Kasus sudah memanggil, yang datang pengacara," katanya. "Harry Tanoe mengiri surat akan menunggu di pengadilan."

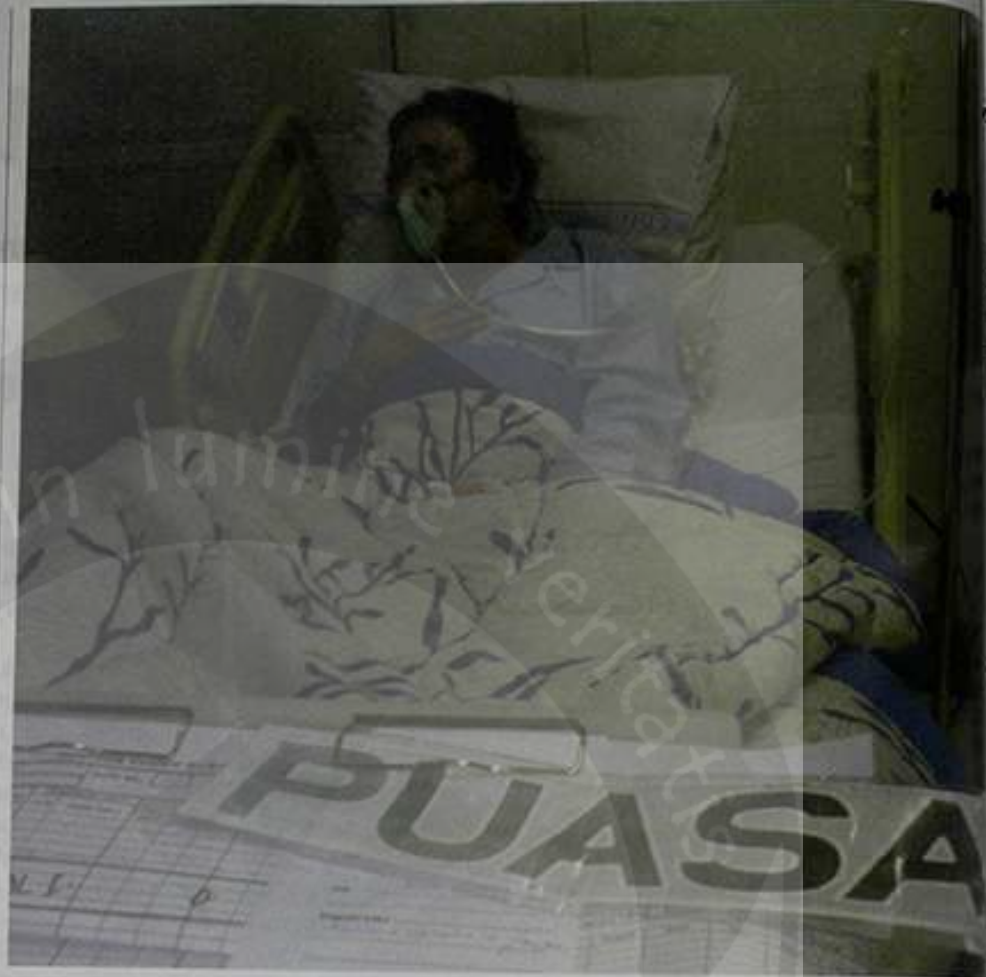
Surat pembatalan rapat 18 Maret 2006 itu memang dibuat menggantikan. Kemudian dibatalkan RUPPS versi Harry Tanoe. Departemen Hukum tak otomatis menerima RUPPS versi Tutut. Akibat, kata Patrialis, siapa pemilik saham TPI yang sah, "Biar diputuskan pengadilan."

BIDIKAN kamera mengarah ke Yohanes Waworuntu yang sedang gering. Selang oksigen tersumbat di hidung. Jarum infus menancap di lengan kiri. Kala itu, Desember 2009, mantan Direktur Utama PT Sarana Rekatama Dinamika ini dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan. "Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum telah dimainkan pengelolanya," kata Yohanes di hadapan kamera.

Lelaki 55 tahun ini tokoh kunci. Dialah mantan orang dalam kepercayaan Hary Tanoesoedibjo. Yohanes berada di tengah pusaran sengketa kepemilikan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, yakni antara Hary Tanoesoedibjo dan Siti Hardijanti Indra Rukmana alias Tutut. Pekan-pekan ini, pertarungan memasuki babak penentuan siapa yang bakal menjadi juragan *Televisi Pendidikan Indonesia*.

Hary Tanoe, menurut kesaksian Yohanes, telah meminta dia memblokir akses Tutut untuk mendaftarkan akta badan hukum *TPI* ke Sisminbakum. "Awalnya saya menolak karena itu melanggar peraturan," kata Yohanes. Namun, setelah dibujuk salah seorang direktur PT Sarana, akhirnya Yohanes setuju melaksanakan pemblokiran.

Setelah memblokir, masih menurut



Kesaksian Mantan Orang Dalam

Kementerian Hukum membatalkan pengesahan badan hukum versi Hary Tanoesoedibjo. Belum otomatis mengembalikan *TPI* ke tangan Tutut.

Yohanes, kubu Hary Tanoe terus beraksi. Kali ini dia memerintahkan orang-orangnya—selaku operator Sisminbakum—membuka blokir sistem pada hari yang sama. Akta perubahan badan hukum PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia versi Hary Tanoe disetor ke dalam sistem. "Lalu mereka menutup akses kembali," kata Yohanes.

Kesaksian Yohanes kontan mengguncang peta pertarungan di *TPI*. Testimoni ini diyakini bakal mengubah klaim kepemilikan stasiun televisi yang berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah tersebut.

Sebulan yang lalu, tepatnya 8 Juni 2010, Kementerian Hukum memutuskan membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-07564 Tahun 2005 tentang perubahan kepemilikan Cipta Televisi Pendidikan Indonesia. Berdasarkan su-

rat bertanggal 21 Maret 2005 ini, 75 persen saham *TPI* beralih menjadi milik PT Media Nusantara Citra (MNC), perusahaan Hary Tanoe.

Adalah tim bentukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar yang berperan mendorong kesaksian Yohanes. Menteri Patrialis membentuk tim ini setelah muncul pengaduan bertubi-tubi dari kubu Siti Hardijanti. Tim dibentuk setelah tercium aroma kejanggalan dalam proses penerbitan pengesahan perubahan badan hukum *TPI*.

Rizaldi Limpas, anggotastaf khusus Menteri yang berlatar belakang jaksa, ditunjuk memimpin tim. "Saya sengaja memilih orang yang tidak terlibat dalam proses perubahan akta di Sisminbakum," kata Patrialis di lobi gedung Kementerian Hukum, Kamis pekan lalu.

Tim Rizaldi diperkuat empat anggota,

Yohanes Waworuntu saat dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta.

yakni seorang notaris independen, orang pejabat Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum, dan dua ahli dari Direktorat Administrasi Badan Hukum. Mereka diperlukan untuk memahami mekanisme pengesahan badan hukum dan mengakses data Sisminbakum.

Proses mendapat kesaksian Yohanes cukup berliku. Pada saat dimintai keterangan tim, Yohanes yang divonis 5 tahun oleh Mahkamah Agung tengah menjalani perawatan karena serangan jantung. Saat itu ia berstatus tahanan yang dibantarkan karena sedang gering.

Dua kali tim menyambangi Yohanes. Kunjungan pertama untuk membebas kesaksian. Pada kunjungan kedua tim merasa perlu merekam kesaksian Yohanes. Rupanya tim tak ingin ambil risiko. "Mungkin mereka takut sayadak panjang umur," kata Yohanes sambil terkekeh.

Tim Rizaldi juga mengkaji kesaksian sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Hukum yang terkait



Patrialis Akbar
Ruang PT Sarana
Rekatama
Dinamika (kanan).



TEMPO/ADRI PRANTO

ngan pengesahan PT CTPI. Zulkarnaen Lubis dan Syamsudin Manan Sinaga, dua mantan direktur jenderal di Kementerian Hukum, juga diminta keterangan. Zulkarnaen diminta keterangan dari dalam Penjara Cipinang karena statusnya sebagai tahanan perkara Sisminbakum.

Siti Hardijanti, si pelapor, tak luput diminta keterangan. Putri mantan penguasa Orde Baru ini diminta keterangan dua kali. Selain di kantor Kementerian Hukum, tim menyambangi kediamannya di Cendana. "Karena yang bersangkutan mengaku sakit flu," kata Rizaldi.

Total, tim telah mengumpulkan keterangan dari 14 orang. Hartono dan Hary Tanoesoedibjo juga diundang untuk memberikan keterangan. "Kami menitipkan pesan. Kalau tak bisa, biar kami yang datang," kata Rizaldi. Namun Hary ataupun Hartono memilih tak hadir. Mereka mengutus dua pengacara.

Tim menilai pengacaranya tak memiliki kompetensi untuk menjelaskan duduk perkara. "Kami ingin keterangan langsung dari Hary Tanoë," ujar Rizaldi. Hary kabarnya menunggu proses pengadilan. "Padahal ini bukan persoalan pengadilan," kata Rizaldi. "Ini soal kewenangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mengenai Sisminbakum."

Menurut keterangan Syamsudin Sinaga, mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, pihaknya tidak tahu-menahu proses pemblokiran itu. "Ini kejanggalan," kata Rizaldi. Langkah pemblokiran Sisminbakum haruslah berdasarkan perintah pejabat yang berwenang, seperti Menteri Hukum dan Hak Asasi, Dirjen Administrasi Hukum Umum, atau pejabat lain yang ditunjuk.

Kejanggalan lain juga terkuak. Sistem dalam Sisminbakum ternyata tidak hanya bisa dikendalikan dari Direkto-

rat Administrasi Hukum Umum. Kendali bisa dilakukan pihak luar, seperti terbukti dalam kasus blokir akta TPI. Tentu saja ini berbahaya karena bisa menjadi pintu bagi pihak yang sengaja ingin mengutak-atik dokumen hukum. "Itu kewenangan negara yang tidak dapat didelegasikan," kata Rizaldi.

Proses pemblokiran juga tak kalah aneh. Pada hari yang sama, sistem mengalami penutupan dan pembukaan kembali akses. Temuan tim menunjukkan, setelah akses dibuka untuk notaris Bambang Wiweko, sistem diblokir kembali. "Ini tidak lazim," kata Rizaldi. "Blokir tidak bisa dibuka dan ditutup dalam waktu satu hari. Karena harus ada proses dan prosedur panjang yang dilampai." Lebih aneh lagi, tim Rizaldi tidak menemukan satu nota pun yang berhubungan dengan alasan penutupan.

Ketidaktahuan Dirjen Administrasi Hukum Umum dalam proses blokir, alur pemblokiran yang janggal, membuat tim menilai bahwa proses pengesahan perubahan badan hukum TPI cacat hukum. "Karena dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang," ujar Rizaldi.

Menteri Hukum Patrialis, setelah mendapatkan adanya prosedur yang disalahi, menyatakan bahwa menjadi tugas Departemen Hukum untuk memberikan keadilan. "Nilai keadilan itu, ya, dengan mencabut surat keputusan sebelumnya," ujarnya.

Kubu Tutut lega dengan keputusan ini. "Ini keputusan yang tepat," kata Harry Pontoh, pengacara Siti Hardijanti. Proses persetujuan perubahan akta PT CTPI tidak benar dan tidak sesuai dengan hukum administrasi negara. Dengan pembatalan ini, yang berlaku adalah pengesahan kepemilikan sebelumnya, tanpa 75 persen saham MNC. "Logikanya kan begitu," katanya.

Akhir dari pertarungan tentu tidak mudah. Kepemilikan TPI tidak otomatis beralih ke tangan Tutut. Kubu la-

wan punya suara berbeda. "Keputusan pembatalan itu keputusan ngawur," kata pengacara Hary Tanoesoedibjo, Hotman Paris Hutapea. Menurut Hotman, surat keputusan kehakiman dibatalkan hanya dengan surat biasa, ditandatangani direktur perdata yang tiga tingkat di bawahnya. "Itu surat ngawur," katanya.

Hotman mengaku kliennya tidak pernah dipanggil Kementerian Hukum untuk menanyakan statusnya. "Disurati pun tidak," katanya. Bahkan, menurut Hotman, surat pembatalan tidak dikirimkan kepada mereka. Surat pembatalan baru diterima setelah pihaknya melayangkan surat. "Saya menduga surat pembatalan muncul karena ada lobi," katanya.

Yang tidak masuk akal, kata Hotman, surat pembatalan bertanggal 8 Juni 2010 itu menyebut rapat umum pemegang saham luar biasa pada 2005, yang diselenggarakan Hary Tanoë, cacat hukum. "Kementerian Hukum tidak berwenang menilai sah-tidaknya sebuah RUPS," kata Hotman. Menurut dia, kewenangan Kementerian Hukum hanya menyangkut pencatatan.

Hadirnya putusan pembatalan ini, menurut Hotman, mendahului putusan pengadilan. Di luar negeri, kasus seperti ini bisa dianggap penghinaan terhadap pengadilan atau *contempt of court*. "Bisa dipenjarakan," tuturnya.

Menurut Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Aidir Amir Daud, surat pembatalan itu telah melalui tahap prosedural. "Jika dianggap menyalahi, bisa diperkarakan ke Pengadilan Tata Usaha Negara," ujarnya. Aidir menjelaskan, di Kementerian Hukum, keputusan menteri bisa ditandatangani dirjen dan direktur yang telah diberi wewenang.

Aidir menegaskan bahwa pembatalan ini adalah saran dari tim yang dipimpin Rizaldi. Kemudian didisposisikan Menteri kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum. "Kebetulan direktur sedang ke luar kota sehingga surat ditandatangani pejabat pelaksana. Supaya cepat dikirimkan," kata Aidir. Langkah ini penting mengingat telah ditemukan adanya produk hukum yang salah dan tidak bisa dibiarkan. "Pembayaran juga bisa dipidana," katanya.

Terbitnya pembatalan keputusan perubahan saham membuat peta perbutan TPI semakin seru. Patrialis menegaskan, meskipun pihaknya merilis surat pembatalan, surat itu tidak menegaskan mana pihak yang benar, mana pihak yang salah. "Posisi kami netral saja," kata Patrialis. "Mengenai sengketa kepemilikan, biar pengadilan yang memutuskan."

Ramidi

Denny Kailimang:

Tutut Tak Pernah Menyetujui Pengalihan Saham

BERBEKAL surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Siti Hardijanti Rukmana, 61 tahun, mengklaim sebagai pemilik sah PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia. Sabtu dua pekan lalu, sekelompok orang yang mengaku sebagai pendukung perempuan yang akrab disapa Tutut itu mendatangi kantor TPI di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Mereka menempel dan menyebarkan pengumuman tentang struktur direksi dan komisaris TPI yang baru.

Peristiwa yang berlangsung ketika ada acara bakti sosial itu menandai memanasnya perseteruan Tutut dengan Hary Tanoesoedibjo, 45 tahun. Hingga kini, putri mendiang presiden Soeharto itu belum bersedia memberikan keterangan langsung ke publik. Surat permohonan wawancara yang dikirim *Tempo* ke rumah pribadinya tak direspons. "Sampai saat ini Mbak Tutut belum bersedia diwawancarai," kata pengacara Tutut, Denny Kailimang.

Akhirnya, Denny Kailimang sendiri yang menjawab pertanyaan Erwin Daryanto dari *Tempo*, Jumat pekan lalu, di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan.

Apa arti surat Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu terhadap kedudukan Tutut di TPI?

Saya rasa surat itu untuk menanggapi surat kami sebelumnya, 30 November 2009. Kami menanyakan soal pengalihan saham di TPI.

Bukankah sudah ada komitmen dari Tutut untuk memberikan 75 persen saham TPI ke PT Berkah?

Itu akan dilakukan setelah semua utang diselesaikan, dan harus dihitung ulang lagi. Di *investment agreement* itu belum ada persetujuan dari Mbak Tutut tentang pengalihan saham.

Bagaimana dengan surat kuasa yang diberikan Tutut ke Hary Tano?

Memang ada surat kuasa itu, untuk mengelola TPI, mewakili dan atas nama pemegang saham, ke Hary Tano. Yang perlu dicatat dalam surat kuasa itu, tidak ada pengaturan soal pengalihan saham.

Salah satu hal yang memicu persoalan

adalah soal tanah TPI di Taman Mini, benar begitu?

Ibu Tutut tidak sepakat dengan hitung-hitungan yang disodorkan Hary Tano, makanya dia berniat menjual TPI ke Hary Tano. Syaratnya, TPI harus keluar dari tanah di Taman Mini. Karena wasiat mendiang Ibu Tien Soeharto, tanah itu tidak boleh dialihkan ke pihak ketiga.

Kenapa Tutut tidak mau bertemu dengan Hary Tano?

Kalau iktikadnya baik, kenapa tidak dari 18 Maret 2005 itu mendatangi Ibu Tutut? Ini hanya *lip service*. Hary Tano tidak pernah menghubungi Ibu Tutut.

Hary Tano melaporkan surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu ke Kepolisian Daerah?

Dengan senang hati, kami minta ini diproses agar transparan, semua benjerang.

Apa pertimbangan Tutut memasang nama Japto Soerjosoemarno di jajaran direksi, dan Syamsir Siregar sebagai komisaris?

Pak Japto sangat dekat dengan Keluarga Cendana. Dia memang mau membantu Mbak Tutut. Karena Pak Japto dekat dengan Pak Syamsir, Pak Japto minta bantuan. Karena bekas intel, dia tahu semua seluk-beluk kasus ini. Pak Syamsir tentunya tidak mau dipasang begitu saja, kalau tidak tahu duduk persoalannya.

Siti Hardijanti Rukmana

PUTRI sulung mantan presiden Soeharto ini mendirikan puluhan perusahaan di banyak sektor. Tapi jalan tol adalah bisnisnya yang paling populer. Ia pernah dijuluki Ratu Jalan Tol. Lewat PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk., perempuan kelahiran Jakarta, 23 Januari 1949, ini membangun jalan tol di Jakarta dan kota-kota lain.

Keistimewaan dari ayahnya membuat Siti leluasa mengguritkan bisnisnya dengan kredit gampang dari bank-bank pemerintah. Ia mendirikan Bank Yakin Makmur. Lalu membuat *Televisi Pendidikan Indonesia*. Tapi bisnis-bisnis itu kolaps seiring dengan krisis ekonomi. Perusahaan-perusahaan Siti itu menjadi pesakitan di Badan Penyelamatan Perbankan Nasional dan harus membayar ratusan miliar utang. Utang-utang di TPI salah satu yang tak terbayar. Maka ia memerlukan seorang Hary Tano untuk menutup gunung utang tersebut.

PERSETERUAN Presiden Grup Media Nusantara Citra Hary Tanoesoedibjo, 45 tahun, dan Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut, 61 tahun, memanas. Lewat berbagai iklan di media termasuk *running text* di tiga stasiun televisi yang kini di bawah kendali Hary, *Global TV*, *Televisi Pendidikan Indonesia (TPI)*, dan *Rajawali Citra Televisi Indonesia*, pihak Hary berkukuh merekalah yang paling berhak atas kepemilikan TPI.

Hary menegaskan kepemilikan sahamnya di TPI berjalan sesuai dengan prosedur dan kesepakatan yang telah ia tanda tangani dengan Siti Hardijanti Rukmana. Master bisnis lulusan *Carlton University*, Kanada, ini juga menegaskan tak akan menjual 75 persen saham yang dibelinya dari Tutut. Kamis dua pekan lalu, didampingi sejumlah petinggi TPI, Hary datang ke kantor *Tempo*. Berikut ini wawancara *Tempo* dengan Hary.

Bagaimana sebenarnya perjanjian awal Anda dengan Tutut?

Pada 2002 kami dari PT Berkah Karya Bersama diminta membantu masalah keuangan yang dihadapi Mbak Tutut yang waktu itu sedang terlilit utang, baik utang pribadi maupun perusahaan. Kami memutuskan membantu, dengan limit US\$ 55 juta. Kompensasinya, kami diberi 75 persen saham di TPI.

Selain US\$ 55 juta itu, dalam kesepakatan tersebut apakah diatur kewajiban Anda yang lain?

Tidak ada. Komitmen hanya sampai US\$ 55 juta. Apabila (nilai) penyelesaiannya di atas itu, itu adalah tanggung jawab pribadi Mbak Tutut.

Tutut bermaksud mengambil kembali 75 persen saham yang sekarang Anda kuasai?

Ya, setelah TPI membaik, Mbak Tutut meminta TPI dikembalikan. Mbak Tutut mengirim surat tanggal 20 Desember 2004. Isinya karena kondisi keuangannya sudah membaik, bermaksud membayar kembali biaya yang dikeluarkan PT Berkah guna menyelesaikan utang-utang TPI dan Citra Group tersebut.

Apa yang membuat Anda keberatan?

Kami di jajaran direksi terus berkomunikasi, sampai pada 7 Maret 2005 di rapat *board* Bimantara disepakati menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) dan memanggil Mbak Tutut. Kami memberikan tiga alternatif kepada Mbak

Hary Tanoesoedibjo:

Kami Akan Bertahan

Tutut. Pertama, kami jual saham dengan harga Rp 630 miliar. Kedua, kami beli saham Mbak Tutut di TPI yang 25 persen senilai Rp 210 miliar. Atau kembali ke perjanjian awal, 75 : 25 persen. Keputusan itu langsung dilaporkan ke Tutut?

Ya, keesokan harinya, 8 Maret 2005, saya bersama rekan-rekan Grup Bimantara melapor ke Mbak Tutut di kediamannya. Kami minta Mbak Tutut mengambil sikap sampai 17 Maret, satu hari sebelum digelar RUPS pada 8 Maret. Namun, sampai RUPS digelar, kami tidak menerima tanggapan Mbak Tutut. RUPS pun memutuskan seperti semula, yakni tetap 75 : 25 persen, sesuai dengan perjanjian awal. Beberapa hari setelah RUPS, kami menerima surat dari Mbak Tutut yang intinya dia berminat membeli saham kami senilai Rp 630 miliar.

Anda tidak menyetujui permintaan Tutut itu?

Sulit bagi kami. TPI ini kan bagian dari perusahaan publik. Keputusannya, sesuai dengan RUPS 18 Maret itu, tidak akan kami jual. Kalau kami mau menjual, harus mengubah RUPS.

Tutut juga menggelar RUPS sehari sebelumnya, Anda tidak mengetahui?

Bisa saya katakan, kalau itu ada, itu tidak sah dan ilegal.

Tapi kemudian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membatalkan RUPS yang Anda gelar, apa tanggapan Anda?

Itu sepihak. Seharusnya Direktorat Jenderal Perdata tidak mengeluarkan surat seperti itu sebelum ada penjelasan dari kami. Kalau pun sampai ada pembatalan, berarti terjadi suatu penipuan dan penggelapan oleh Mbak Tutut. Kami telah melaksanakan kewajiban kami, melunasi semua utang Mbak Tutut. Hak kami mendapat 75 persen saham di TPI.

Anda yakin dalam posisi yang kuat?

Sangat kuat, dan apa yang saya sampaikan ini bukan cerita. Ada datanya semua. Ada panggilan RUPS-nya, ada surat Mbak Tutut, dan ada surat kuasanya. Semua lengkap. Ada juga dokumen notaris untuk RUPS.

Selama ini yang sebenarnya tidak ingin



menyelesaikan masalah itu secara baik-baik Anda atau Tutut?

Sejak RUPS 2005 sampai detik ini, saya tidak bisa bertemu dengan Mbak Tutut. Meskipun telah saya upayakan berkali-kali, baik secara langsung, lewat SMS, maupun melalui orang.

Kenapa kemudian Anda membawa kasus ini ke polisi?

Banyak gerakan yang membahaya-

Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo

NAMANYA muncul ketika konglomerat lain bangkrut di hajar krisis ekonomi 1997. Lewat PT Bhakti Investama Tbk., Hary mengakuisisi banyak perusahaan yang kolaps atau membeli aset-aset perusahaan yang dijual murah di Badan Penyelamatan Perbankan Nasional. Bendoel, Astra, Salim Oleochemical, Indomaret, dan AGIS (agen Sony) adalah sebagian yang dibeli Hary.

Hary mendirikan Bhakti pada usia 26 dengan modal Rp 200 juta, sepulang menggondol *bachelor of commerce* dari Carleton University dan *master business administration* dari Ottawa University. Kedua universitas itu ada di Kanada.

Hoki bisnis laki-laki kelahiran Surabaya, 26 September 1965, ini kian moncer setelah bergabung dengan Bimantara Group milik Bambang Trihatmodjo. Tahun lalu, majalah *Forbes* memasukkan namanya ke daftar "40 Orang Terkaya Indonesia" dengan jumlah harta mencapai Rp 4,1 triliun.

kan TPI, antara lain adanya percobaan untuk mengubah *specimen* dari rekening bank. Ini dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan membawa surat dari Kementerian Hukum dan HAM yang ditandatangani oleh pelaksana hariannya, Rieke Amarita. Rekening TPI sekarang diblokir. Karena itu, TPI akan mensomasi bank tersebut. Kenapa hanya gara-gara selembar surat itu, rekening diblokir?

Kami mendapat informasi, salah satu yang membuat Tutut marah kepada Anda adalah Anda akan menjual aset tanah TPI di Taman Mini Indonesia Indah?

Begitu. Ini dari rapat direksi. TPI itu kan tanahnya luas sekali. Banyak yang *nganggur*, kenapa tidak dijual saja, untuk membangun studio yang besar atau melengkapi peralatan. Tapi, karena keputusan menjual itu tidak bulat, tidak dijalankan. Ini pembusukan, seakan-akan dikesankan kami mau jual tanah.

Apa harapan Anda sekarang?

Intinya, kami harus bertemu dengan Mbak Tutut. Kalau setiap hari hanya menghadirkan pengacara ataupun orang ketiga, tidak akan selesai.

Anda akan terus melawan dalam perkara ini?

Tentu kami akan bertahan. ■



Jatuh-Bangun Televisi Dangdut

Siaran Televisi Pendidikan Indonesia tidak lagi sesuai dengan namanya. Lebih dipersepsikan sebagai saluran dangdut.

SETIAP pukul 19.00, Muhammad Athala Fawaztaqie duduk manis di depan pesawat televisi. Murid taman kanak-kanak itu selalu menunggu film animasi Upin-Ipin. "Kalau dipindah ke acara lain, dia akan menangis," kata Naning, ibu anak itu, Rabu pekan lalu.

Adalah stasiun televisi TPI yang menayangkan cerita Upin-Ipin dan kawan-kawan. Selama tiga puluh menit, tokoh anak kembar asal Malaysia itu menghiasi layar kaca. Serial itu sudah diputar berulang-ulang tapi minat anak-anak menonton tetap tinggi. "Meskipun ceritanya itu-itu saja, anak saya selalu *nonon*," ujar warga di Perumahan Sukun Pondok Indah, Malang, Jawa Timur, itu.

Sekretaris Perusahaan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Wijaya Kusuma Subroto mengakui program acara di TPI lebih banyak ditujukan untuk anak-anak dan wanita. "Kami menggarap pasar menengah ke bawah," kata Wijaya Kusuma kepada *Tempo*, Kamis

pekan lalu.

Selain menayangkan Upin-Ipin, stasiun televisi yang bermarkas di kawasan Taman Mini, Jakarta Timur, ini memiliki beberapa program unggulan untuk anak-anak. Misalnya film animasi *Animalia* yang diputar setelah Upin-Ipin, serta film kartun *Tom and Jerry* dan *Bernard Bear*.

Wijaya mengakui TPI sekarang jauh berbeda dibandingkan dengan ketika pertama kali siaran pada 1 Januari 1991. Mulanya, televisi yang dibangun Siti Hardijanti Rukmana itu berfokus menyuguhkan program pendidikan. Mbak Tutut, panggilan putri sulung mantan presiden Soeharto, menargetkan acara pendidikan mendapat porsi terbesar, sekitar 33,2 persen. Disusul hiburan dan iklan. "Iklan dan hiburan pun bersifat mendidik," kata Siti, seperti dikutip majalah *Tempo* edisi 26 Januari 1991.

Pelajaran untuk siswa sekolah dasar hingga perguruan tinggi muncul setiap pagi. Pelajaran yang ditayangkan antara lain matematika, fisika, biologi, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Pa-

ket siaran pendidikan itu disiapkan oleh Pusat Teknologi Komunikasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sekarang acara pelajaran formal sudah tidak ada bekasnya. Wijaya mengakui acara seperti itu sudah digusur dan diganti dengan pendidikan non-formal. "Upin-Ipin itu kan juga mengajarkan pendidikan pada anak-anak, misalnya mengajak salat atau puasa," ujarnya.

Menurut Wijaya, acara pendidikan itu mulai hilang pada 1997, ketika TPI berubah menjadi televisi swasta. Dengan status televisi swasta, kata Wijaya, TPI harus bersaing dengan televisi lain untuk memperoleh iklan. "Pendidikan porsinya sudah tidak banyak, sekarang acara komersial lebih diutamakan," katanya.

Wijaya menyodorkan data program TPI tahun lalu. Porsi terbesar di acara hiburan dan musik, hingga 48,1 persen. Tempat kedua, iklan, 20 persen. Disusul pendidikan dan kebudayaan 10,1 persen. "Yang pendidikan sekitar 10,1 persen saja," kata dia. Adapun berita 8,9 persen, agama 3,9 persen, dan olahraga 3,5 persen.

Musik dangdut hampir mendominasi acara musik di TPI. "Dangdut itu ide-

...tik dengan TPI," ujar Wijaya. Televisi ini sukses menggelar *Kontes Dangdut TPI*, ajang pencarian bakat penyanyi dangdut terbesar di Indonesia. Acara dangdut lain yang disiarkan secara langsung dari studio TPI adalah *Viva Dangdut Mania* dan *Dangdut Never Dies*.

Tak aneh, kata Wijaya, TPI berdasarkan riset dipersepsikan sebagai televisi dangdut. Hasil survei TPI bekerja sama dengan Markplus juga menyebutkan masyarakat menganggap TPI sudah ketinggalan zaman. "Kami ingin mengubah *image jadul* itu," kata Wijaya. Tahun ini, kata dia, perusahaan akan mengganti logo dan nama agar lebih banyak menggaet pengiklan. "Tapi musik dangdut tetap sebagai ciri khas."

Siti Hardijanti mengantongi izin penyiaran untuk TPI dari Menteri Penerangan pada 1 Agustus 1990. Empat bulan kemudian mereka sudah mulai siaran dengan menumpang di TVRI. Waktu itu Soeharto, sang ayah seketua presiden, meresmikan beroperasinya TPI di Studio 12 TVRI, Senayan. "Ketika baru berdiri masih disokong pemerintah," kata Wijaya.

Pada awal siaran, kata Wijaya, TPI hanya muncul empat jam tiap hari dimulai pukul 08.00. Acara dibuka dengan berita *Selamat Pagi Indonesia*. Program pendidikan disiarkan selama dua jam sejak pukul 08.00. Mulai 8 Juni 1991, tayangannya diperpanjang menjadi enam setengah jam. TPI diperkirakan bisa menjangkau 6,4 juta pemilik televisi di Indonesia atau ditonton 30 juta pasang mata. Sasarannya siswa sekolah dan ibu rumah tangga.

Siti Hardijanti mengatakan TVRI tidak menggratiskan fasilitas yang dipakai TPI tersebut. TPI harus menyerahkan 20 persen pendapatannya dari iklan untuk TVRI. "Kami memakai sarana TVRI itu tidak gratis," kata putri sulung Soeharto ini, sebagaimana dikutip majalah *Tempo* edisi 26 Januari 1991.

Penyisihan kontribusi iklan itulah yang hingga kini masih menimbulkan persoalan. Direktur Keuangan TVRI Antar Sianturi mengatakan TPI belum melunasi kewajiban membayar kontribusi iklan. "Nilainya sekitar Rp 11 miliar," kata Antar, Jumat pekan lalu.

Perjanjian kontribusi iklan itu bersumber dari Keputusan Menteri Penerangan pada 1990, yang menetapkan televisi swasta harus menyisihkan 12,5 persen pendapatan iklannya untuk Yayasan TVRI. Kebijakan itu berlaku 20 tahun untuk lima televisi swasta: TPI, RCTI, SCTV, ANTV, dan Indosiar.

Kebijakan ini berakhir pada Januari



Unjuk rasa Serikat Pekerja PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Salah satu program acara musik dangdut yang mendominasi TPI (kanan).



2000, setelah TVRI diperbolehkan menayangkan iklan. Sewaktu perjanjian ini berakhir, lima stasiun televisi swasta itu masih memiliki tunggakan utang ke TVRI. "Tapi RCTI dan SCTV sudah melunasi," kata Antar.

Menurut Antar, pada 2007, TVRI menggugat TPI ke pengadilan agar membayar utang kontribusi iklan tersebut. Namun pengadilan hanya mengabulkan sebagian gugatan TVRI. Mengutip putusan pengadilan, kata Antar, TVRI hanya berhak memperoleh pembayaran kontribusi iklan dari TPI Rp 1,9 miliar.

Antar mengatakan TPI sebenarnya sudah mau membayar utang setelah putusan itu diketuk majelis hakim. Namun TVRI tidak mau karena jumlahnya jauh dari perhitungan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang mengaudit keuangan TVRI, menyebut utang TPI mencapai Rp 11 miliar. TVRI memilih meminta banding

atas putusan tersebut. Namun majelis hakim banding menolak permohonan tersebut. Kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung pada 23 Juni 2008 juga ditolak.

Wijaya mengakui ada sengketa kontribusi iklan yang dibawa ke meja hijau. "Sempat jadi masalah dibawa ke pengadilan, sudah kasasi. Sekarang sudah selesai," ujarnya.

TPI memang tidak pernah sepi dari masalah. PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia pernah dipailitkan majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 14 Oktober 2009. Putusan pailit itu dibatalkan Mahkamah Agung. Baru-baru ini, pemegang saham bertempur di pengadilan memperebutkan kepemilikan saham. Sepertinya, TPI harus "jatuh-bangun" — seperti judul lagu dangdut — di tengah persaingan televisi swasta di Indonesia.



TEMPO/IMAM SUKARNI

Calon pengganti Bambang sebenarnya sudah disiapkan jauh hari. Oktober tahun lalu, Markas Besar Kepolisian menurunkan Badan Intelijen Keamanan buat melaksanakan "penyelidikan kompetensi secara tertutup dengan mengutamakan obyektivitas". Dipimpin Direktur D Brigadir Jenderal Hertian A. Yunus, tim dari Badan Intelijen menyelidiki lima perwira tinggi: Nanan Soekarna, Oegroseno, Imam Sudjarwo, Timur Pradopo, plus Komisaris Jenderal Susno Duadji, ketika itu Kepala Badan Reserse Kriminal.

Tim diperintahkan antara lain pergi ke Banten, Sulawesi Tengah, Bangka Belitung, Sumatera Utara, juga Kalimantan Barat—wilayah tempat para calon pernah bertugas. Empat nama yang diselidiki termasuk dalam daftar perwira yang diajukan menjadi calon Kepala Kepolisian. Sedangkan Susno Duadji kini meringkuk di tahanan sebagai tersangka kasus korupsi.

Semua kandidat mendapat penilaian positif. Dalam kehidupan keluarga, mereka bahkan dinilai seragam: "sederhana, harmonis, dan agamis". Hal lain yang dinilai antara lain gaya kepemimpinan, pembawaan sehari-hari, juga hubungan para calon dengan lembaga lain. Walhasil, tak ada sama sekali catatan negatif dalam nota dinas ber-

klasifikasi rahasia tertanggal 8 Oktober 2009 itu (lihat "Mereka yang Hidup 'Sederhana'").

Seorang perwira tinggi kepolisian meragukan proses penyelidikan itu dilakukan secara mendalam. Sebab, pada hasil temuan penyelidikan, semua perwira mendapat nilai baik, termasuk dalam hal kehidupan keluarga itu. "Kriterianya tidak jelas," katanya. "Terkesan hanya *copy-paste*."

Sumber itu lalu menunjuk kesimpulan tim Badan Intelijen yang bertolak belakang dengan dugaan rekening bermasalah milik sejumlah perwira tinggi. Ada juga perwira dalam daftar "penyelidikan" Badan Intelijen yang kemudian justru tersangkut masalah hukum.

Pada bagian akhir nota disebutkan peringkat para calon yang diselidiki. Susno Duadji—pada Oktober 2009 sedang menjadi sorotan publik karena perannya dalam perseteruan kepolisian versus Komisi Pemberantasan Korupsi—justru menempati peringkat pertama. Kurang dari setengah tahun setelah "penyelidikan" itu, Susno ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Peringkat kedua hingga kelima pada hasil penyelidikan itu ditempati Imam Sudjarwo, Timur Pradopo, Oegroseno, dan Nanan Soekarna.

Susno Duadji membenarkan perihal

Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan Inspektur Jenderal Nanan Soekarna.

dokumen rahasia itu. "Justru karena dokumen itulah saya dikriminalisasikan," kata Susno seperti dikutip pengacaranya, Muhammad Assegaf.

TEMPO melakukan verifikasi terhadap hasil penyelidikan Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian itu. Karena kehidupan "harmonis dan agamis" sulit diukur, verifikasi hanya dilakukan untuk gaya hidup sederhana. Hasilnya, tafsir "sederhana" versi para perwira polisi itu jauh berbeda dari ukuran normal.

Lihatlah kehidupan di rumah bercokelat di perumahan mewah Tanjung Mas Raya, Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Rumah dua lantai itu tampak asri dengan dua pohon rindang dan taman tertata rapi di teras. Dari sela-sela pintu yang terbuka terlihat ikan arwana bersisik merah berenang di akuarium di ruang tamu. Inilah rumah milik Inspektur Jenderal Imam Sudjarwo, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian.

Berdasarkan sejumlah situs jual-beli properti, rumah di perumahan itu bernilai lebih dari Rp 2 miliar. Pada Januari

Inspektur Jenderal Timur Pradopo
(kedua dari kiri).

pekan lalu, rumah itu terlihat lengang. Mobil Kijang bertulisan Primer Kop-erasi Brigade Mobil Kepolisian RI me-nepi di gerbang rumah. Seorang karya-wan koperasi yang datang mengantar barang membenarkan rumah itu mi-lik Imam Sudjarwo. "Beliau sebentar lagi bintang tiga, calon kuat Kapolri," ujarnya tersenyum lebar.

Rumah pribadi Nanan Soekarna juga tidak bisa disebut sederhana. Terletak di wilayah timur Jakarta, rumah man-tan Kepala Divisi Humas Markas Besar Kepolisian itu terlihat paling besar di-banding rumah-rumah di sekitarnya. Untuk memasuki rumah di atas tanah seluas 2.000 meter persegi itu, tamu harus melalui dua gerbang kayu dua meter.

Di antara pagar pertama dan kedua terlihat taman berlantai batu alam dan rerumputan. Di taman yang terlihat la-pang berdiri gazebo. "Ini rumah Pak Nanan, tapi beliau tidak ada di tempat," ujar Widodo, penjaga rumah, kepada *Tempo*. Nilai rumah itu kuat diduga di atas total kekayaan Nanan yang terakhir kali dilaporkan ke Komisi Pemberan-tasan Korupsi, delapan tahun lalu, sebe-sar Rp 893.765.926 dan US\$ 50 ribu.

Oegrosono, yang ditemui di rumah di-nasnya di Jalan Sudirman, Medan, me-ngatakan punya rumah di Jalan Suci, Ciracas, Jakarta Timur, dan Kabupa-ten Sidoarjo, Jawa Timur. Ia mengaku membeli rumah di Jalan Suci Rp 40 juta pada 1990-an. Tapi, menurut dia, ba-ngunan itu sudah dirobohkan karena ti-dak memiliki izin pendirian. "Sedang-kan rumah di Sidoarjo nyaris terbenam lumpur Lapindo," katanya. "Kalau ada yang beli, saya siap jual." Sayangnya, pen-gakuan Oegrosono tak bisa diverifikasi. Sebab, hingga kini ia belum menyerahkan daftar kekayaan ke Komisi Pem-berantasan Korupsi.

Dua perwira tinggi, Yusuf Mangga-barani dan Ito Sumardi, yang masuk bursa, juga jauh dari kata sederhana. Di komputer Pojok Anti-Korupsi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, ter-catat Yusuf terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 2007 sebesar Rp 1.435.272.465. Adapun Ito dalam laporan Juli 2009 membukukan kekayaan Rp 3.226.107.820. Ito juga tinggal di kom-pleks Tanjung Mas Raya. "Tapi saya beli ketika daerah itu masih menjadi tempat jin buang anak," katanya, tiga pekan lalu. "Jadi harganya masih murah seka-li." Soal namanya yang masuk bursa kandidat Kapolri, Ito merendah, "Saya



tidak menyangka, soalnya banyak nama lain yang lebih baik dari saya."

Kendati lebih kecil banding tetangga-tetangganya, rumah pribadi milik In-spektur Jenderal Timur Pradopo di kawasan Sektor IX, Bintaro, pun tidak sederhana. Berdiri di atas tanah 400 meter persegi, rumahnya bercat kela-bu dengan pagar hitam terlihat sepi. Se-bagai Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, sang jenderal tinggal di rumah di-nas.

Timur Pradopo, yang dihubungi pada Jumat pekan lalu, menolak berkomen-tar tentang kemungkinan menjadi ca-lon Kepala Kepolisian. "Maaf saya ti-dak mau menanggapi masalah itu ya, terima kasih," ujarnya. Para jenderal lainnya juga menolak menanggapi ma-salah yang dianggap sensitif ini.

Muhammad Assegaf, pengacara Sus-no Duadji, menyangkal kekayaan kli-ennya diperoleh dari cara tak halal. "Klien saya punya usaha, jadi kekayaan itu wajar. Angkanya juga tidak tinggi-tinggi amat," katanya.

Kepala Divisi Hubungan Masyara-kat Markas Besar Kepolisian Inspek-tur Jenderal Edward Aritonang menga-takan, institusinya tidak menyiapkan calon Kepala Kepolisian sejak setahun yang lalu. "Surat itu ilegal dan di luar sistem," katanya, menanggapi hasil ke-simpulan Badan Intelijen Keamanan tentang penyelidikan para calon.

Soal harta kekayaan para perwira, dia membenarkan masih ada yang be-lum melaporkannya ke Komisi Pembe-rantasan Korupsi. Menurut dia, Jende-

ral Bambang Hendarso telah melayang-kan surat edaran kepada mereka yang lalai untuk segera melaporkan harta kekayaan mereka.

Pengajar Perguruan Tinggi Ilmu Ke-polisian, Bambang Widodo Umar, mene-gaskan perlunya Komisi Kepolisian Na-sional menelusuri sumber kekayaan para kandidat. Itu penting, kata dia, agar kan-didat yang terpilih bebas dari persoalan rekening janggal. "Presiden harus mem-berikan kewenangan itu kepada Komisi Nasional Kepolisian," katanya.

Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Azin Syamsudin menegaskan hal yang sama. Menurut dia, kriteria bebas dari rekening mencu-rigakan akan menjadi perhatian utama Dewan ketika melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap sang calon.

Komisi Hukum Dewan, menurut poli-tikus Partai Golkar itu, akan membent-uk tim yang menggali rekam jejak se-tiap calon. Tim akan turun ke daerah tempat para kandidat pernah berkarier. Jika ditemukan kejanggalan, kata dia, Dewan akan menolak sang calon. "DPR memiliki kewenangan untuk menolak," ujarnya.

Juru bicara kepresidenan, Julian Al-drin Pasha, mengatakan belum me-ngetahui isu calon Kepala Kepolisian. Menurut dia, bisa saja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah membahas soal itu. "Namun belum perlu disam-paikan ke masyarakat."

Setri Yasra, Wahyu Dhyatmika, Oktamandjaja Wiguna,
Yullawati Nalia Rifika, Jonlansyah (Tangerang Selatan),
Soetana Monang Hasibuan (Medan)



Pilih-pilih Kawan Sendiri

Para perwira menghimpun dukungan untuk meraih jabatan Kepala Polri yang baru. Kedekatan dengan Cikeas jadi nilai tambah.

INDONESIA Police Watch kini punya kesibukan baru. Menjelang akhir masa tugas Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, lembaga swadaya masyarakat yang aktif mengawasi kinerja kepolisian ini rajin menghimpun data dan dokumen mengenai rekam jejak para calon Tribrata-1—kode sandi untuk pemimpin polisi. "Ini baru sebagian," kata Neta S. Pane, ketua presidium lembaga itu, sambil menunjukkan segepok dokumen di meja kerjanya, Kamis pekan lalu.

Dokumen itu berisi informasi perjalanan karier delapan perwira tinggi yang kini santer disebut-sebut sebagai calon terkuat Kapolri berikutnya. Setiap calon ditelisik dari dua aspek: rekam jejak dan kendala yang mungkin bisa menghambat promosi mereka. "Sebenarnya ada satu lagi faktor penting: dukungan

dari Mabes Polri," kata Neta tertawa.

Meski kata akhir ada di Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, peran Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri memang tak bisa dibilang kecil. Dialah yang mengusulkan nama calon Kapolri kepada Komisi Kepolisian Nasional. Sebelumnya nama-nama itu dibahas oleh Dewan Kebijakan Jabatan dan Kepangkatan.

Dalam proses penentuan final kelak, Presiden juga hampir dipastikan akan bertanya langsung kepada Bambang Hendarso. "Itu sudah menjadi tradisi," kata Ketua Komisi Kepolisian Nasional Marsekal (Purn.) Djoko Suyanto, ketika dihubungi akhir pekan lalu. "Ketika saya berhenti menjadi Panglima TNI, Presiden juga bertanya, siapa yang saya nilai pantas menggantikan," kata Djoko, yang kini Menteri Koordinator

Perwira tinggi Polri bersama Presiden Yudhoyono di Mabes Polri, Jakarta.

Politik, Hukum, dan Keamanan.

Walhasil, suara internal ini memang jadi salah satu faktor kunci. Bagaimanapun, pemimpin Polri tentu diharapkan bisa merangkul seluruh jabatannya. Karena itulah Komisi Kepolisian juga berencana menghimpun masukan dari para polisi sendiri. "Kami akan meminta pertimbangan teman-teman di Mabes Polri," kata Djoko. "Bagaimana hubungan si calon dengan atasan, dengan bawahan, dengan rekan sekerja, sampai pola hubungan dengan lembaga lain, akan jadi pertimbangan," katanya lagi.

Karenaitulah, kasak-kusuk di Trusmi, tempat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, kini memanas. Tawaran sukses para calon Kapolri kini silih-memetakan dukungan di dalam tubuh kepolisian sendiri.

"Ada lima nama yang kini mendapat apresiasi dari rekan-rekannya karena kinerjanya baik," kata sumber Tempo di kepolisian. Mereka adalah Komjen Yusuf Manggabarani (Wakil Kapolri), Komjen Nanan Soekarna (Inspektur



Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane; staf ahli Kapolri, Kastorius Sinaga; dan Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional Adnan Pandupradja.

Pengawasan Umum), Irjen Imam Soedjarwo (Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan); serta dua Kapolda, yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Timur Pradopo dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Oegroseno. "Saya sering mendengar mereka dipuji," katanya.

Dari kelima nama itu, Indonesia Police Watch menilai Nanan yang memiliki barisan pendukung paling panjang. "Banyak perwira ada di belakang dia," kata Neta. Dari segi pangkat, Nanan memang paling memenuhi syarat. Dia juga yang paling akhir pensiun dibandingkan Ito dan Yusuf, yang sama-sama berintang tiga. "Masa tugasnya sampai tiga tahun lagi," kata Neta Pane.

Selain faktor itu, Nanan dinilai punya kartu truf karena ia lulusan terbaik angkatannya pada 1978. Kariernya melompat cepat sampai menjadi perwira pertama di angkatannya yang dipromosikan menjadi jenderal. Pada 2003, dia sudah menjadi Wakil Kapolda Metro Jaya. Selain Nanan, angkatan 1978 menyumbangkan dua calon lain: Irjen Timur Pradopo dan Irjen Oegroseno.

Yang menarik, ketika Nanan menjadi Wakil Kepala Polda Metro Jaya, Bambang Hendarso adalah Kepala Direktorat Reserse di sana. Karena kesamaan wilayah tugas inilah, Nanan dan Bambang sering disebut-sebut punya hubungan dekat.

Insiden demonstrasi berbuntut kekerasan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara pada Februari 2009 disebut-sebut sebagai bukti lain kedekatan Nanan dan Bambang Hendarso. Akibat unjuk rasa yang menewaskan Ketua DPRD Abdul Aziz Angkat itu, Nanan memang hanya dicopot sementara dari kursi Kapolda Sumatera Utara. Belakangan dia "dipromosikan" menjadi Kepala Divisi Humas Mabes Polri. "Faktor yang menghambat dia cuma soal demonstrasi di Medan itu," kata Neta mengakui.

Saking bersemangatnya, sebagian pendukung Nanan sudah membuat laman Facebook "Kalbar Dukung Komjen Nanan Soekarna Kapolri", Maret lalu. Nanan memang pernah menjadi Kapolda Kalimantan Barat pada 2005. Sayangnya, fan Nanan di Facebook baru 183 orang. Nanan sendiri sampai akhir pekan lalu tidak bisa dihubungi. Telepon seluler yang biasa dia gunakan tidak aktif. Nanan juga tidak tampak di kantornya sepanjang pekan lalu.

Nama berikutnya yang santer disebut memiliki banyak pendukung adalah Irjen Timur Pradopo. Yang unik, selain karena rekam jejak dan pengalaman, kans Timur dinilai besar karena pernah bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Bosnia-Herzegovina pada 1995. "Dari sanalah muncul kabar dia dekat dengan SBY, karena sama-sama pernah bertugas di Bosnia," kata Neta.

Sebenarnya, selain Timur, calon Kapolri lainnya, Komjen Ito Sumardi, pernah bertugas di Bosnia. "Mereka berdua berpeluang," kata Neta. Alumni pasukan Garuda itu kini sering disebut sebagai "Geng Bosnia" di Trunojoyo. Timur dan Ito sendiri menolak berkomentar tentang pencalonan mereka menjadi Kapolri.

Calon terakhir yang juga sering disebut adalah Kapolda Sumatera Utara Irjen Oegroseno. Namanya sempat mencuat ketika sebagai Kapolda Sulawesi Tengah pernah dituding menunda-nunda eksekusi mati atas tiga terpidana kasus Poso: Fabianus Tibo, Domingus Da Silva, dan Marinus Riwu, pertengahan 2006. Pada saat itu, Oegroseno berusaha menelusuri sejumlah bukti dan keterangan baru tentang peran Tibo. "Eksekusi tidak menyelesaikan konflik," katanya ketika itu.

Ketika menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri sampai Maret lalu, Oegroseno dikenal tegas.

Dia pernah berkeras memeriksa pengaduan Susandhi alias Aan dalam kasus penyalahgunaan wewenang polisi, awal 2010. Saat itu ramai beredar kabar bahwa sejumlah perwira tinggi gerah dengan tindakan Oegroseno.

Saat mengadu ke Divisi Propam Mabes Polri, Aan mengaku dipukuli dan disekap di gedung Artha Graha, Jakarta, pertengahan Desember 2009. Ada tiga oknum polisi yang disebut menyaksikan penganiayaan itu. Di ujung penyekapan, Aan malah dituduh memiliki narkoba dan diserahkan ke Polda Metro Jaya. "Ada indikasi rekayasa dalam kasus narkoba Aan ini," kata Oegroseno saat itu.

Mei lalu, Aan dibebaskan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun dugaan rekayasa kasus ini ditutup oleh Kepala Divisi Propam yang baru, Irjen Budi Gunawan. Ketika dihubungi, Oegroseno menolak berkomentar tentang pencalonannya menjadi Kapolri. "Kita ngomong Sumatera Utara saja," katanya.

Staf ahli Kapolri, Kastorius Sinaga, membantah perang dukungan di kantor polisi. "Tidak ada perkubuan di Mabes Polri," katanya. "Semua perwira solid." Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional, Adnan Pandupradja, juga senada. Dia mengaku tidak pernah mendengar ada kubu pendukung kandidat Kapolri yang bersitegang. "Semua perwira yang menjadi pimpinan di Mabes Polri, ya pasti mendapat kepercayaan Jenderal Bambang Hendarso," katanya. "Kalau Kapolri tidak percaya pada satu orang, tentu sudah diganti," katanya.

Namun, Pandu mengakui, akan lebih baik jika pemilihan Kapolri dan unsur pimpinan polisi yang lain diserahkan ke Komisi Kepolisian dan berdasarkan alat ukur yang jelas. "Kalau dipilih sendiri oleh kawan-kawannya, sulit dihindari munculnya banyak isu tidak enak," katanya.

Wahyu Dhyatmika, Setri Yasra, Oktamandjaya Wiguna



Polisi menjalankan tugas pengamanan di Jakarta. Tak banyak pilihan di atas pangkat bintang dua.

Akal-akalan Mencari Kandidat

Jabatan komisaris jenderal bertambah dalam struktur baru kepolisian. Dikebut buat calon kuat Kepala Polri.

SEJAK sebulan lalu rancangan struktur baru organisasi kepolisian itu dipromosikan. Menurut Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Bambang Hendarso Danuri, rancangan keputusannya sudah di meja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Tinggal tunggu ditandatangani," katanya.

Dalam perayaan ulang tahun Persatuan Purnawirawan Kepolisian, pertengahan Juni lalu, Bambang mengatakan, dalam struktur baru ada dua jabatan baru setingkat komisaris jenderal, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan, serta Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Dalam struktur lama, yang ada hanya lima jabatan bintang tiga, yakni Wakil Kepala Kepolisian, Kepala Badan Reserse Kriminal, Inspektorat Pengawasan Umum, Kepala Badan Pembinaan dan Keamanan, serta Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional. Dalam struktur baru, Badan Narkotika akan menjadi badan independen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Selain yang disebutkan Bambang, dalam dokumen rancangan perubahan jabatan yang diperoleh *Tempo*, ada satu

pos lagi yang bakal dipimpin komisaris jenderal, yakni pos sekretaris jenderal. Tim Reformasi Birokrasi Kepolisian menambah pos baru ini menyontek organisasi di kementerian.

Tim penyusun sebetulnya juga membuat rancangan alternatif dengan lima jabatan setingkat komisaris jenderal. Namun Kepala Kepolisian mengajukan rancangan struktur yang lebih gendut—dengan lebih banyak taburan bintang—ke Presiden Yudhoyono.

Perubahan struktur jabatan ini termasuk dalam rencana jangka panjang kepolisian 2005-2025. Tapi Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane menilai penambahan jabatan jenderal bintang tiga itu sekaligus dipakai buat mengatrol beberapa calon pengganti Jenderal Bambang Hendarso.

Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian Tahun 2002, calon Kepala Kepolisian adalah perwira tinggi yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier. "Saya menduga, ketika struktur baru disahkan Presiden, calon kuat akan diberi jabatan baru dan langsung dilantik menjadi bintang tiga," kata Neta.

Jenderal Bambang Hendarso telah mengajukan delapan calon pengganti-

nya ke Komisi Kepolisian Nasional. Hanya tiga perwira yang diajukan berpangkat komisaris jenderal, dan sisanya berpangkat bintang dua. Sejumlah sumber mengatakan para jenderal bintang dua diajukan karena tak banyak pilihan pada pangkat di atasnya. Apalagi beberapa komisaris jenderal menjelang pensiun.

Rencana itu akan mulus jika struktur baru disahkan sebelum penggantian Bambang ditentukan. "Karena itu, penyelesaian rancangan ini dikebut," kata seorang sumber. Dalam dokumen penyusunan struktur disebutkan semua tahapan persiapan sudah tuntas. Begitu Presiden Yudhoyono mengesahkan, sejumlah jabatan dalam struktur baru segera diisi.

Juru bicara presiden, Julian Aldrin Pasha belum bisa memastikan waktu Presiden Yudhoyono akan mengesahkan organisasi baru kepolisian itu. "Saya belum melihat suratnya. Bisa jadi sudah ditandatangani, bisa jadi belum," katanya.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional Adnan Pandupradja membantah struktur baru—yang, menurut dia, termasuk dalam reformasi kepolisian—dibuat semata buat menjaring calon Kepala Kepolisian. Katanya, "Ini lebih untuk menyesuaikan dengan struktur organisasi sipil."

Oktamandjaya Wiguna, Wahyu Dhyatmika
Cornelia Deesma

Djoko Suyanto, Ketua Komisi Kepolisian Nasional Kami Akan Minta Klarifikasi KPK

MARKAS Besar Kepolisian Republik Indonesia resmi menyerahkan sejumlah calon kepala korps baju cokelat itu ke Komisi Kepolisian Nasional. Para jenderal itu akan menjadi calon pengganti Kepala Kepolisian Jenderal Bambang Hendarso Danuri, yang pensiun pada Oktober nanti. Sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian, Komisi Kepolisian berhak memberikan pertimbangan kepada presiden soal pencalonan ini.

Ketua Komisi Kepolisian Nasional Djoko Suyanto mengatakan akan segera menggelar rapat bersama anggota komisi lainnya. "Saya harus mendengar masukan mereka," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan ini. Anggota Komisi itu adalah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Patrialis Akbar, serta wakil masyarakat: Karni Ilyas, Novel Ali, Adnan Pandupradja, La Ode Hussien, dan Eriyn Indarti.

Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia ini menekankan pentingnya pengganti Jenderal Bambang Hendarso berkomitmen melakukan reformasi kepolisian. "Ini yang jadi tuntutan publik," katanya kepada Wahyu Dhyatmika dari *Tempo*, Jumat pekan lalu.

Ada berapa calon yang diajukan Kapolri kepada Komisi Kepolisian?

Calonnya banyak, lebih dari tiga orang. Saya tidak bisa menyebutkan nama-namanya.

Apa langkah berikutnya?

Saya akan rapat dulu dengan anggota Komisi Kepolisian Nasional. Kami tidak terburu-buru, karena masih ada waktu 1-4 bulan sebelum masa jabatan Kapolri berakhir. Buat apa tergesa-gesa?

Ada kabar, Presiden berencana memperpanjang masa jabatan Kapolri sekarang?

Saya belum dengar ada rencana itu. Artinya, itu kabar kabur saja.

Bagaimana mekanisme penyaringan



TIAM/REDA/AGUNG

Apa masalah terbesar reformasi kepolisian?

Reformasi sedang berjalan tapi butuh waktu. Tidak mungkin dalam semalam, 100 persen polisi berubah. Figur Kapolri nanti harus memastikan agar reformasi internal berlanjut, bahkan dipacu lebih cepat lagi. Keluhan masyarakat, masukan dari publik, dan ketidaknyamanan publik atas pelayanan polisi harus diperhatikan.

Bagaimana mencari calon yang punya komitmen seperti itu?

Tentu pernyataan komitmen secara lisan saja tidak menjamin sepenuhnya. Kita akan melihat semua rekam jejak mereka dalam mempercepat reformasi internal kepolisian.

Apakah Komisi Kepolisian akan menjangkau masukan dari pihak lain?

Teman-teman di Polri pasti akan dimintai pendapat. Presiden juga akan meminta pertimbangan langsung dari Kapolri yang juga punya akses komunikasi langsung dengan Presiden. Masukan dari masyarakat akan diperhatikan. Tentu ada mekanismenya, tidak bisa semua orang dideengarkan satu per satu.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Komisi Pemberantasan Korupsi dilibatkan?

Kalau memang diperlukan, ya bisa juga. Kami pasti ke KPK, minta klarifikasi apakah nama-nama calon ini ada yang diperiksa dalam perkara. Kami akan minta klarifikasi.

Apakah akan ada calon yang terlempar dari proses penyaringan di Komisi Kepolisian?

Tentu saja Komisi Kepolisian tidak akan merekomendasikan semua calon ini kepada Presiden. Tidak mungkin semuanya lolos. Kami akan meringkaskannya. Namun kami tidak akan menyetorkan hanya satu calon karena itu berarti *fait accompli* Presiden. Bagaimanapun, penentuan Kapolri adalah hak prerogatif Presiden.

yang disepakati?

Sesuai dengan tugasnya, Komisi Kepolisian memberikan pertimbangan kepada Presiden. Kami akan membuat sejumlah kriteria. Pertama, syarat calon seperti yang ada dalam Undang-Undang Kepolisian. Kami tidak akan keluar dari sana. Kedua, kami akan memperhatikan aspek profesionalitas, kapasitas, dan kapabilitas. Kami akan melihat rekam jejak semua calon: perjalanan karier, pangkat, dan pendidikannya. Pengalaman dan ruang lingkup kerja mereka juga akan dilihat.

Apa faktor yang paling diperhatikan?

Semua aspek itu. Faktor integritas menjadi penting, terutama karena pentingnya reformasi internal kepolisian. Kapolri nanti harus punya komitmen melakukan reformasi di dalam. Ini tuntutan masyarakat.

Sejumlah pegawai KPK, diam-diam ataupun terang-terangan, mengaku kehilangan arah. "Tak ada kepemimpinan di sini." Kata satu pegawai. Situasi diperparah oleh kepingan para pemimpin di level menengah. Satu demi satu mereka memilih mengundurkan diri dan pindah ke lembaga lain.

Maret lalu, keluar pula Chesra Anwar (Direktur Pengawasan Internal) dan Budi Ibrahim (Direktur Pengolahan Informasi dan Data). Sebelumnya, Lambok Hutauruk (Direktur Gratifikasi) dan Romi Ithram Maulana (Direktur Monitoring) sudah angkat kaki. Dua polisi yang kerjanya dinilai baik, Bambang Wirdayatno (Direktur Penelitian) dan Ahmad Wiagus (Direktur Pengabdian Masyarakat), juga sudah "cabut". Sampai pekan lalu, pengganti empat posisi direktur belum diharik.

"Jelas ada krisis di KPK," kata Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Benny K. Harman akhir pekan lalu. "Kalau tak segera ditangani, lembaga itu bisa-bisa jadi macan omping."



PELEMBAMAN KPK betawal dari penangkapan sang ketua, Antasari Azhar. Mel tahun lalu. Dia dituduh terlibat pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, Direktur PT Putra Rajawali Barjaram. Ketika ditahan polisi, Antasari membuat testimoni mengenai dugaan permasalahan yang dilaporkan pengusaha Anggoro Widodo, adik kandung Anggodo.

Testimoni inilah yang dipakai polisi mengejar Bibit Samad Ritanto dan Chandra M. Hamzah. Menggunakan pengakuan Ary Muladi, kolega Anggodo

Antasari Azhar



yang mengatakan telah menyerahkan sejumlah uang kepada pemimpin KPK, polisi menetapkan Bibit dan Chandra sebagai tersangka. Padahal pengakuan Ary kepada polisi itu telah dicabut.

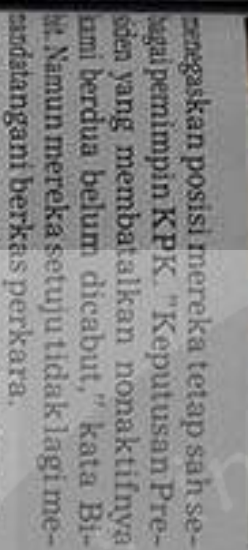
Kasus Antasari dan dua pemimpin lainnya membuat KPK luluh-lantak. Apalagi ruang kerja pemimpin-jantung dari semua operasi KPK—sempat digeledah. Sejumlah pegawai pun bolak-balik diperiksa polisi. "Kami waktu itu tidak bisa bekerja, karena terus-menerus diperiksa," kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar, Kamis pekan lalu. Pukulan terakhir datang dari pembatalan SKPP dalam kasus Bibit

dan Chandra. Sepekan setelah putusan Pengadilan Tinggi Jakarta itu diumumkan, Wakil Ketua KPK M. Hamzah mengumumkan kebijakan baru lembaga. "Hal-hal penting yang berkaitan dengan penandatanganan surat tangani saya dan Pak Haryono Umar," kata Jasin. Keputusan itu, kata dia, diambil untuk menghindari polemik demi keamanan dan keabsahan seluruh tindakan KPK.

Sumber *Tempo* mengatakan keputusan Internal itu sempat diselesaikan. "Seharusnya tidak perlu diumumkan begitu," katanya. Dalam satu diskusi Bibit dan Chandra juga berulang-ulang

Aksi masyarakat mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi.

Walhasil, dalam beberapa gelar perkara, meski penyidik sudah menyatakan alat bukti lengkap, keputusan pemimpin bisa memantapkan semua. "Kalau memang dua pemimpin setuju, dan dua yang lain belum, ya statusnya ditunda," kata Haryono. "Kami minta penyidik melakukan pendalaman lagi." Namun dia membantah ada pelemahan kerja KPK dalam satu bulan terakhir. "Semua tetap kenceng kok," katanya menjamin.



SELAIN disodok dari luar, KPK digerogoti masalah dari dalam. Maret lalu, muncul tuduhan ada makelar kasus di KPK. Sejumlah tersangka kasus korupsi mengadu diperas oleh orang-orang yang mengatasnamakan pemimpin KPK. Hariadi Sadono (mantan Direktur PLN), Jimmy Rimba Yogi (bekas Wali Kota Manado), dan Saleh Abdul Malik (pemilik perusahaan rekanan PLN) sama-sama mengaku pernah diminta uang untuk membebaskan mereka dari jerat KPK.

Nama anak Bibit Samad Rianto, Yudi Prianto, disebut-sebut terlibat. Meski tuduhan ini dibantah, banyak yang heran para makelar kasus bisa punya informasi detail mengenai perkembangan penanganan kasus. Diduga, ada kebohoran di kalangan internal KPK.

Dugaan ada "tikus" di dalam komisi antikorupsi ini jelas meresahkan para pegawai. Kasak-kusuk berkembang

jadi saling curiga. "Ada krisis kepercayaan," kata satu mantan pegawai KPK. Tak mengherankan bila rumor bernada negatif merebak cepat. "Padahal kami benar-benar hanya memaknai pertimbangan hukum," kata Haryono. "Kalau alat bukti tidak cukup, ya statusnya tak akan naik."

Untuk mencegah demoralisasi, Haryono Umar memastikan KPK sedang serius membenahi pengawasan internal. Salah satu aksinya adalah pembegian formulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara ke semua pegawai KPK. Sejak dua pekan lalu, semua pegawai harus mengisi formulir itu, tanpa kecuali. Dari deputi, direktur, sampai sopir dikejar-kejar untuk melaporkan benda mereka. "Sekarang sudah hampir seratus persen melaporkan," kata sumber *Tempo*, Jumat pekan lalu.

Hanya empat dari 700 pegawai KPK yang belum mengisi formulir. Satu orang sedang bertugas di luar negeri, satu sedang hamil tua, satu sedang dirawat di rumah sakit, dan satu lagi sedang mengurus pengunduran diri. "Semuanya harus dikejar terus," kata satu sumber *Tempo*. Pemimpin KPK yakin pelaporan harta kekayaan ini bisa jadi pintu masuk untuk mencari lubang pembocoran informasi di Kuningan.

Selain itu, sejumlah prosedur standar kegiatan dibenahi. Sekarang, setiap informasi atau permintaan data ke lembaga lain di luar KPK harus dinilai dengan tiga skala risiko kebocoran: rendah, sedang, atau tinggi. "Kalau berisiko tinggi, tindakan pengamanannya lain," kata sumber *Tempo*.

Posisi Direktur Pengawasan Internal

menegaskan posisi mereka tetap sah sebagai pemimpin KPK. "Keputusan Presiden yang membatalkan nonaktifnya kami berdua belum dicabut," kata Bibit. Namun mereka setuju tidak lagi menghadiri berkas perkara.

Keputusan inilah yang dituding sebagai pangkal mandeknya sejumlah kasus korupsi yang ditangani KPK. Latar belakang Haryono dan Jasim sebagai akuntan dan birokrat memang memuat keduanya bertanggung jawab di bidang pencegahan, bukan penindakan. Selama ini, yang menjadi motor di bidang penindakan memang Bibit dan Gaandra.

juga kabarnya segera diisi. Direktur baru akan diminta menelusuri semua potensi kebocoran informasi dan laporan miring tentang pegawai dan penyidik KPK, termasuk tuduhan bahwa anak Bibit Samad Rianto terlibat makelar kasus.

MESKI kelak sudah ada kepastian hukum atas Bibit dan Chandra, serta perbaikan soliditas internal, tak ada jaminan bahwa lembaga ini bakal pulih seperti sediakala. Ada satu masalah lagi: dukungan politik.

"Kami merasa sendirian," kata satu pemimpin KPK. Berlarut-larutnya kasus Bibit dan Chandra dinilai sebagai indikator rendahnya dukungan pemerintah kepada KPK. "Ini kan masalah mudah, kalau semua orang punya niat baik," kata Chandra.

Tekanan juga datang dari Senayan. Tim pengawas kasus Bank Century di Dewan Perwakilan Rakyat, misalnya, terus-menerus menekan KPK untuk menaikkan status penyelidikan kasus Bank Century. Sudah ada desakan untuk memotong anggaran KPK jika tak juga ada perkembangan dalam kasus ini.

"Saya memang merasa ada desain kolektif agar KPK ini jangan kembali lagi ke bentuknya semula," kata politikus Fraksi Demokrat, Benny K. Harman. "Suasana batin di tingkat elite seperti itu."

Benny menilai penyebabnya ada di KPK sendiri. "KPK melakukan kesalahan strategis dalam penindakan, sehingga dituding tebang pilih dan diskriminatif," katanya. Untuk mendapat dukungan politik, Benny meminta KPK membuat desain strategis pemberantasan korupsi di Indonesia. "Supaya ada jaminan dan kepastian bahwa mereka yang bekerja sungguh-sungguh tidak mendapat risiko terjerat kasus korupsi," katanya.

Tak seperti Benny, publik tak sabar melihat KPK kembali menggebrak. Bulan lalu, puluhan demonstran Gerakan Berantas Korupsi menyerahkan lima ekor kura-kura ke kantor KPK. Dikurung dalam stoples kaca kecil, lima binatang air bertempurung itu berenang-renang tak berdaya. "Ini simbol KPK yang kerjanya lamban," kata satu pengunjung rasa.

Sayangnya, pesan itu tak pernah sampai. Begitu diterima, seorang pegawai KPK langsung menyerahkan binatang malang itu ke petugas keamanan. Lima kura-kura itu tak pernah mampir ke meja pemimpin KPK.

Wahyu Dhyatmika, Setri Yasra



Hipnotis Anti-Lesu Darah

Sejumlah kasus kakap KPK "terbengkalai". Pertaruhan lembaga antikorupsi itu.

MESKI berstatus tersangka korupsi, lebih dari dua tahun ini Burhanuddin Husin tetap menjalani aktivitasnya sebagai Bupati Kampar, Provinsi Riau. Ditetapkan sebagai pesakitan sejak awal Juni 2008, saban hari ia berkantor di Jalan Lingkar Bangkinang STA 700. Sesekali ia melakukan kunjungan dinas ke kecamatan dan desa di wilayahnya.

Burhanuddin dituding terlibat korupsi Rp 1,3 triliun dalam pemberian izin kehutanan di Kabupaten Pelalawan bersama dua bekas Kepala Dinas Kehutanan Riau lainnya, Syuhada Tasman dan Asrar Rahman. Tiga pejabat ini ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK setelah bekas Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar divonis 11 tahun penjara. Proses hukum Azmun saat ini masuk tahap peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Asrar Rahman telah ditahan sejak Februari lalu dan sedang menjalani proses persidangan. Adapun Burhanuddin dan Syuhada tetap *asoi geboi* sebagai orang bebas. S.F. Marbun, kuasa hu-

kum Tengku Azmun, mempersoalkan diskriminasi ini. "Mengapa KPK berbeda-bedakan?" katanya.

Seorang bekas pejabat teras KPK juga menilai janggal proses hukum yang dilalui dua tersangka korupsi tersebut. Menurut aturan, setelah jadi tersangka hanya butuh paling lama 30 hari bagi seseorang untuk dimajukan ke pengadilan. Apalagi di KPK tidak mengadanya surat perintah penghentian penyidikan (SP3). "Jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, artinya alat bukti sudah lengkap," katanya.

Wakil Ketua KPK Haryono Umar membantah ada perlakuan istimewa terhadap dua tersangka itu. Menurut dia, tidak ada aturan jangka waktu bagi seorang tersangka untuk dibawa ke pengadilan. Masalah waktu tergantung kelengkapan alat bukti. Haryono memastikan dua tersangka kasus korupsi izin kehutanan itu akan diseret ke pengadilan. "Kalau sudah tersangka, pasti akan diproses," katanya.

Burhanuddin belum bisa dimintai komentar. Jumat pekan lalu, Tempo



TEMPO/OWI HARWONO

Kiri-kanan: Tengku Azmun Jaafar, Anggodo Widjono, dan Panda Nababan.

nyambangi rumah dan kantornya, tapi Burhanuddin tidak ada di tempat. "Bapak tidak masuk kerja. Ada urusan ke luar kota," ujar Mahmuddin, petugas pamong praja yang berjaga di ruangan Burhanuddin. Namun, beberapa waktu sebelumnya, kepada *Tempo* dia mengatakan menghormati proses hukum di KPK.

Dalam pantauan Wakil Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Emerson F. Yuntho, kemacetan pengungkapan perkara korupsi tak hanya terjadi dalam kasus korupsi kebutuhan. Menurut dia, sejumlah kasus besar yang ditangani KPK juga jalan di tempat.

Emerson menyebut tiga kasus besar yang menarik perhatian publik tapi pengusutannya tak kunjung tuntas. Pertama, kasus suap cek pelawat dalam pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom. "Peran Paskah Suzetta sangat kuat, tapi mengapa seperti tak tersentuh," katanya.

Peran Paskah telah terkuak dalam persidangan empat bekas kolega Paskah di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR periode 2004-2009: Udju Juhaeri, Endin A.J. Soefihara, Dudhie Makmun Murod, dan Hamka Yandhu.

Hamka dalam persidangan mengaku telah memberikan cek pelawat Rp 600 juta kepada bekas Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional ini. Cek ini antara lain digunakan Paskah untuk membeli mobil Honda CR-V.

Ketika dihadirkan di persidangan, Min Hui, pegawai *showroom* tempat Paskah membeli mobil itu, menyatakan menerima lima cek pelawat dari Paskah sebagai pembayaran pembelian mobil. Namun Paskah keras membantah menerima cek dan memakainya untuk

membeli oto.

Dokumen pemeriksaan Hamka mencatat, Paskah yang mengarahkan semua anggota Fraksi Golkar di Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat 1999-2004 agar memilih Miranda.

Selain Paskah, menurut Emerson, keterlibatan politikus PDI Perjuangan Panda Nababan sulit dimungkiri dalam kasus cek pelawat. Dudhie Makmun dalam persidangan mengaku pernah diperintah Panda mengambil cek dari seseorang di Restoran Bebek Bali, Senayan. Cek itu yang kemudian dibagikan ke sejumlah anggota Fraksi PDI Perjuangan di Komisi Keuangan DPR. "Bukti keterlibatan Panda terungkap secara jelas," kata Emerson. "Apa lagi yang kurang?" Panda, yang diduga kecipratan Rp 1,45 miliar, dalam berbagai kesempatan menolak tuduhan Dudhie.

Selain itu, Emerson menyorot kelambatan KPK menuntaskan dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran yang melibatkan bekas Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno.

Padahal, dalam kasus ini, awal Januari lalu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengganjar bekas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Oentarto Sindung Maward dengan hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Dia dinilai terbukti terlibat korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran. Dalam pertimbangannya, majelis hakim yang diketuai Tjokorda Rai Suamba menilai Hari Sabarno juga harus ikut bertanggung jawab dalam perkara ini.

Soal tuduhan ini, Hari Sabarno belum bisa dimintai tanggapan. Namun, pada 26 Juni silam, lewat surat tulisan tangannya yang dikirim ke redaksi *Tempo*, Hari menolak semua tuduhan Oentarto. "Saya tidak melakukan tindak pidana," katanya.

Terakhir, Emerson menilai satu ka-

sus lain yang perlu mendapat penuntasan segera oleh KPK adalah dugaan suap proyek infrastruktur di Departemen Perhubungan yang melibatkan politikus Partai Demokrat, Jhonny Allen Marbun. Menurut dia, pengakuan Risco Pesiwarissa, ajudan sang politikus, sudah bisa menjadi bukti kuat untuk menjadikan Jhonny sebagai tersangka.

Risco adalah saksi penting dalam kasus suap dana stimulus proyek infrastruktur Indonesia timur yang telah mengantarkan anggota Komisi Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat, Abdul Hadi Djamil, ke penjara.

Di pengadilan, Abdul Hadi menyatakan telah menyerahkan duit Rp 1 miliar kepada Jhonny lewat Risco. Duit itu berasal dari Hontjo Kurniawan, Komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bhakti, yang mengincar proyek departemen. Jhonny Allen berulang kali membantah tuduhan Abdul Hadi dan Risco.

Haryono Umar memastikan KPK tidak berhenti mengusut dua kasus besar tersebut. Dia menerangkan para penyidik terus bekerja mengumpulkan alat bukti. "Kami tidak berhenti," katanya. "Kalau menurut hukum alat bukti cukup, pasti kami proses."

Dia juga menegaskan tidak ada kekhawatiran sedikit pun bagi KPK dalam menangani dua kasus itu. "Semua ini lebih soal proses penyidikan. Tidak ada intervensi," ujar Haryono. Sumber *Tempo* di KPK juga memastikan akan ada langkah hukum lanjutan bagi ketiga tokoh kakap tersebut. "Ini soal *timing* saja. Pasti diproses," katanya.

Bagi Emerson Yuntho, penuntasan tiga kasus itu adalah pertarungan KPK. Jika komisi ini tak juga bergerak, secara berkelakar Emerson menawarkan solusi lain. "Kita perlu memanggil ahli hipnotis Rommy Rafael agar membuat pimpinan KPK tidak lesu darah."

Setri Yasa, Jurnalis Samosir (Kampar)



Pendaftaran calon
 Ketua KPK di
 Departemen Hukum
 dan HAM di Jakarta.

Tarik-Ulur Masa Kerja

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi pengganti Antasari dipilih untuk empat tahun. Dewan Perwakilan Rakyat menentang.

Di ruang rapat Soepomo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, panitia seleksi pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi meneliti aneka berkas. Bekerja selepas makan siang hingga magrib, dua pekan lalu, mereka menyimak 620 surat dan e-mail berisi dukungan atau penolakan terhadap 144 calon yang lulus tahap pertama.

Aneka surat itu merupakan tanggapan terhadap para calon. Panitia yang dipimpin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar kini menyiapkan ujian selanjutnya, yakni pembuatan makalah, tes psikologi, dan wawancara. Semua proses ditargetkan kelar pada Agustus ini.

Panitia seleksi terdiri atas Patrialis, dengan wakil ketua Inspektur Jenderal M.H. Ritonga dan Soeharto. Anggotanya Achmad Ubbe, Ahmad Syaf'ie Ma'arif, Todung Mulya Lubis, Rhenald Kasali, Basrief Arief, Akhlar Salmi, Erry Riyana Hardjapamekas, Muhammad Fajrul Falak, Ichlasul Amal, dan Hariyadi B. Sukamdani.

Ngebut menyelesaikan tahapan seleksi, panitia telah mengambil putusan

penting; ketua terpilih akan bekerja selama empat tahun—bukan setahun seperti sisa periode kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini. "Suara kami sudah final, semua sepakat masa kerja pimpinan empat tahun," kata Rhenald Kasali. Menurut dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setuju dengan keputusan panitia.

Masa kerja pemimpin Komisi selama empat tahun diputuskan demi alasan efisiensi. Biaya yang dikeluarkan untuk proses seleksi sangat mahal, sekitar Rp 2,5 miliar. Masa kerja satu tahun juga teramat singkat untuk pemimpin baru. "Kami khawatir tak ada calon yang mau mendaftar," kata Rhenald.

Keputusan panitia seleksi itu berbeda dengan pendapat para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang menganggap masa kerja pemimpin baru hanya setahun. Alasannya, calon terpilih akan menggantikan posisi Antasari Azhar, Ketua KPK yang dihukum dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.

Menurut anggota Dewan dari PDI Perjuangan, Gayus Lumbuun, Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan

an Tindak Pidana Korupsi mengatur masalah kekosongan pimpinan dengan mengajukan calon pengganti. "Pengertian pengganti itu melanjutkan masa tersisa, bukan bekerja dari awal," katanya.

Anggota Dewan dari Partai Amanat Nasional, Tjatur Sapto Edy, beda sedikit. Ia mengatakan anggota Dewan belum pernah membicarakan polemik masa kerja dalam pertemuan formal. "Bila Dewan tak menyetujui poin masa kerja, calon yang diajukan pemerintah bisa ditolak," katanya.

Tapi, "Ini bukan sikap mati anggota Dewan," Tjatur menambahkan. Panitia seleksi pun menanti pertemuan dengan Dewan. "Pimpinan panitia seleksi sedang melakukan lobi untuk menyepakati itu," kata Erry Riyana Hardjapamekas.

Menurut Adnan Topan Husodo, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch, pendapat Dewan bahwa masa kerja pimpinan baru hanya melanjutkan kepemimpinan sebelumnya diwariskan kepentingan politik. Ia menilai masa kerja satu tahun tak efisien karena setiap pemimpin baru membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian.

Pakar hukum tata negara Saldi Isra menganggap masalah masa kerja sebagai persoalan mustahak yang harus diputuskan Presiden. "Dewan tak punya hak menolak," katanya. Dia menyarankan panitia seleksi berfokus pada proses penyeleksian.

Yullawati, Wahyu Dhyatmoko

Haryono Umar:

Pimpinan Itu Hanya Nakhoda

DIGEMPUR kiri-kanan, Komisi Pemberantasan Korupsi lemah lunglai. Lembaga yang sebenarnya sangat kuat itu kini lemas tanpa gebrakan. Beberapa kasus besar terbengkalai.

Awalnya Ketua KPK Antasari Azhar ditangkap karena didakwa mendalangi pembunuhan seorang pejabat perusahaan negara. Dua komisioner lainnya, Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto, ditetapkan sebagai tersangka melalui proses rekayasa setelah membidik seorang jenderal polisi yang terlibat kasus suap. Hubungan keduanya, plus dua komisioner yang tersisa, M. Jasin dan Haryono Umar, tak kompak.

Kepada *Tempo* yang menemuinya di gedung KPK, Kamis pekan lalu, Haryono Umar menyatakan organisasinya berjalan normal. "Kami tetap semangat," kata Wakil Ketua KPK itu. Mengenakan kemeja batik cokelat, ia menjelaskan kondisi di lembaganya kepada tim *Tempo*.

Serangan terhadap KPK datang bertubi-tubi, apakah badai itu telah berlalu?

Mudah-mudahan berlalu *beneran*. Dari persidangan memang terbukti tidak ada tindak pidana yang mereka (Bibit dan Chandra) lakukan. Kemudian dari memori peninjauan kembali dari kejaksaan juga tampak kasus ini sudah *clear*.

Kriminalisasi itu memberikan dampak psikologis yang buruk bagi pimpinan KPK?

Tidak banyak berpengaruh, karena kami tetap bekerja seperti biasa. Saya salut, walaupun dengan kondisi seperti itu, semangat kerja kami tetap tinggi.

Anda pribadi waswas mendapat serangan yang sama?

Yang jelas kami menyadari, dalam menangani korupsi ada risiko seperti itu.

Serangan itu membuat KPK lamban?

Tidak. Kami tetap jalan. Deputi-deputi yang lain tetap jalan kencang. Pimpinan kan hanya nakhoda. Sepanjang kapalnya tetap utuh, ya tidak jadi masalah.

Pemimpin KPK sekarang lebih lemah daripada sebelumnya....

Jelas ada perbedaan pandangan (terhadap kasus-kasus yang ditangani KPK) dari sisi awam dan dari sisi hukum. Dari sisi hukum, kami mesti melihat bukti. KPK tetap berhati-hati. Per-

"Pimpinan kan hanya nakhoda. Sepanjang kapalnya tetap utuh, ya tidak jadi masalah."

cayalah, semuanya tetap berjalan. Memang terkesan klise, karena kami hanya bisa mengatakan sabar. Namun yang pasti pimpinan tidak menerima tekanan dan juga tidak bisa mengintervensi penyidik dalam menangani kasus.

Dalam laporan akhir tahun 2009, tercatat ada penurunan penanganan kasus oleh KPK?

Itu wajar. Kami diperiksa sehingga tidak fokus dalam menjalankan tugas. Jadwal yang dibuat menjadi berantakan. Harusnya ada gelar perkara, tapi batal.

Sejumlah kasus besar yang melibatkan sejumlah politikus dari partai politik besar tidak kunjung dituntaskan?

Kami tidak berhenti. Namun yang perlu diingat dalam menetapkan status tersangka terhadap seseorang sepenuhnya wewenang penyidik dan harus didasarkan atas bukti yang cukup.

Kami mendengar kabar, muncul demoralisasi di KPK, yang ditandai dengan banyaknya pejabat keluar?

Kalau sumber daya manusia keluar itu sebenarnya dari dulu. Banyak penyebabnya. Selain karena pegawai KPK

sangat diminati banyak perusahaan di luar, ada unsur kejenuhan. Berbeda dengan lembaga lain yang sangat mudah melakukan rotasi, KPK tidak mengenal itu. Misalnya, kalau seseorang dari awal masuk KPK sebagai penyidik, dia akan tetap selamanya jadi penyidik.

Soal penanganan kasus Bank Century, DPR menilai KPK sangat lamban?

Tidak tepat juga dikatakan seperti itu. Penyidik kami bekerja keras meneliti kasus itu. Keseriusan itu dibuktikan dengan dibentuk sembilan tim setelah kasus Century dilimpahkan Badan Pemeriksa Keuangan.

Benarkah ada perpecahan di antara pimpinan KPK soal penetapan ada-tidaknya korupsi dalam kasus Bank Century?

Tidak ada itu. Karena yang disampaikan ada-tidaknya unsur korupsi dalam gelar perkara adalah dari penyidik, bukan pimpinan.

Tim pengawas Bank Century DPR memang akan memotong anggaran KPK karena dinilai lambat....

Kami tidak terpengaruh. Proses penyelidikan kasus itu tetap berjalan.





Miranda S. G...
Lupanya Nur...
memutus k...
cek pelawat...
Miranda.

Nunun kini tinggal di Singapura. Empat kali panggilan pengadilan, empat kali pula ibu empat anak ini tak datang dengan alasan diserang penyakit lupa berat. Adang menyatakan istrinya terkena amnesia akibat *stroke* pada akhir tahun lalu, setelah selama bertahun-tahun menderita migrain dan vertigo. Sakit Nunun itu dikuatkan surat keterangan dokter. "Dia sudah tak bisa mengingat peristiwa di masa silam," kata Andreas Harry, dokter saraf yang merawat Nunun sejak 2006.

●●●
Tanggal 8 Juni 2004. Ketika 54 anggota Komisi Keuangan mencecar tiga calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, sebuah kesibukan terjadi di Bank Internasional Indonesia. BII mendapat telepon dari teller Bank Artha Graha. Bank itu memesan 480 cek pelawat dengan nilai setiap lembar Rp 50 juta. Saat diperiksa penyidik, Krisna Pribadi, Kepala Traveller Cheque BII, menyatakan salah satu nasabah Artha saat itu memerlukan cek perjalanan dengan segera. Pemesanan cek terjadi saat kantor baru buka, sekitar pukul delapan.

Sejam kemudian cek-cek itu siap. Mendapat kepastian Artha Graha telah mentransfer Rp 24 miliar untuk pembelian cek itu, Krisna meluncur ke kantor Bank Artha Graha di gedung Artha Graha di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Di sana ia diterima Tutur, Kepala teller Artha Graha. Setengah jam kemudian Krisna mendapat surat pernyaa-

taan pembelian yang diteken seseorang di atas meterai tanpa tertera nama.

Dari surat itu Krisna baru tahu bahwa nasabah Artha Graha yang membeli cek adalah PT First Mujur Plantation & Industry. Kepada penyidik, Krisna mengaku heran mengapa pembeli dan pemesan bisa berbeda. Uang yang ditransfer dari rekening Artha Graha, tapi pembelinya pihak lain. "Saya tak tahu mengapa bisa seperti itu," katanya seperti dikutip sumber *Tempo*.

Pada hari yang sama, kesibukan juga terjadi di lantai 27 gedung Artha Graha, tempat PT First bermarkas. Hidayat Lukman, pemilik PT First Mujur, memerintahkan Budi Santoso, direktur keuangannya, mentransfer uang kepada Suhardi Suparman alias Ferry Yen. Dua bulan sebelumnya Hidayat dan Ferry bersetuju membeli kebun sawit 5.000 hektare di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, seharga Rp 75 miliar.

Keduanya sepakat berkongsi dengan pembagian saham 80 persen untuk Hidayat dan sisanya dipegang Ferry. Hidayat—biasa dipanggil Teddy Uban—berniat membayar uang muka Rp 24 miliar. Budi segera memindahkan uang sejumlah yang diminta Teddy di rekening Bank Artha Graha ke rekening penampungan.

Budi sudah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepada penyidik dia menyatakan uang itu merupakan pinjaman berjangka dari Artha Graha yang ditransfer hari itu juga. Ia menerima uang tersebut dalam bentuk cek tunai

tujuh lembar. Menurut pengakuan Budi Ferry meminta pembayaran dalam bentuk cek pelawat dengan nilai nominal setiap lembar Rp 50 juta.

Menurut Budi, setelah disetujui Teddy Uban, ia mengajukan permintaan pembelian cek perjalanan ke Artha Graha Sejam sebelumnya, Krisna Pribadi telah meninggalkan kantor Artha Graha dan telah menyerahkan cek dengan nomor seri 135-010191 sampai 135-010670. Menurut Budi, ratusan cek itu lantas diserahkan semuanya ke Ferry Yen.

Teddy tak bisa dimintai konfirmasi perihal kejanggalan, misalnya, mengapa Ferry meminta pembayaran pelawat *traveller's cheque* dengan nomor seri yang sama dengan yang masuk di kantong anggota Dewan. Kepada *Tempo*, salah seorang anaknya mengatakan ayahnya masih dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura, untuk pemeriksaan kanker sumsum tulang belakang.

Adapun Ferry sudah meninggal pada 7 Januari 2007. Menurut Budi, ia telah meninggalkan utang Rp 10,2 miliar biaya pembelian kebun sawit yang ternyata batal—kepada First Mujur. Ferrusnya Ferry mengembalikan cek yang sudah kadung diterimanya. Setelah meninggal, demikian ujar Budi, ia sempat mencicil 15 kali senilai Rp 13,2 miliar. Aneh bin ajaib, Teddy membiarkan sisa utang ke Artha Graha itu tanpa meminta keluarga Ferry melunasi utang an almarhum.

Ferry sendiri misterius. Seorang pengusaha sawit di Tapanuli yang

Tempo mengaku tak pernah ke Ferry. Kepada *Tempo*, Linda Ferry, mengaku tak tahu siapa suaminya. "Saya baru tahu siapa saya setelah namanya disebut," ujarnya.

Kejadian misterius adalah cek yang dikirim Ferry, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan hampir semua cek dan meyakini bahwa cek itulah yang diteri-
Dyuberti dan 38 anggota Ko-
Kanglannya dari Arie Malang-

berbeda berbeda hulu, kini ber-
satu nama: Nunun Nurbaetie.



LAH pertanyaan kini meng-
apa hubungan Ferry dan
Bagaimana cek yang diklaim
Ferry belakangan malah ber-
d tangan anggota Dewan? Di
Budi Santoso mengaku
mengapa cek-cek itu bisa lepas
Ferry.

dan sebenarnya sudah terjadi
real pembelian cek. Dalam su-
nggan jual-beli yang diterima
ribadi, pembeli cek itu dibiar-
seng tak diteken. Padahal tanda
ini penting sebagai validasi jika
nya mencairkan cek di bank.

Apalagi jumlahnya banyak. Dengan kolom kosong, pemilik dan pencair cek itu bisa siapa saja.

Karena itu, tak hanya anggota DPR yang kecipratan cek haram itu. Sumarni, sekretaris pribadi Nunun, di pengadilan mengaku telah mencairkan 20 lembar senilai Rp 1 miliar. Katanya, ia disuruh mencairkan cek itu oleh direktori PT Wahana Esa Sembada, perusahaan Nunun yang lain. Tapi Sumarni menya-
takan lupa siapa yang menyuruh dan ke-
rekening siapa duit pencairan cek itu
ia transfer. Alhasil, dari 480 cek yang
tersebar, tinggal 33 lembar yang belum
jelas penerimanya. Cek-cek itu sudah
dicairkan tapi belum diketahui hubun-
gannya dengan anggota Dewan.

Kematian Ferry membuat pengu-
sutan sumber cek suap ini buntu. Arie
Malangjudo juga tak memberikan ke-
terangan lain selain yang ia sampai-
kan ke penyidik Komisi. Ditemui *Tempo* setelah menjadi saksi untuk terdak-
wa anggota Komisi Keuangan dari Par-
tai Persatuan Pembangunan, Endin A.J.
Soefihara, ia hanya menggelengkan ke-
pala. "Keterangan saya sama," katanya.
Sebelumnya, kepada penyidik Endin
mengaku hanya disuruh Nunun mem-
bagikan cek itu. "Bahkan saya tak tahu
bahwa isi amplop itu cek perjalanan,"
katanya kepada penyidik.

Lupanya Nunun—jika benar ia ter-
kena penyakit berat yang tak bisa sem-
bah—juga bakal memutus kaitan cek
ini dengan Miranda. Di pengadilan Mi-
randa menyatakan dirinya tak tahu-
menahu soal cek pelawat itu. Ia tak me-
nyangkal kenal Nunun. Miranda, se-
perti penuturan Sumarni, kerap datang
ke rumah Nunun jika tuannya itu mem-
buat pesta.

Sejauh ini Komisi belum bisa mem-
takan dengan jelas bagaimana kaitan
Nunun, Miranda, dan First Mijur dalam
suap ini. "Yang paling tahu, ya, yang sa-
kit lupa itu," kata Tumpak Hatorangan
Panggabean, pelaksana tugas Ketua
Komisi Pemberantasan Korupsi, yang
berhenti sebulan lalu.

Kepada *Tempo*, pekan lalu, dokter
Andreas Harry menunjukkan hasil pe-
meriksaan yang menyatakan Nunun tak
bisa bersaksi karena tak mampu meng-
ingat. "Ingatannya antara amnesia me-
nuju demensia," katanya. Demensia
adalah memori terberat yang membuat
penderitanya lupa sama sekali dengan
lingkungannya.

Menurut Andreas, Nunun hanya di-
periksa dua kali oleh Komisi Pemberan-
tasan Korupsi dan sempat pingsan saat
akan diperiksa lagi. Penyakit Nunun
ini, kata Andreas, memburuk setelah
terkena *stroke* pada 26 Juni 2009 akibat

Partahi Sihombing:

Dia Bukan Saksi Kunci

Dua kali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, tak banyak keterangan keluar dari Nunun Nurbaetie. Pengusaha 59 tahun ini mengaku lupa pada peristiwa enam tahun lalu di kantornya itu. Padahal sejumlah saksi, antara lain bekas direktur utama perusahaan, Arie Malangjudo, menyebut Nununlah yang pernah dia antar tas berisi cek pelawat ke anggota Perwakilan Rakyat. Dan tas-tas itu sebelumnya, menurut Arie, ada di ruang Nunun.

Komis telah mencelak Nunun sejak 24 Maret lalu. Tapi, sebelum itu, pada 23 Februari, Nunun telah terbang ke Singapura. Di sana, istri bekas Wakil Kepala Kepolisian RI dan mantan jenderal (Purnawirawan) Adang Daradjatun ini bahkan berobat ke Rumah Sakit Mount Elizabeth untuk melihat ingatannya. Dengan alasan sakit inilah Nunun takkan tak bisa hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Reaksi Nunun memang penting untuk menguatkan cek pelawat ini. Ia diharapkan bisa menjelaskan, apakah, mengapa cek Rp 24 miliar yang dipesan Bank Artha untuk PT First Mujur Plantation & Industry bisa pergi ke tangan anggota Dewan. Berikut ini wawancara dengan pengacara Nunun, Partahi Sihombing.

Partahi Sihombing, bagaimana hubungan Nunun Nurbaetie dengan First Mujur Plantation & Industry?

Partahi Sihombing: Saya juga tidak tahu dan tak mau mengada-ada. Hanya

beliau yang bisa menjelaskannya. Yang saya ketahui dari keterangan saat diperiksa, beliau mengatakan tak punya hubungan dengan kasus ini.

Faktanya, cek dari First Mujur sama dengan cek yang diterima anggota DPR?

Ibu Nunun tidak tahu dan tidak ingat. Waktu pemeriksaan, tak banyak yang bisa digali, karena memang tak bisa ingat.

Arie Malangjudo bilang Nunun punya hubungan bisnis dengan Artha Graha?

Buktikan, dong. Jangan hanya pengakuan. Kalau cuma ngaku, kan repot.

Penerima cek mengaku dihubungi dan menerimanya di Kantor Nunun....

Sekali lagi, itu pengakuan. Baru petunjuk dan harus dibuktikan. Apa bukti dan saksi yang mendukung keterangan Arie? Kalau dia diperintah Bu Nunun, ada tanda terima tidak? Kalau pengakuan saja, tak valid.

Selain anggota Dewan, sekretaris pribadi Nunun, Sumarni, juga mencairkan cek Rp 1 miliar. Disuruh siapa?

Wah, saya tak tahu ada cerita itu. Makanya, saya juga ingin Ibu bersaksi supaya jelas. Tapi beliau kan sakit....

Seberapa parah sakitnya?

Fisiknya drop. Kadang-kadang suka bengong dengan pandangan tak fokus.

Kenapa harus dirawat di Singapura?

Ini masalah kelengkapan peralatan saja.

Dia kan saksi kunci kasus ini....

Hakim sudah berpendapat tak perlu keterangan Bu Nunun. Artinya, dia bukan saksi kunci.